



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023



RKPD
2023



BAPPEDA LITBANG



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Kab. Samosir



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 61 SERI F NOMOR 827**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Samosir.
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2023.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Samosir untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2023 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2023 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan

Pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,



HOTRAGA SITANGGANG, ST, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740131 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2022 NOMOR 61 SERI F NOMOR 827



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, (3) Pendekatan Top-Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga upaya untuk mewujudkan sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah akan dapat diimplementasikan apabila terdapat konsistensi antara perencanaan strategis dengan target kinerja dalam RKPD yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen Rencana Kerja transisi dimana RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2016-2021 sudah berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum tersusun. Oleh karena itu, penentuan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 menjadi krusial agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.


BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
BAB I	PENDAHULUAN..... I- 1
	1.1 Latar Belakang I- 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I- 3
	1.3 Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 I- 5
	1.4 Hubungan Antar Dokumen..... I- 6
	1.5 Maksud dan Tujuan..... I- 10
	1.6 Sistematika Dokumen RKPD I- 11
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II- 1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi II- 1
	1. Karakteristik lokasi dan wilayah II- 1
	2. Potensi Pengembangan Wilayah II- 8
	3. Wilayah Rawan Bencana II- 14
	4. Kondisi Demografi Daerah II- 15
	5. Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir II- 17
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II- 20
	1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II- 20
	2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... II- 24
	2.3 Aspek Pelayanan Umum..... II- 30
	1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II- 31
	2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... II- 44
	3. Urusan Pilihan II- 59
	4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II- 63
	5. Urusan Pendukung II- 66
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah II- 68
	1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II- 68
	2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II- 73
	3. Fokus Iklim Berinvestasi II- 73
	4. Fokus Sumber Daya Manusia II- 74
	5. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) II- 76
	2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD II- 77
	1. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 II- 77
	2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal II- 99
	3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II- 102
	2.6 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II- 103
	2.7 Isu Strategis II- 105
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... III- 1
	3.1 Kerangka Ekonomi III- 1
	1. Kondisi Ekonomi Global III- 1
	2. Kondisi Ekonomi Nasional..... III- 2
	3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara..... III- 2



	4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Samsir.....	III- 5
	a. Pertumbuhan ekonomi.....	III- 5
	b. Indeks gini.....	III- 7
	c. Tingkat kemiskinan	III- 7
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka	III- 8
	e. Indeks Pembangunan Manusia.....	III- 8
	3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah	III- 9
	3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III- 10
	1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III- 10
	2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III- 13
	3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III- 15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV- 1
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV- 1
	1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV- 1
	2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV- 2
	3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Samsir	IV- 3
	4.2 Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Kabupaten Samsir Tahun 2023.....	IV- 8
	4.3 Arah Kebijakan & Sasaran Pokok Pembangunan	IV- 9
	4.4 Prioritas Pembangunan	IV- 17
	1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023.....	IV- 17
	2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023....	IV- 21
	3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2023.....	IV- 21
	4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Prioritas Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2023.....	IV- 32
	4.6 Pembangunan Inovasi Daerah.....	IV- 34
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V- 1
	5.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	V- 6
	5.2 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah	V- 77
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI- 1
	6.1 Indikator Kinerja Utama	VI- 1
	6.2 Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samsir.....	VI- 3
BAB VII	PENUTUP	VII- 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Samsir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021.....	II- 1
Tabel 2.2	Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samsir	II- 3
Tabel 2.3	Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samsir.....	II- 4
Tabel 2.4	Banyaknya Gempa Bumi yang Dirasakan di Kabupaten Samsir 2013-2020.....	II- 4
Tabel 2.5	sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) di wilayah Kabupaten Samsir	II- 6
Tabel 2.6	Curah Hujan (Ch), Hari Hujan (Hh)dan Rata-Rata Penyinaran Matahari Di Kabupaten Samsir Tahun 2021.....	II- 7
Tabel 2.7	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samsir.....	II- 11
Tabel 2.8	Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung	II- 12
Tabel 2.9	Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau).....	II- 12
Tabel 2.10	Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samsir...	II- 14
Tabel 2.11	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samsir Menurut KecamatanTahun 2017-2021.....	II- 16
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021	II- 16
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten SamsirTahun 2017-2021.....	II- 20
Tabel 2.14	Peranan PDRB harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021....	II- 21
Tabel 2.15	PDRB Perkapita Kabupaten Samsir Menurut Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2017-2021.....	II- 22
Tabel 2.16	Indeks Gini Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021	II- 23
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 24
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samsir Tahun 2015 – 2021	II- 25
Tabel 2.19	Umur Harapan Hidup Kabupaten Samsir Tahun 2015-2021	II- 26
Tabel 2.20	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 27
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 27
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 28
Tabel 2.23	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samsir Tahun 2017-202.....	II- 29
Tabel 2.24	Opini BPK	II- 29
Tabel 2.25	Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 30
Tabel 2.26	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021	II- 31
Tabel 2.27	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021	II- 35
Tabel 2.28	Prasarana Jalan Kabupaten Samsir Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung JawabTahun 2017-2021	II- 37
Tabel 2.29	Prasarana Jalan Kabupaten Samsir Berdasarkan, Kondisi dan Jenis Permukaan Tahun 2021	II- 38
Tabel 2.30	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021	II- 39
Tabel 2.31	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021.....	II- 40



Tabel 2.32	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.33	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2.34	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.35	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-45
Tabel 2.36	Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-47
Tabel 2.37	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.38	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-50
Tabel 2.39	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-51
Tabel 2.40	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-51
Tabel 2.41	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-52
Tabel 2.42	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.43	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.44	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.45	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-55
Tabel 2.46	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-56
Tabel 2.47	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.48	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-58
Tabel 2.49	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Parawisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.50	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.51	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.52	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.53	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.54	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.55	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-65
Tabel 2.56	Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021.....	II-65



Tabel 2.57	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.58	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.59	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Rupiah)	II-69
Tabel 2.60	Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-69
Tabel 2.61	Produktivitas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.62	Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.63	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Milyar)	II-71
Tabel 2.64	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.65	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	II-73
Tabel 2.66	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Samosir Tahun 2021	II-73
Tabel 2.67	Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2020-2021.....	II-74
Tabel 2.68	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir Tahun 2017 - 2021.....	II-74
Tabel 2.69	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021.....	II-75
Tabel 2.70	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.71	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	II-77
Tabel 2.72	Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun	II-97
Tabel 2.73	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.....	II-99
Tabel 2.74	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.....	II-100
Tabel 2.75	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.....	II-100
Tabel 2.76	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat	II-101
Tabel 2.77	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.....	II-101
Tabel 2.78	Capaian TPB Kabupaten Samosir Berdasarkan Pilar	II-102
Tabel 2.79	Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2023	II-106
Tabel 3.1	Realisasi Pertumbuhan Tahun 2020, 2021 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023	III-3
Tabel 3.2	Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran.....	III-4
Tabel 3.3	Laju pertumbuhan ekonomi riil menurut lapangan usaha 2016-2021...	III-6
Tabel 3.4	Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Samosir	III-7
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Kabupaten Samosir Tahun 2018 - 2021.....	III-12
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Rencana Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Samosir.....	III-13
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 - 2021.....	III-14
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Rencana Belanja Tahun 2023 Kabupaten Samosir	III-15
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 - 2021.....	III-16
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	III-17



Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023	IV-4
Tabel 4.2	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas ...	IV-6
Tabel 4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023	IV-10
Tabel 4.4	Konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis	IV-22
Tabel 4.5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	IV-26
Tabel 4.6	Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam.....	IV-29
Tabel 4.7	Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	IV-30
Tabel 4.8	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur	IV-30
Tabel 4.9	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur	IV-32
Tabel 4.10	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.11	Inovasi yang Diimplementasikan	IV-35
Tabel 4.12	Inovasi Ujicoba Tahun 2022 dan Implementasi Tahun 2023	IV-36
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Kabupaten Samosir Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	V-2
Tabel 5.3	Usulan Kegiatan Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2023.....	V-7
Tabel 5.4	Rancangan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Tahun 2023	V-78
Tabel 5.5	Pagu Belanja Langsung Tahun 2022 dan Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung OPD Kabupaten Samosir Tahun 2023.....	V-79
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir	VI-1
Tabel 6.2	Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023-2024	VI-3
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023-2024	VI-4

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023	I-6
Gambar 1.2	Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 1.3	Hubungan RKPD Kabupaten Samosir 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017.....	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Samosir	II-2
Gambar 2.2	Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara	II-2
Gambar 2.3	Peta ketinggian Kabupaten Samosir.....	II-3
Gambar 2.4	Peta geologi wilayah Kabupaten Samosir.....	II-5
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir.....	II-7
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Samosir	III-5
Gambar 3.2	Indeks Gini Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Samosir.....	III-7
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Samosir.....	III-8
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir.....	III-8
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan MAnusia	III-9
Gambar 5.1	Persentase Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun 2023.....	V-78



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan dalam amanat tersebut bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam upaya untuk mencapai tujuan bernegara.

Pasal 386 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi ini diharapkan dapat mengakselerasi masyarakat dalam hal pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi, dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencasna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Samosir juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19). RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan RPJMN 2024, RKPD Provinsi Sumatera Utara 2023 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan prosesnya penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up*(bawah-atas) dan *up-down* (atas bawah).

1. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses ini digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, yang dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari lembaga/ instansi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan Partisipatif adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat



dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang dijalankan melalui Musrenbang. Pendekatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten dengan menghimpun dari hasil rebug warga, pendekatan juga dilakukan dalam bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para tokoh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri 86 tahun 2017.

3. Pendekatan politik

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Dalam prinsipnya pendekatan politik ini memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah lebih mengedepankan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 dikukuhkan dengan mengedepankan proses politik Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas

Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2023 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih melaksanakan tugasnya pada Periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 "Terwujudnya masyarakat samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan". Hasil penjabaran RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 melahirkan tema "**Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan**".

Secara umum RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disajikan dengan sistematika yang memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum;
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
6. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Samosir masih dihadapkan dengan dampak pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun juga menekan perekonomian di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian Indonesia juga tidak dapat menghindari dari dampak pandemi Covid-19, dimana perekonomian berkontraksi sangat dalam. Gejala ekonomi akibat wabah Covid-19 berakibat pada tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama yaitu konsumsi rumah tangga atau daya beli yang jatuh cukup dalam, kedua menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan ketiga menyebabkan harga komoditas turun. Dalam masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19, masyarakat yang bekerja pada sektor informal terdampak sangat buruk. Pertanian, Kehutanan dan



Perikanan merupakan sektor informal penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Samosir, dimana pada tahun 2020 menyumbang sebesar 50,87% dari PDRB ADHB Kabupaten Samosir. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak di Kabupaten Samosir.

Penanganan pandemi yang sudah semakin membaik menjadikan Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum dalam membangkitkan optimisme, dan kepercayaan yang besar pada masyarakat dan pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas produktif lain. Oleh karena itu kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023 harus dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut RKPd Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mengevaluasi permasalahan serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Samosir pasca pandemi COVID-19 dengan berbagai penyesuaian pencapaian target, seperti pemulihan kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan disamping ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan publik yang didukung oleh implementasi teknologi dan informasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rancangan Akhir RKPd Tahun 2023 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPd Tahun 2021 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan Dokumen RKPd Tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tata cara penyusunan RKPd Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan awal RKPd
- b. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
- c. Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPd Tahun 2023 untuk dilakukan penyempurnaan penyusunan rancangan RKPd
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan
- e. Fasilitasi oleh Provinsi yang digunakan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPd
- f. Penetapan RKPd.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPd Kabupaten Samosir Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2023;

1.3. Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dilakukan dengan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: (1). Teknokratik; (2). Partisipatif; (3). Politis; dan (4). Atas bawah dan bawah atas.

1.3.1 Persiapan Penyusunan

Pada tahapan persiapan penyusunan, terdapat 4 langkah yang dilakukan, yaitu: Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi, Penyusunan Agenda, Data dan Informasi

1.3.2 Tahapan Penyusunan Rancangan Awal

Setelah tahapan persiapan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005 - 2025, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, RKP Tahun 2023, program strategis nasional, dan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023*.

1.3.3 Penyusunan Rancangan RKP

Langkah selanjutnya untuk menyusun RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah penyusunan rancangan RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang dijelaskan pada gambar berikut :



1.3.4 Pelaksanaan Musrenbang RKP

Setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota disetujui, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan musrenbang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023. Pelaksanaan musrenbang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 terdiri atas Musrenbang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 dan Musrenbang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, yaitu Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangurusan, Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Ronggumihuta, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.

1.3.5 Perumusan Rancangan Akhir

Langkah selanjutnya adalah perumusan rancangan akhir RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023.

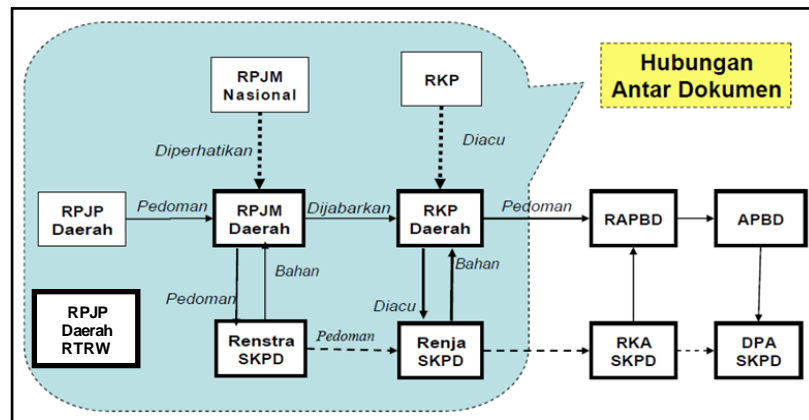
1.3.6 Penetapan RKP

Langkah terakhir adalah penetapan RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023 dimana rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan dari hasil Fasilitasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022, disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Kemudian Bupati Samosir menetapkan Peraturan Bupati tentang RKP Kabupaten Samosir Tahun 2023.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKP. Masing-masing dokumen tersebut merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen RKP; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu koridor/benang merah yang saling terkait.

Selanjutnya, RKP menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Samosir. Keterkaitan dokumen RKP dengan dokumen lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; serta (v) SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional. Delapan agenda Prioritas Nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 yaitu:

 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 8. Pembangunan Ibukota Nusantara

Selain 8 agenda Prioritas Nasional, fokus pembangunan Nasional diarahkan pada:

 - a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
 - b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
- b. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RKPD Provinsi Sumatera utara

Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037. Proses penyusunan



RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Prioritas pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan
2. Prioritas Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
3. Prioritas Peningkatan kesempatan Kerja dan berusaha melalui Penyediaan lapangan pekerjaan
4. Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor agraris
5. Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor pariwisata
6. Prioritas peningkatan Kualitas reformasi Birokrasi
7. Peningkatan sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. Prioritas pembangunan Infrastruktur yang baik Dan berwawasan Lingkungan

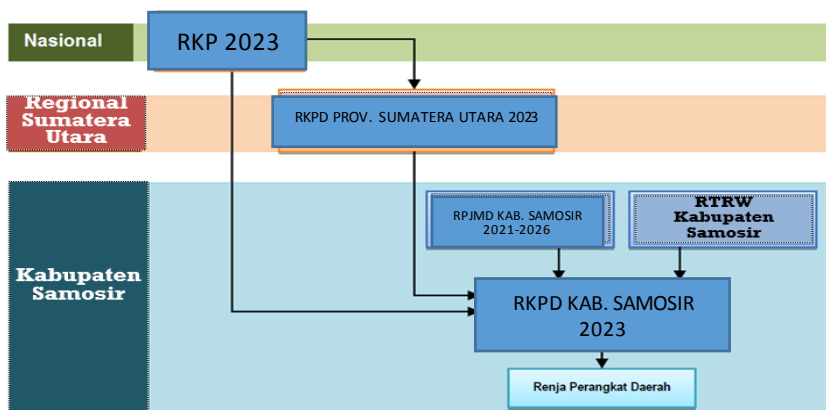
Adapun Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara - Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, bahwa Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara yang perlu mendapat dukungan yang akan disusun ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023.

c. Hubungan RKPD Kabupaten Samosir dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 1.3 Hubungan RKP Kabupaten Samsir 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

- d. Hubungan RKP Kabupaten Samsir dengan RTRW Kabupaten Samsir
 Penyusunan RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023 berpedoman pada RTRW Kabupaten Samsir, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samsir.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

- e. Hubungan RKP Kabupaten Samsir dengan Renja Perangkat Daerah
 Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKP Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKP. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKP.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Samsir yang dituangkan dalam RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Samsir. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun dokumen RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Samsir memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023, merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKP Kabupaten Samsir Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 -2024 dan Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.



Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Disamping itu, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Disamping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir serta bagi pemangku kepentingan agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam Renja Tahun 2023
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Samosir Tahun 2023
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Samosir
6. Sebagai instrumen evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RABD.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023

Bagian ini menjelaskan Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kabupaten Samosir.

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Menjelaskan tentang Arah Pembangunan Kabupaten Samosir mengacu kepada Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.



4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Samosir.

4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN Republik Indonesia.

4.4 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir Dengan SDGS

4.6 Pembangunan Inovasi Daerah

BAB V RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2023. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2023, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VII PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah sebesar 2.069,05 km², terdiri dari 1.444,25 km² daratan atau sebesar 69,80% dan wilayah danau 624,80 km² atau sebesar 30,20%.

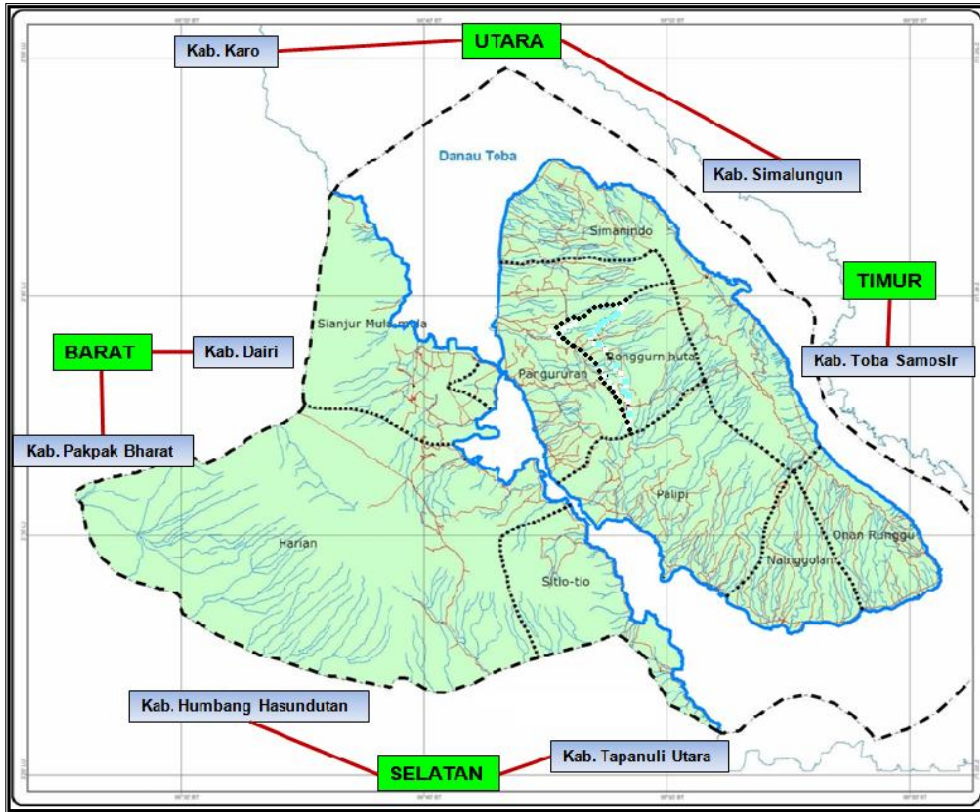
Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wil. (Km ²)	% Luas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sianjur Mula-mula	12	-	140,20	9,71
2	Harian	13	-	560,45	38,81
3	Sitio-tio	8	-	50,76	3,51
4	Onan Runggu	12	-	60,89	4,22
5	Nainggolan	13	2	87,86	6,08
6	Palipi	17	-	129,55	8,97
7	Ronggur Nihuta	8	-	94,87	6,57
8	Pangururan	25	3	121,43	8,41
9	Simanindo	20	1	198,20	13,72
Jumlah		128	6	1.444,25	100

Sumber : SIPD, 2021

Kabupaten Samosir beribukota di Pargururan. Kabupaten ini terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Kecamatan Harian adalah wilayah terluas mencapai 38,81% dari luas keseluruhan. Sebagian kecamatan berada di wilayah Danau Toba.

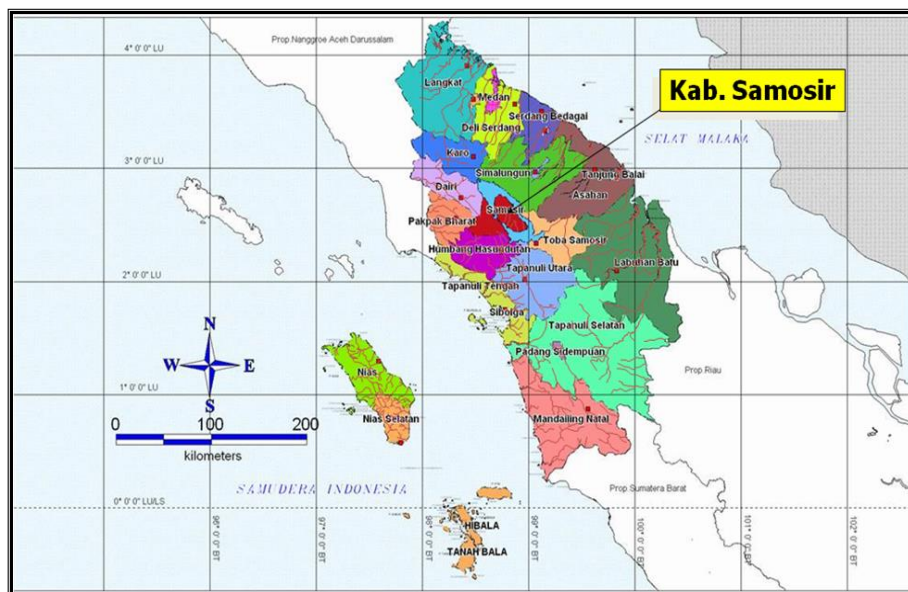


Gambar 2.1: Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021

Kabupaten Samosir berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi dan Pakpak Barat. Batas-batas administrasi Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat



Gambar 2.2 Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2021

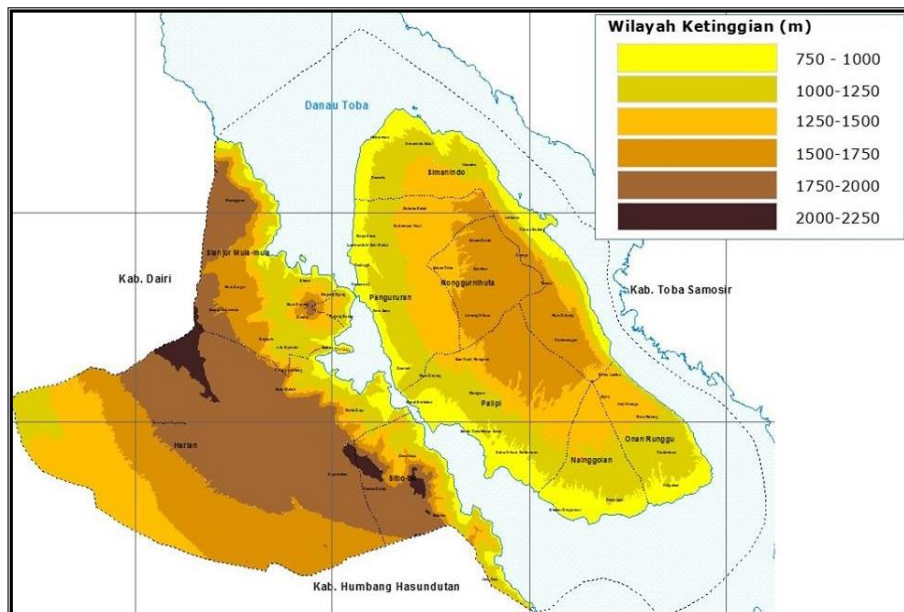


b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Samosir terdiri dari Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba dan sebagian wilayah daratan di Pulau Sumatera. Secara geografis terletak di sebelah utara garis khatulistiwa diantara 98°24'00" dan 99°01'48" Bujur Timur dan antara 2°21'38" dan 02°49'485" Lintang Utara.

c. Topografi

Kabupaten Samosir berada di ketinggian 904 – 2.157 m di atas permukaan laut (dpl) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Samosir
 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021

Kabupaten Samosir terletak pada bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan berada di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang, dengan posisi tersebut, wilayah Toba merupakan daerah pengaman bagi kabupaten lainnya karena wilayah ini merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir ke Wilayah Timur Sumatera Utara.

Komposisi tanah didominasi jenis tanah Tufo Toba, pasir tercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian. Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu; datar (± 10 persen), landai (± 20 persen), Miring (± 55 persen) dan terjal (± 15 persen) struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

Tabel 2.2
 Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samosir

No	Ketinggian	%-Luas
[1]	[2]	[3]
1	904 m s / d 1.000 m dpl	± 10 %
2	1.000 m s / d 1.500 m dp	± 25 %
3	> 1.500 m dpl	± 65 %

Sumber: RTRW Kab. Samosir dan www.pemkabsamosir.go.id



Topografi dan kontur tanah di Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan bergelombang, dengan komposisi kemiringan seperti tertera pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samosir

No	Kemiringan Lahan	Klasifikasi	%-Luas
1	0 – 20	Datar	± 10 %
2	2 – 150	Landai	± 20 %
3	15 – 400	Miring	± 55 %
4	> 400	Terjal	± 15 %

Sumber data: www.pemkabsamosir.go.id

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dengan menggunakan citra spot 5 tahun 2005 diketahui pola tutupan lahan Kabupaten Samosir pada tahun 2006 masih didominasi oleh vegetasi hutan, yaitu sekitar 49% dari total wilayah kabupaten. Namun di lain pihak vegetasi rumput dan tanah terbuka juga cukup dominan, yaitu sekitar 27%. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Samosir masih dominan bersifat alamiah. Untuk lebih jelas tentang kondisi topografi Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Gambar 2.3 di atas.

d. Geologi

Berdasarkan hasil analisis geologi tata lingkungan diketahui bahwa batuan yang tersusun di Kabupaten Samosir umumnya didominasi oleh material letusan gunung api yang sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak sekali dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang menggali jenis batuan sirtu serta mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo.

Kabupaten Samosir mempunyai tingkat kekuatan gempa yang berkisar antara skala V hingga VIII (skala MMI) dimana zona tertinggi terletak pada jalur patahan regional Sumatera (Semangko). Kisaran kekuatan gempa tersebut dapat dilihat pada keterangan berikut:

1. Skala V - VI, tersebar merata di wilayah Kabupaten;
2. Skala VI - VII, hanya terisolir di daerah Dolok Nabarat - Aritonang - Siborong-borong - Aek Nauli hingga Dolok Sanggul;
3. Skala VII - VIII, tersebar pada bagian dalam zona VI - VII yang tersebar di daerah Parmiahan-Lumban Pancur-Pagaran.

Beberapa peristiwa gempa yang terjadi Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Banyaknya Gempa Bumi yang Dirasakan di Kabupaten Samosir 2013-2020

Bulan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Januari	1	1	0	0	1	0	0	0
Februari	1	1	0	0	2	1	0	0
Maret	0	1	0	0	1	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	1	1	0	1	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	1	0



Bulan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Juli	12	0	0	0	1	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	1	0	0	3	0	0	0	0
Oktober	0	0	1	0	0	0	0	0
Nopember	0	0	1	13	4	0	0	0
Desember	0	0	0	2	1	0	0	0
Total	15	4	3	18	11	1	1	0

Sumber: SIPD, 2021

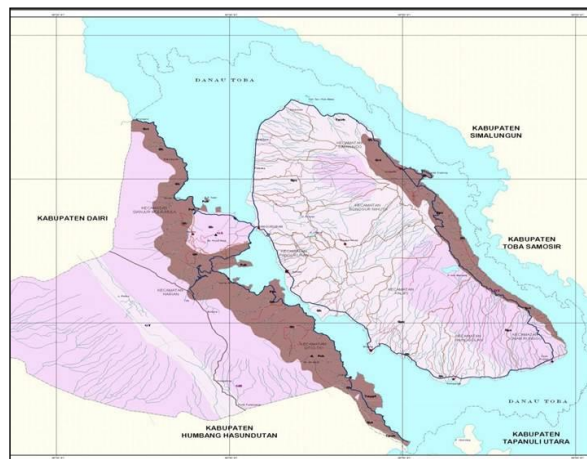
Sedangkan daerah patahan memiliki zona-zona percepatan yang berbeda-beda, yang terdiri dari:

1. Zona A = 0,20 - 0,25g, tersebar di bagian Utara Kabupaten Samosir (Dolok Sibutan - Dolok Suara - Dolok Sigaung-gaung);
2. Zona B = 0,25 - 0,30g, tersebar di bagian tengah Danau Toba (sisi tebing utara dan Selatan)
3. Zona C = 0,30 - 0,35g, tersebar di bagian tengah Patahan Semangko, mulai dari tepi tebing. Selatan Danau Toba hingga bagian Selatan Pardomuan - Sihabong-habong - Pusu

Fenomena gerakan tanah sendiri ditemukan dalam berbagai jenis gerakan, seperti:

1. G1 = Gelinciran, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, hanya terdapat pada batuan Tmppt yang kedudukannya searah lembah;
2. G2 = Runtuhan, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, terdapat pada batuan Qvt, Qvs, TMPPT, Pub, Tmvh, Puk. Dikontrol juga oleh patahan yang banyak terdapat pada bagian tersebut (umumnya berarah U 300 - 330°T) dan patahan lain yang memotongnya sehingga mempermudah gerakan tanah. Begitu pula dengan adanya sesar atau retakan yang biasanya akan memotong patahan besar ini dan menghasilkan bongkah-bongkah batuan yang mudah runtuh/meluncur;
3. G3 = Longsoran, hanya terdapat pada unit batuan Qvt dan Qvs. Tanpa adanya kontrol bidang perlapisan maupun patahan/sesar/retakan, umumnya terjadi pada zona pelapukan batuan yang dipicu oleh kadar air yang terus meningkat (jenuh air tanah).

Walaupun Kabupaten Samosir tidak memiliki gunung api aktif (Tipe A/B/C) namun tetap memiliki potensi terkena sebaran abu letusan Gunung Sinabung dan Helatobi yang menuju ke arah Kabupaten Samosir. Selain itu Gunung Pusuk Buhit juga masih berpotensi untuk dapat aktif, sehingga daerah di sekitarnya dapat dikatakan juga sebagai daerah rawan bencana. Ini berarti perlu dilakukan mitigasi plan atau rencana jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2. 4 Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021



Kabupaten Samsir memiliki berbagai potensi sumber daya geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Pulau Samsir merupakan bagian dari Kaldera Toba yang memperlihatkan sekuen geologi yang fenomenal terutama yang berkaitan dengan jejak-jejak terjadinya erupsi kaldera "*supervolcano*", terbentuknya Kaldera Toba, terbongkarnya batuan dasar dan proses terbentuknya Pulau Samsir.

e. Hidrologi

Sub DAS Kabupaten Samsir termasuk kedalam DAS Asahan Toba. Adapun DAS Asahan Toba terdiri dari 66 (enam puluh enam) sub DAS yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kecamatan. SUB DAS terluas yaitu SUB DAS Kuasan dengan ukuran 21.372,52 ha di Kabupaten Asahan, sub DAS yang tersempit berada di wilayah Kabupaten Samsir yaitu sub DAS Arum dengan ukuran 13.481,16 ha. Dari 66 sub DAS tersebut yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Samsir adalah sebanyak 13 (tiga belas) sub DAS yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) di wilayah Kabupaten Samsir

No	Nama Sub DAS	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Sijama-jama	Onanrunggu	6.741,50
2.	Binanga Bolon	Onanrunggu	5.557,28
3.	Guluan	Pangururan	10.133,19
4.	Silabung	Simanindo	5.822,76
5.	Simala	Onanrunggu	5.247,19
6.	Simaratuang	Pangururan	8,710,75
7.	Ringgo	Sianjurmulamula	6.396,17
8.	Bodang	Harian	9.221,49
9.	Sitiung-tiung	Onanrunggu	4.532,05
10.	Arun	Pangururan	0,117
11.	Parembakan	Harian	7.892,91

Sumber : Laporan KLHS Kab. Samsir 2021-2026

f. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Samsir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17⁰C-29⁰C dan rata-rata kelembaban udara 85%.

Berdasarkan lokasi pengamatan, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Nopember yaitu sebesar 395,5 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu sebesar 20,7 mm. Untuk Jumlah hari Hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember yaitu sebanyak 25



Hari dan terendah pada bulan Februari yaitu sebanyak 2 hari. Untuk Rata-rata Harian penyinaran matahari terbanyak pada bulan Februari yaitu sebanyak 55,2 persen dan yang terendah pada bulan Januari yaitu sebanyak 18,7 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.6

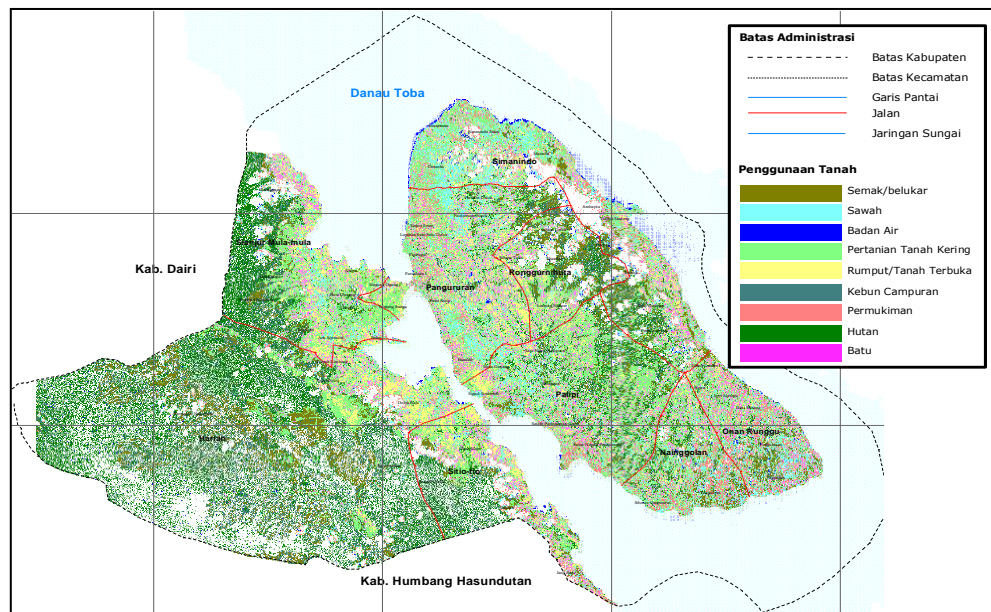
Curah Hujan (Ch), Hari Hujan (Hh) dan Rata-Rata Penyinaran Matahari Di Kabupaten Samosir Tahun 2021

PENGAMATAN UNSUR IKLIM			
BULAN	JUMLAH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (hari)	RATA-RATA HARIAN Penyinaran Matahari (persen)
Januari	347,7	17,0	18,7
Februari	20,7	2,0	55,2
Maret	38,9	10,0	44,3
April	73,9	15,0	34,0
Mei	72,7	10,0	37,3
Juni	205,6	18,0	38,1
Juli	189,3	12,0	44,8
Agustus	345,9	16,0	33,0
September	330,7	18,0	38,7
Oktober	316,6	12,0	46,2
Nopember	395,5	25,0	33,2
Desember	205,9	15,0	29,5

Sumber data: BPS Kabupaten Samosir, 2022

g. Potensi dan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Samosir antara lain terdiri dari : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.



Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir, 2021



2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rancangan struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain serta dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Samosir merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (Sub PKLp), dan Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
3. Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya dan beberapa desa diluar kecamatannya.
4. Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya saja.

RTRW Kabupaten Samosir mengatur bahwa PKWp ditetapkan di Kecamatan Pangururan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan daerah pelayanannya seluruh wilayah Kabupaten Samosir. PKLp ditetapkan di Tele, dengan daerah pelayanan Kecamatan Harian, Silitio, Sianjur Mula-Mula, kecamatan di Kabupaten Humbang Hasudutan, Pakpak Bharat, dan Dairi yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Onan Runggu, dengan daerah pelayanan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu dan Toba yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Simanindo Sangkal, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, sebagian Kecamatan Ronggur NiHuta, dan kecamatan di Kabupaten Karo dan Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; dan Tomok, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, Ronggur ni Huta, Onan Runggu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Simalungun. Sedangkan, Sub PKLp ditetapkan di Parbaba, Rianiate, Nainggolan, Mogang, dan Ambarita. Sedangkan PKK ditetapkan di Ronggur ni Huta, Sabulan, Harian Boho, dan Sagala.

Sesuai dengan penetapan kebijakan mengenai ibukota Kabupaten Samosir dan lokasi strategis beberapa desa sehingga mampu melayani beberapa wilayah sekitarnya, maka ditentukan hierarki pusat pelayanan yaitu Kecamatan Pangururan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

Kecamatan Pangururan sebagai PKWp, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga melayani kebutuhan dari desa sekitar yaitu Desa Ginolat, Desa Turpuk Sihotang, Desa Sabulan, Desa Pallobuan dan Desa Ronggur Nihuta. Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi mendapatkan *trickle down effect*, namun pergerakan dari dan ke Desa Sabulan dan Desa Pallobuan saat ini masih harus diarahkan melalui transportasi danau/perairan karena jaringan jalan darat yang tersedia rusak.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar Kabupaten Samosir di bagian Utara/Tigaras, dapat diarahkan untuk melalui Desa



Simanindo Sangkal melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangurusan dan dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Simanindo Sangkal dan Tigras. Kedudukan Pangurusan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangurusan juga dapat melakukan interaksi dengan Parapat di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangurusan ke bagian Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusuk Buhit dengan jaringan jalan Propinsi/Tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Provinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memposisikan kecamatan Pangurusan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya pertanian, dan budidaya non pertanian. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Kabupaten Samosir terdiri dari:

1. Pertanian Tanaman Pangan

Terdiri dari Pertanian Lahan Kering dan Lahan basah. Budidaya pertanian tanaman pangan diarahkan pada peningkatan nilai tambah hasil tani yang memerlukan pengolahan khusus sehingga komoditas yang dihasilkan memiliki harga jual lebih tinggi. Hampir seluruh kecamatan memiliki alokasi lahan untuk pertanian ini dengan total keseluruhan adalah 16.576 ha.

2. Perkebunan

Pengembangan perkebunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan produksi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan wilayah *hinterland*. Produksi kopi, cengkeh, vanili dan kemiri merupakan komoditas utama yang dapat dikembangkan dari sektor perkebunan ini. Luas kawasan perkebunan dapat ditingkatkan dengan mengalihfungsikan kawasan bekas hutan, pertanian lahan kering atau tanah-tanah terlantar, dan direncanakan pengembangannya seluas 25.194 ha.

3. Peternakan

Sektor peternakan diarahkan untuk pengembangan 4 (empat) jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan, yaitu kerbau, babi, kambing, kuda dan sapi. Diharapkan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan peternakan diarahkan di Kecamatan yang cukup memiliki lahan rumput yang terbuka dan di lahan datar dan sumber air yang memadai. Oleh karena itu peternakan dapat dikembangkan di hampir semua kecamatan, dengan rencana peruntukan untuk kawasan peternakan ini dicadangkan seluas 1.322 ha.

4. Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan terutama diarahkan untuk peningkatan teknologi penangkapan perikanan umum dan peningkatan serta pengelolaan produksi yang baik terhadap jenis budidaya perikanan darat. Sementara Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata nasional untuk dikembangkan pemerintah pusat, telah disepakati bersama 7 (tujuh)/zero KJA di perairan Danau Toba. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir yang disertai rencana-rencana aksi penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir.



5. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan kawasan produksi pertanian secara makro yang didesain dari awal untuk mengakomodasi kegiatan penanaman sampai kepada kepada jalur distribusin di kawasan tersebut. Alokasi lahan untuk kawasan agropolitan ini ditempatkan di Kecamatan Harian dengan luas sekitar 2.982 ha.

b. Kawasan Peruntukan Kehutanan

Rencana Pola Ruang untuk Kawasan budidaya kehutanan terdiri dari kawasan hutan produksi dan *agroforest*. Detail mengenai fokus pengembangan Kawasan Peruntukan Kehutanan di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut.

1. Hutan Produksi, yaitu kawasan budidaya kehutanan (KBK) pada Kabupaten Samosir adalah hutan produksi. Kawasan hutan produksi hanya terdapat di wilayah daratan, yaitu pada kawasan Hutagalung di kecamatan Harian seluas 33.950 ha. Kawasan hutan produksi ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberi izin penebangan oleh pemerintah.
2. Kawasan *Agroforest*, yaitu kawasan yang didesain untuk mengakomodasi kawasan peralihan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, oleh karena itu perlu ditetapkan kawasan penyangga yang berfungsi untuk menjaga fungsi hutan, namun dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat untuk berusaha untuk penghidupannya. *Agroforest* adalah kawasan hutan yang dapat ditanami dengan tanaman produksi dengan tanpa menghilangkan fungsi hutannya. Penggunaan lahan hutan rakyat dapat diakomodir di lahan kawasan *agroforest* ini. Kawasan *Agroforest* direncanakan seluas 10.072 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata diarahkan pada peruntukan kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan Wisata Unggulan tersebut terdiri dari: kawasan Wisata Tomok-Tuktuk, Kawasan Wisata Aek Rangat, Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula, Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit, Kawasan Wisata Lagundi dan Sukkean, Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang. Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah *Tano Ponggol*, Pantai Pasir Putih Parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak Hosa, wisata budaya huta Sidabutar dan *old batak village* di Simanindo, wisata Piso Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Pangurusan, wisata budaya di Sitio-tio, dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Rencana peruntukan lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan dengan melakukan kajian terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-fasilitas wisata, serta atraksi wisata yang diminati. Semua aspek tersebut, umumnya dikaji dalam produk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun dalam arahan pemanfaatan ruangnya, obyek dan kawasan wisata tersebut di atas sudah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan budidaya non pertanian.

Kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Pada kawasan tersebut terdapat berbagai benda peninggalan kuno yang memiliki nilai budaya tinggi sehingga perlu dilestarikan. Kekhususan dan keistimewaan lokasi dan benda tersebut, menarik minat wisatawan untuk melihat dan berkunjung. Beberapa lokasi yang dapat diusulkan sebagai kawasan konservasi budaya dan sejarah adalah Makam Raja Sidabutar di Tomok, Makam Raja Lotung di Sitio-tio, Makam Pisosomalim di Palipi, Makam Raja Simarmata di Pangurusan dan lokasi yang dipercaya sebagai asal muasal Suku Bangsa Batak, yakni Pusuk Buhit di Sianjur Mula-



mula. Di Sianjur Mula-mula tempat yang wisata yang dikonservasi adalah kawasan di sekitar lokasi yang dibangun.

Tabel 2. 7
Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samsir

No	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah	Keterangan
1	Makam Raja Sidabutar di Tomok	Pengembangan kawasan dengan perbaikan fasilitas pendukung, seperti ruang jual souvenir khas Tomok dan pemeliharaan kawasan agar tidak merubah nuansa makam yang telah ada
2	Makam Raja Lontung di Sitio-tio	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
3	Makam Pisosomalim di Palipi	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
4	Makam Raja Simarmata di Pangururan	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
5	Pusuk Buhit di Sianjur Mula-mula	Pemeliharaan kawasan tanpa membangun sesuatu di bagian puncak Pusuk Buhit, serta perbaikan pada bangunan-bangunan adat tanpa merubah bagian aslinya. Untuk lebih menarik wisatawan, dapat pula ditambah dengan fasilitas penunjang, seperti ruang jual souvenir khas Sianjur Mula-mula

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Samsir, 2020

Kegiatan konservasi budaya dan sejarah dalam pengembangannya dapat diarahkan sebagai kawasan wisata sejarah, namun arahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan fungsi, prasarana dan sarana di Sianjur Mula-mula. Sebagai lokasi awal berkembangnya Suku Bangsa Batak, Sianjur Mula-mula belum cukup memberikan informasi maupun 'kesan' yang kuat. Karena itu daerah yang dipercayai sebagai asal mula Suku Bangsa Batak harus ditata sehingga memberi makna mendalam bagi penerus Suku Bangsa ini.

d. Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yaitu 1) hutan lindung dan kawasan konservasi serta resapan air yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 2) kawasan jalur hijau (sempadan sungai, sempa dan sungai danau) yang berfungsi perlindungan setempat; 3) kawasan rawan bencana, yang terdiri dari kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan rawan tanah longsor; 4) kawasan konservasi air baku, yang berfungsi untuk mengamankan gangguan aktivitas manusia terhadap perairan memiliki potensi sebagai sumber air baku; 5) kawasan cagar budaya, yang berfungsi untuk melindungi asset-aset alamiah maupun buatan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi; dan 6) kawasan lindung lainnya, yang memiliki kerentanan fisik, seperti tanah berbatu, lahan kritis di kelerengan terjal, dan lainnya.



Tabel 2.8
Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung (dalam ha)*

Kawasan Lindung	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Simanindo	Pangururan	Ronggur Nihuta	Palipi	Nainggolan	Onan-runggu
Hutan Lindung	7.243,32	9.669,59	468.605,00	4.651,78	17,27	4.584,33	4.068,48	-	-
Cagar Budaya	491,56	45,56	19,92	-	232,28	-	-	-	-
Kawasan Lahan Kritis	-	-	-	-	22,30	-	-	-	-
Kawasan Resapan Air	-	469,99	-	42,98	-	59,79	21,47	778,83	12,55
Lindung	28,54	4.634,32	4.345,52	8,90	-	-	-	-	1.270,65
Kawasan Mata Air Panas	-	-	-	-	26,78	-	7,59	-	-
Hutan Kota	-	-	-	-	207,98	2,23	-	-	-
Konservasi Air Baku	86,27	-	-	-	-	-	-	-	65,95
TOTAL	7.849,68	14.819,46	4.834,05	4.703,65	534,03	4.646,34	4.105,13	778,83	1.348,54

* tidak termasuk kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan letusan gunung api

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Samosir diprioritaskan pada penggunaan lahan hutan lindung. Hampir semua kecamatan menjadi fokus dalam upaya tersebut terutama di Kecamatan Sitiotio dengan luas wilayah potensial mencapai 468,605 ha. Sementara itu, fokus penggunaan lahan cagar budaya, kawasan resapan air dan lindung menjadi prioritas selanjutnya yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2.9
Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau (dalam ha)

Kawasan Jalur Hijau	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Simanindo	Pangururan	Ronggur Nihuta	Palipi	Nainggolan	Onan-runggu
Sempadan Sungai	-	-	-	119,132	385,903	451,814	586,65	426,756	28,197
Sempadan Danau	168,841	107,008	147,066	292,619	161,81	-	111.919	70,419	121,879
TOTAL	168,841	107,008	147,066	951,751	547,719	451,814	698,569	497,175	150,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

Secara umum, penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, pencegahan longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau terhadap kawasan sekitarnya. Variabel-variabel pembentuk kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- Hutan, baik hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan tanaman industri yang telah ada berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku tetap dipertahankan keberadaannya.



- Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan *City Ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan antara lain adalah tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Tujuan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Sempadan Danau (kawasan sekitar danau) adalah kawasan sepanjang tepi danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Di sepanjang tepi danau ini juga ditanami tanaman yang sifatnya memberikan perlindungan pada tepian danau sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman yang dibudidayakan di sepanjang jalur hijau ini adalah tanaman keras yang dapat melindungi sekaligus dapat diambil manfaatnya oleh penduduk seperti tanaman buah-buahan (mangga, nangka, durian, rambutan) atau tanaman perkebunan (kopi). Tujuan perlindungan sempadan danau di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan fungsi sungai sebagai wilayah *catchment area* dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kawasan rawan tanah longsor adalah areal yang diidentifikasi rawan gerakan tanah karena kondisi geologi yang labil, wilayah ini diarahkan untuk mendapatkan perlakuan khusus sehingga potensi longsor dapat diminimalisasi, sementara itu pada beberapa wilayah yang secara alami telah memiliki potensi gerakan yang tinggi diarahkan untuk tidak dikembangkan bagi kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan longsor ini juga ditanami tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- Kawasan rawan gempa bumi adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap gempa karena kawasannya dilewati oleh sesar/patahan sehingga berdasarkan siklus gejala alam dapat diprediksi pada wilayah ini suatu saat akan terjadi gempa bumi, untuk itu pada wilayah ini diarahkan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan budidaya, melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- Kawasan rawan gunung api adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap bencana gunung api karena berada pada barisan gunung api vulkanik/tektonik, potensi wilayah ini terhadap bencana sama halnya dengan kawasan rawan gempa bumi. Di kawasan ini, tidak diijinkan pembangunan kegiatan budidaya kecuali penanaman tanaman keras yang berfungsi untuk mengurangi dampak gunung api, berupa debu dan abu.

e. Kawasan Pemukiman

Kawasan Pemukiman, merupakan kawasan hunian dan segala fasilitas-fasilitas jasa perdagangan, umum, dan sosial yang mendukung kegiatan bermukim tersebut. Kawasan pemukiman tersebar dalam komunitas desa yang terdiri dari kumpulan komunitas marga. Sebagian besar pemukiman yang ada masih bersifat pemukiman ulayat/adat sehingga



keberadaannya tidak membahayakan bagi keberlangsungan lingkungan. Namun pada lokasi pusat pertumbuhan umumnya sudah didominasi oleh permukiman bersifat perkotaan.

Jika dilihat dari arah perkembangan Kabupaten Samosir yang bertujuan membuka pusat pertumbuhan di beberapa lokasi/bagian di pesisir danau, maka sesuai dengan pembatasan kawasan lindung penetapan wilayah permukiman dilakukandi sepanjang pesisir danau dengan memperhatikan arahan batasan sempadan danau. Selain itu, sesuai dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang memotong bagian Barat dan Timur wilayah pulau maka alokasi permukiman dapat diarahkan di sepanjang koridor jaringan jalan dengan jumlah yang terbatas mengingat bagian tengah merupakan kawasan lindung.

Untuk melayani kebutuhan perumahan di masa depan, maka ditetapkan beberapa usulan, yaitu:

1. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan ke bagian Barat dan Timur terutama pada akses jalan yang sudah dirintis perumahan sebelumnya, dan pada wilayah dengan jaringan jalan baru kelak;
2. Mengembangkan permukiman pada wilayah pesisir Danau dan mengurangi prioritas pada bagian tengah wilayah Pulau. Sementara itu, wilayah daratan akan diarahkan pada bagian Timur yaitu pesisir Danau dan tepi Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara;
3. Mengembangkan pemukiman sesuai dengan karakteristik ulayat/adat karena dengan demikian dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Berbagai keunikan suku Batak, dalam memilih dan menentukan permukimannya berdasarkan kehidupan sosial, karakter fisik wilayah maupun sarana dan prasarana kota yang tersedia, dapat menjadi suatu kekhasan wilayah yang dapat diangkat sebagai atraksi sosial budaya masyarakat yang dapat diintegrasikan dalam konsep ecotourism yang saat ini digalakkan oleh Kabupaten Samosir.

Berdasarkan karakteristiknya, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman terbagi menjadi dua, yaitu kawasan permukiman perkotaan seluas 1.370 ha, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pangururan 59,1% atau sekitar 820 ha. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan dialokasikan sebesar 3.447 ha dengan persebaran yang merata di seluruh kecamatan. Dalam mengatur peruntukan lahan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang (RDTR), terutama untuk mengatur blok-blok bangunan, kepadatan bangunan (KDB), ketinggian bangunan (KLB).

3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Samosir terdiri dari kawasan rawan tanah longsor dan gempa. Luasan wilayah kecamatan yang berpotensi mengalami bencana di Kabupaten Samosir adalah seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.10

Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir (dalam Ha)

No.	Kecamatan	Runtuhan (Ha)	Gelincir (Ha)	Longsor (Ha)	Gempa (Ha)
1.	Simanindo	3,865.060	9.667,391	2.059,222	-
2.	Pangururan	81,247	1.737,822	1.561,648	-
3.	Ronggurnihuta	1,758	2.679,360	876,247	-
4.	Palipi	-	4.878,989	3.264,973	-



No.	Kecamatan	Runtuhan (Ha)	Gelincir (Ha)	Longsor (Ha)	Gempa (Ha)
5.	Harian	5.168,084	5.768,557	41.763,049	1.771,823
6.	Onan Rungu	1.262,724	-	3.712,059	-
7.	Nanggolan	-	2.845,013	2.684,654	-
8.	Sitio-tio	1.925,243	-	1.596,99	1.600,468
9.	Sianjur Mula-mula	6.405,748	-	5.101,552	-
TOTAL		21.577,132	21.577,132	61.620,394	3.372,291

Sumber : RPJPD Kab. Samosir 2005-2025

Sebagian wilayah kabupaten berpotensi terjadi gempa bumi. Kecamatan Harian dan Sitio-tio merupakan dua wilayah yang cukup rawan terjadi gempa bumi. Akan tetapi, wilayah lain berpotensi terdampak karena bencana gempa bumi seringkali memiliki jangkauan teritori yang luas. Adanya wilayah/kawasan yang rawan bencana longsor diakibatkan oleh kondisi topografi tanah yang berbukit dan struktur tanah liat berpasir. Luas wilayah rawan longsor tersebar di semua kecamatan. Sementara itu, potensi runtuh dan gelincir tersebar hampir di seluruh kecamatan.

4. Kondisi Demografi Daerah

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah kependudukan, mencakup jumlah pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitas manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitas manusianya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2021 adalah sebanyak 137.696 jiwa, terdiri dari 68.604 penduduk laki-laki (49,82 persen) dan 69.092 penduduk perempuan (50,18 persen), dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,29 dan angka kepadatan penduduk mencapai 95,34 jiwa/km². Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Pangururan, yaitu 34.607 jiwa (25,13 persen), sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sitiotio yaitu 8.219 jiwa (5,97 persen)

Terkonsentrasinya penduduk di beberapa titik bisa menunjukkan terkonsentrasinya pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pembangunan ekonomi tidak merata. Disamping itu, konsentrasi penduduk di titik tertentu juga bisa disebabkan oleh kurang menyebarnya pusat-pusat pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta bidang-bidang lainnya. Ketimpangan dan ketidakmerataan sebaran penduduk tersebut terjadi karena variasi luas antar daerah yang diukur dengan kepadatan penduduk sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
1.	Sianjur Mula-mula	140,24	10.070	71.81
2.	Harian	560,45	9.467	16.889
3.	Sitiotio	50,76	8.219	16.192
4.	Onan Runggu	60,89	11.190	183.77
5.	Nainggolan	87,86	12.997	147.70
6.	Palipi	129,55	18.372	141.81
7.	Ronggur Nihuta	94,87	9.755	132.82
8.	Pangururan	121,43	34.607	285.00
9.	Simanindo	198,20	23.039	166.24
	2021	1.444,25	137 696	95.34
	2020	1.444,25	136.441	94,47
	2019	1.444,25	139.958	96,91
	2018	1.444,25	143.944	99,67
	2017	1.444,25	144.096	99,78

Sumber : BPS (Samosir Dalam Angka 2022)

Kabupaten Samosir mempunyai luas daratan 1.444,25 Km² dengan kepadatan penduduk tahun 2021 mencapai 95,34 jiwa per Km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Harian dengan kepadatan penduduknya hanya 16,88 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Sitiotio dengan kepadatan penduduknya sebesar 16.192 jiwa per Km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 285,00 jiwa per Km², hal ini dimungkinkan mengingat Kecamatan Pangururan merupakan Ibu Kota Kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan serta tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya lebih memadai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh pola migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut dan sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Data penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk Perempuan, dengan perbandingan setiap 98,66 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk Perempuan.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sianjur Mula-mula	5.011	4.992	10.003	100,38
2	Harian	4.647	4.750	9.393	97,83
3	Sitio-tio	4.117	4.055	8.172	101,53



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Onan Runggu	5.485	5.637	11.122	97,30
5	Nainggolan	6.382	6.489	12.871	98,35
6	Palipi	9.050	9.159	18.209	98,81
7	Ronggur Nihuta	4.811	4.881	9.692	98,57
8	Pangururan	17.164	17.045	34.209	100,70
9	Simanindo	11.290	11.476	22.766	98,38
	Tahun 2021	70.512	71.470	141.982	98,66
	Tahun 2020	67.957	68.484	136.441	99,23
	Tahun 2019	69.745	70.213	139.958	99,33
	Tahun 2018	72.210	71.734	143.944	100,66
	Tahun 2017	72.185	71.911	144.096	100,38
	Tahun 2016	73.323	73.266	146.589	100,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 2022

5. Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir

Kawasan Strategis di Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu :

- Kawasan Perkotaan Pangururan.

Wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten Samosir, baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten. Wilayah Perkotaan ini ditetapkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan ini merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

Kecamatan Pangururan sebagai PKL, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga melayani kebutuhan dari Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi *mendapatkan trickling down effect*, namun pergerakan dari dan ke Desa Sabulan dan Desa Mogang saat ini masih harus diarahkan melalui transportasi danau/perairan karena jaringan jalan darat yang tersedia saat ini belum dimungkinkan untuk dilalui.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar Kabupaten Samosir di bagian Utara/Kecamatan Tigaras (Kabupaten Simalungun), dapat diarahkan untuk melalui Desa Sakal Simanindo melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangururan dan dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Sakal Simanindo dan Kecamatan Tigaras (Kabupaten Simalungun). Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat melakukan interaksi dengan Kecamatan Prapat (Kabupaten Simalungun) di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangururan ke bagian



Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusut Buhit dengan jaringan jalan nasional/tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Propinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memposisikan kecamatan Pangururan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

- Kawasan Agropolitan Harian

Posisi Kabupaten Samosir di antara kabupaten lain di Sumatera Utara berada tepat di bagian tengah, dengan pusatnya adalah Pulau Samosir. Provinsi Sumatera Utara mencanangkan kebijakan agropolitan bagi beberapa kabupaten yang ada di wilayahnya, antara lain Kabupaten Samosir. Sebagai pusat agropolitan, Kecamatan Harian yang berada di daratan Pulau Sumatera merupakan kawasan andalan pertaniannya. Kegiatan untuk mendukung program ini berupa :

- a. Penyusunan Rencana Teknis berupa : Penyusunan rencana rinci kawasan strategis agropolitan, Penyusunan DED, Penyusunan Business Plan
- b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan berupa : Peningkatan Jalan Poros Kawasan Agropolitan, dan Penyediaan Air Bersih untuk Pertanian di Kawasan Agropolitan
- c. Pelaksanaan pembangunan dan
- d. Pengawasan

b. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah Kabupaten Samosir, antara lain :

- Kawasan Pusat Cagar Budaya Pusuk Buhit

Kabupaten Samosir dalam konteks sosial budaya merupakan salah satu pintu gerbang menuju daerah asal muasal suku bangsa batak, yaitu di Kawasan Pusuk Buhit, Kecamatan Sianjur Mula-mula. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten ini merupakan Pusat Orientasi Budaya Batak. Hal ini berimplikasi pada terjadinya pola kunjungan periodik orang-orang batak yang merantau ke tempat keluarga pada musim-musim tertentu atau secara insidental ketika ada peristiwa didalam keluarga mereka. Fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi yang bernilai tinggi dan memberikan keuntungan bagi kabupaten ini apabila dikelola dengan baik. Sehingga potensi menjadi pusat kebudayaan batak dapat tercermin secara langsung ke pada semua pengunjung, bukan hanya milik orang batak saja. Kegiatan untuk mendukung program ini berupa :

- a. Penyusunan rencana rinci/detail kawasan
- b. Penyusunan DED
- c. Pelaksanaan pembangunan dan
- d. Pengelolaannya

- Kawasan Wisata Alam Danau Toba

Kawasan pariwisata diarahkan untuk dikembangkan di kawasan yang memiliki obyek wisata yang potensial. Pengembangan kawasan wisata utama diarahkan di Danau Toba dan sekitarnya untuk wisata alam dan budaya. Peruntukan kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan Wisata Unggulan tersebut terdiri dari:

- Kawasan Wisata Tomok-Tuk-tuk ;
- Kawasan Wisata Aek Rangat ;
- Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih dan Pantai Indah Situngkir;
- Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula;
- Kawasan Wisata Alam Air Terjun Efrata;
- Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit ;
- Kawasan Wisata Lagundi dan Sukkean ;
- Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang.



Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah ; Tanah ponggol, pantai pasir putih parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak hosa, wisata budaya huta Sidabutar dan old batak village di Simanindo, wisata Piso Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Pangurusan, wisata budaya di Sitio-tio, dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Rencana peruntukan lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan dengan melakukan kajian terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-fasilitas wisata, serta atraksi wisata yang diminati.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya

Kawasan ini diarahkan untuk dikembangkan untuk dapat diberdayakan sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya melalui aktifitas kepariwisataan. Lokasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya tersebut terdiri dari :

- a. Kawasan Cagar Budaya Pusuk Buhit yaitu di Kawasan Pusuk Buhit, Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan etalase Geo Park
- b. Lokasi yang ditunjuk sebagai Geosite yang merupakan bagian dari Kawasan GeoArea Taman Bumi (Geopark) di Kabupaten Samosir, diantaranya :
 1. Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
 2. Taman Bumi Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
 3. Taman Bumi di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 4. Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
 5. Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
 6. Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
 7. Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Pekampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
 8. Taman Bumi Holly Mountain di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 9. Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
 10. Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
 11. Panorama bentang alam Danau Aek Natonang yang merupakan danau tektonik dengan elevasi tertinggi di Pulau Samosir (danau di atas danau)
 12. Singkapan Batu Sabak dari Formasi Pangurusan, tersingkap pada tebing jalan antara Simpang Harian dan Simpang Limbong;
 13. Taman Bumi Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangurusan;
 14. Endapan danau yang telah mengalami ubahan-hidrotermal yang terdapat di sekitar kawasan Simbolon-Palipi;
- c. Seluruh kawasan Wisata Alam Danau Toba.

d. Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dari segi letak geografi Kabupaten Samosir yang berada pada Kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, sehingga kegiatan Konservasi untuk mendukung kelestarian Lingkungan Wilayah DTA Danau Toba sangat dibutuhkan dan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di dalamnya mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. Salah Satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

- Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo;
- Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas 105 Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo.

Upaya untuk meng-konservasi wilayah DTA Danau Toba ini oleh Kabupaten Samosir dikarenakan bahwa Kabupaten Samosir memiliki gambaran daerah seperti :



- a. Beberapa permasalahan yang mengancam akan kelestarian fungsi Danau Toba itu sendiri seperti Morfologi yang berbukit-bukit rawan terhadap bencana longsor. Kondisi sebagai cekungan hasil gempa juga memiliki potensi untuk selalu mengalami gempa;
- b. Banyaknya sungai permanen maupun sungai yang hanya diairi pada saat hujan menunjukkan rendahnya kemampuan tanah di Samosir untuk menyerap air;
- c. Hutan yang telah terbuka di bagian hulu memiliki potensi untuk mendatangkan banjir;
- d. Terbatasnya lahan yang datar menjadi kendala Kabupaten Samosir untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat agropolitan;
- e. Deforestasi di berbagai lokasi di dalam Pulau Samosir telah mengakibatkan tidak sehatnya siklus hidrologi

e. Kawasan Strategis Lainnya

Letak geografi Kabupaten Samosir dengan Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir, maka keberadaan Simanindo, Tomok, Onan Runggu dan Nainggolan akan menjadi pintu masuk atau akses ke luar Kabupaten Samosir. Untuk itu pengembangan kawasan perkotaan sebagai akses keluar masuk Pulau Samosir adalah sangat strategis peranannya sebagai pelayanan transportasi penyeberangan Danau Toba.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir merupakan gambaran aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 5.35 persen, 5.58 persen dan 5.70 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir cenderung mengalami perlambatan hingga -0,59 persen. Namun demikian, capaian perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2020 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya masing-masing sebesar -1,07% (minus satu koma nol tujuh persen) untuk Sumatera Utara dan -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen) untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan 2,65 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tetapi masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2017-2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021(Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.34	5.36	4.70	-0,28	2,51
B	Pertambangan dan Penggalian	7.61	6.48	5.81	2,43	3,01
C	Industri Pengolahan	2.70	2.57	3.42	1,09	1,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.40	2.35	3.39	5,61	4,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	5.78	3.60	4.31	3,11	2,04



No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	7.52	8.18	8.07	-3,35	4,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.99	5.04	6.09	-0,42	5,21
H	Transportasi dan Pergudangan	7.84	6.91	9.87	-3,81	2,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.92	7.43	9.83	-2,86	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	7.65	7.30	9.01	8,55	7,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.84	4.70	4.96	3,80	5,84
L	Real Estate	5.58	2.97	4.24	4,97	0,40
M	Jasa Perusahaan	5.57	3.89	4.38	2,75	2,94
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.80	3.99	4.38	-0,30	-0,46
O	Jasa Pendidikan	5.96	5.97	5.56	4,57	4,65
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.67	6.58	6.05	-0,13	-1,16
Q	Jasalainnya	6.58	7.07	7.84	-0,27	2,85
R	Kabupaten Samosir	5.35	5.58	5.70	-0,59	2,65
S	Provinsi Sumatera Utara	5.12	5.16	5.15	-1,07	2,61
T	Nasional	5.07	5.17	5.02	-2,07	3,65

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Adapun persentase Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha setiap sektor dalam pembentuk PDRB Kabupaten Samosir dapat disajikan pada Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14

Peranan PDRB harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021 **
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51,17	51,02	50,53	50,87	51,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,63	0,63	0,64	0,65
3	Industri Pengolahan	0,54	0,52	0,51	0,52	0,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	10,55	11,15	11,43	11,12	11,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,85	10,81	10,88	10,84	11,03
8	Transportasi dan Pergudangan	3,51	3,48	3,57	3,43	3,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,24	5,23	5,34	5,09	4,88



No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021 **
10	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,75	0,76	0,82	0,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,91	0,89	0,90	0,95
12	Real Estat	2,14	2,13	2,19	2,28	2,25
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,94	11,60	11,47	11,62	11,04
15	Jasa Pendidikan	0,90	0,90	0,91	0,95	0,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,58	0,60	0,61	0,58
17	Jasa Lainnya	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2021 berdasarkan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Samosir dari yang memberikan kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB tahun 2021 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51,00 persen, pertambangan dan penggalan sebesar 0,65 persen, industri pengolahan sebesar 0,51 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05 persen, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daurulang sebesar 0,05 persen, konstruksi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 11,12 persen menjadi 11,56 persen pada tahun 2021, dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat menjadi 11,03 pada tahun 2021, transportasi dan pergudangan sebesar 3,42 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 5,09 persen menjadi 4,88 persen pada tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2021 sudah mencapai 0,86 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,95 persen, real esta sebesar 2,25 persen, jasa perusahaan sebesar 0,12 persen, administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,04 persen, jasa pendidikan sebesar 0,96 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,58 persen dan jasa lainnya sebesar 0,08.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. PDRB Kabupaten Samosir per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
PDRB Perkapita Kabupaten Samosir Menurut Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)		Pertumbuhan PDRB (%)
	Berlaku	Konstan	
[1]	[2]	[3]	[4]
2017	29,99	22,20	0,48
2018	32,47	23,30	0,57
2019	35,15	24,56	0,27
2020*	33,40	22,67	7,83
2021**	34,53	22,96	1,22

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.



PDRB per kapita Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk PDRB per kapita pada harga berlaku tumbuh secara berfluktuatif mulai tahun 2017 dari yang awalnya sebesar 29,99 juta rupiah menjadi 34,53 juta rupiah pada tahun 2021. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Samosir rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pertumbuhan PDRB per kapita secara "riil" meningkat selama kurun waktu 2017-2019, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan hingga kembali meningkat di tahun 2021. Tahun 2017, PDRB per kapita ADHK 2010 sebesar 22,20 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHK 2010 mencapai 22,96 juta rupiah, tumbuh positif sebesar 1,41 persen dimana tahun sebelumnya tumbuh minus sebesar -7,81 persen sebagai sinyal tidak terjaganya inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya pendapatan per kapita secara riil. Pertumbuhan positif PDRB per kapita tahun 2021 mengindikasikan mulai membaiknya pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Samosir.

b. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.16
Indeks Gini Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kabupaten Samosir	0.2870	0.2846	0.3010	0.318	0.274
Prov. Sumatera Utara	0.315	0.318	0.317	0.318	0.315

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Indeks Gini Kabupaten Samosir tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan angka peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 0.2870 pada tahun 2020 menjadi 0.318 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.044 sehingga menjadi 0.274. Walaupun pada tahun 2019 Indeks Gini Kabupaten Samosir mengalami peningkatan, namun distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2017-2019 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria rendah. Keadaan tersebut memberikangambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sudah dapat bisa dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk (BPS, 2021).



2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Kondisi Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun ringkasan situasi kemiskinan di Kabupaten Samosir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	Inikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Garis kemiskinan Rp/Kab/Bulan	287.857	299.640	315.825	341.843	370.082
2	Jumlah Penduduk Miskin	18.430	16.810	15.790	15.800	16.080
3	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	14.72	13.38	12.52	12,48	12,68
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.44	1.70	1.63	1,84	2,20
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.61	0.35	0.34	0,46	0,60

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami peningkatan menjadi 12,68 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 16.080 jiwa pada tahun 2021. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2017-2021, garis kemiskinan Kabupaten Samosir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangitingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Ini mengindikasikan belum adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,44 pada tahun 2017 menjadi 2,20 pada tahun 2021 atau menurun sebesar 0,24 poin, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,61 pada tahun 2017 menjadi 0,60 pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,04 poin.



b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu, panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator, di antaranya, angka melek huruf, lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Angka melek huruf di Kabupaten Samosir selama tahun 2015–2021 menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka melek huruf tersebut menggambarkan menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara selama periode tahun 2015 – 2021 diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah adalah 8.84 tahun menjadi 9.44 tahun pada tahun 2021.

Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir tentu juga didukung konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2021. Konsumsi per kapita pada tahun 2015 sebesar 7.698 menjadi 8.504 pada tahun 2021. Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir
Tahun 2015 – 2021 (Persen)

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Indeks Pembangunan Manusia	68.43	68.82	69.43	69.99	70.21	70,63	70,83

Sumber : BPS Kabupaten Samosir.

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2015–2021 mengalami peningkatan 2.4 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kabupaten Samosir. Berdasarkan profil pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kabupaten Samosir sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan di berbagai bidang pembangunan daerah. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.



- Umur Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Secara khusus, tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatnya sistem *surveilans, monitoring* dan informasi tentang kesehatan

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Samosir setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Samosir tidak mengalami perbaikan. Pada tahun 2015 angka harapan hidup mencapai 70,26 tahun dan pada tahun 2021 juga angka harapan hidup mencapai 71,41 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2015 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71,41 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, kondisi kesehatan lingkungan yang semakin membaik serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir.

Tabel 2.19

Umur Harapan Hidup Kabupaten Samosir Tahun 2015-2021

Uraian	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Kabupaten Samosir	70.26	70.47	70.68	70.87	71,16	71,27	71,41
Sumatera Utara	68.29	68.33	68.37	68.61	68.95	69.10	69,23

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

- Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.



Tabel 2.20
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama
Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019*	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[6]
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13.43	13.44	13.46	13.47	13,48
	Rata-rata lama Sekolah	8.95	9.14	9.15	9.43	9,44
2	Sumatera Utara	13.10	13.14	13.15	13.23	13,27
	Rata-rata lama Sekolah	9.25	9.34	9.45	9.54	9,58

Sumber: BPS Kabupaten Samsir

Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten Samsir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 mencapai 13.43 tahun menjadi 13.48 tahun pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan (0.05 tahun). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2017 di Kabupaten Samsir memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.41 tahun atau setara dengan Diploma II. Sementara untuk tahun 2021 rata-rata Lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Samsir mencapai 13.47 tahun. Kondisi ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Samsir telah mampu menempuh pendidikan sampai dengan diploma II.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para pendidik profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila berkualitas dan dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan latihan. Selanjutnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pendidikan dapat diketahui berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMA/SMA dan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 tahun hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD	109.50	112.89	117.62	115.93	116,54
SMTp	90.74	99.62	99.69	101.46	99,47
SMTA	93.64	88.56	93.14	94.74	96,16
PT	26.00	4.76	15.05	16.43	17,32

Sumber: BPS Kabupaten Samsir



Dari Tabel 2.21 di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2017 sampai 2021 cenderung mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk SD pada tahun 2017 sebesar 109,50 persen menjadi 116,54 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 7,04 persen. Untuk SMTP pada tahun 2017 sebesar 90,74 persen menjadi 99,47 persen pada tahun 2021. Untuk SMTA pada tahun 2017 sebesar 93,64 persen menjadi 96,16 persen pada tahun 2021. Untuk perguruan tinggi pada tahun 2017 sebesar 26,00 persen menjadi 17,32 persen pada tahun 2021.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
SD	97.22	99.66	99.57	99.39	99,32
SMTP	79.12	90.80	91.58	90.92	91,51
SMTA	67.05	74.84	81.78	81.86	86,99
PT	20.57	4.76	3.60	0.86	8,84

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Sedangkan nilai APM seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kecuali Sekolah Dasar dan perguruan tinggi. Untuk SD pada tahun 2017 sebesar 97,22 persen menjadi 99,39 persen pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 99,32 persen. Untuk SMTP pada tahun 2017 sebesar 79,12 persen menjadi 91,51 persen pada tahun 2021. Untuk SMTA pada tahun 2017 sebesar 67,05 persen menjadi 86,99 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 4.17 persen. Untuk perguruan tinggi pada tahun 2017 sebesar 20,57 persen menjadi 0.84 persen pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 8.84 persen.

- Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Penduduk Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020-2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 1.094.051,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.124.111,- pada tahun 2021, dengan peningkatan sebesar 2,75 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tahun 2021 tersebut terdiri dari pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp. 682.177,- (60,69 persen) dan pengeluaran untuk kelompok non makanan sebesar Rp.441.934,- (39,31 persen). Pada pengeluaran kelompok makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas makanan minuman jadi sebesar 11,67 persen, diikuti dengan komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar 9,10 persen, komoditas rokok sebesar 9,09 persen, komoditas padi-padian sebesar 8,80 persen, dan komoditas sayur-sayuran sebesar 5,33 persen. Sementara itu, pada kelompok non makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 17,39 persen, diikuti komoditas aneka komoditas dan jasa sebesar 10,96 persen, dan komoditas tahan lama 4,23 persen.



c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.23

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Adapun indeks Kepuasan Masyarakat	NA	77.78	82	83	84.75

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 77.78 persen menjadi 84.74 persen pada tahun 2020, sedangkan tahun 2017 data IKM tidak tersedia. Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan beberapa hal, yakni:

1. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mempermudah proses pelayanan masyarakat seperti: komputer, alat tulis, koneksi internet (untuk layanan yang terdata secara online), sarana/layanan fotocopy.
2. Meningkatkan ketepatan jam layanan dan mensosialisasikan pada masyarakat melalui publikasi media (website OPD, surat kabar, radio lokal, dan poster di pintu masuk).
3. Meningkatkan kinerja/pemanfaatan sistem teknologi untuk mempercepat proses pelayanan di website masing-masing OPD

4. Opini BPK

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Untuk itu Kabupaten Samosir telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir menjadi tahun keempat memperoleh nilai WTP, sedangkan pada tahun 2017 opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.24

Opini BPK Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kab. Samosir



Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian didukung oleh: 1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi; 2. Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan dan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam akuntabilitas keuangan antara lain: belum optimalnya koordinasi masing-masing stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; Proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan waktu yang lama.

e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Adapun Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Samosir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Skor PPH	75,47	78,49	79,17	83,90	86,20

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Data diatas menunjukkan Pola Pangan Harapan Kabupaten Samosir Tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan menuju keseimbangan dan keanekaragaman pangan yakni 75.47 pada tahun 2017 dan 86.20 pada tahun 2021. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu administrasi



pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang pendidikan diantaranya pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini, Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik, dan persentase SD dan SMP Terakreditasi. Adapun realisasi capaian indikator kinerja pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	40,87	48,16	71,34	71,34	63,44
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	97,74	98,92	98,56	98,56	99,33



NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	98,84	98,86	99,57	99,39	99,32
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	99,46	89,49	91,58	90,92	91,51
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)				
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)				
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,97	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)				
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)				
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	85,09	85,14	NA	90,62	90,94
15	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	NA	NA	32,17	32,17	35,25
16	Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	Persen	NA	NA	20,00	20,00	21,23
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	NA	NA	95,92	95,92	110,10
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	NA	NA	82,95	82,95	97,17
19	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	NA	NA	87,60	87,60	90,44
20	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik	Persen	NA	NA	93,47	93,47	62,43
21	Persentase SD dan SMP	Persen	NA	NA	100	100	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Terakreditasi						

Sumber: Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini untuk Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 40,87 persen sedangkan tahun 2020 telah mencapai sebesar 71,34 persen walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,9 menjadi 63,44 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak jaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada dilingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada periode 2017 sampai dengan 2021, angka melek huruf penduduk di Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti semakin banyak penduduk Kabupaten Samosir yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2017, Angka Melek Huruf di Kabupaten Samosir adalah 97,74 persen dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yakni Tahun 2021 angka melek huruf meningkat menjadi 99,33 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada 0,67 persen penduduk Kabupaten Samosir yang masih buta huruf. Untuk itu pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah, terlebih untuk usia muda. Jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kecuali Sekolah Dasar dan perguruan tinggi. Untuk SD pada tahun 2017 sebesar 98,84 persen menjadi 99,32 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 0,48 persen. Untuk SMTP pada tahun 2017 sebesar 99,46 persen menjadi 91,51 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,95 persen. Untuk SMTA pada tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak termasuk Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir.



Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD sederajat ke SMP sederajat tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni sebesar 100 persen dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP sederajat ke SMA/SMK/MA yakni sebesar 100 persen. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan secara pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) yang diukur dari Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni 85,09 persen pada tahun 2017 menjadi 90,94 pada tahun 2021. Untuk indikator lainnya capaian sampai tahun 2021 adalah persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini telah mencapai 35,25 persen, persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi mengalami peningkatan sebesar 1,23 persen sehingga telah mencapai 21,23 persen, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar telah mencapai 110,10 persen, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama telah mencapai 97,17 persen, persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik telah mencapai 90,44 persen, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik telah mencapai 62,43 persen, dan persentase SD dan SMP Terakreditasi telah mencapai 100,00 persen.

b. Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang kesehatan diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya.

Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan



TBC sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, persentase Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yang mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun realisasi capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.27
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	70,34	70,26	NA	62,29	64,7
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94	93,28	100	84,30	84,32
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	91,50	91,50	91,50	91,50	100
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	60	60	60	60	37,78
8	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,74	100	100	100	100
9	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	NA	0,08	0,08	0,08	0,08
10	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	NA	100	100	100	100
11	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten	Persen	NA	0,39	0,39	0,39	5,65
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	NA	88,92	100	100	100
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	NA	67,16	100	100	68,93
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	NA	98.21	100	100	70,94
15	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	NA	66.92	66.92	66.92	68,41
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persen	NA	99.15	99.15	99.15	100



NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	kesehatan sesuai standar: Catt: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai sd contoh rubella, polio campak dst. Imunisasi						
17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	60,57	60,57	78,82
18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	84,51	84,51	100
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	87,75	87,75	18,83
20	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	68,33	68,33	53,41
21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	NA	NA	79,03	79,03	100
22	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	100
23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	NA	NA	22,13	22,13	58,32
24	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	NA	NA	100	100	100
25	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	NA	NA	100	100	100
26	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Persen	NA	NA	102,30	160	166

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari Tabel diatas untuk indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencakup keseluruhan yakni sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yakni sebesar 100 persen, sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 70,34 dan mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi 64,70 persen. Untuk indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2017 sebesar 94 persen dan pada tahun 2021 sebesar 84,32 persen. indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mengalami peningkatan sebesar 0.02 persen pada tahun sebelumnya. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100 persen sedangkan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami



peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 23,22 persen dari tahun sebelumnya.

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Untuk indikator lainnya capaian sampai 2021 adalah rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk telah mencapai 0,08 persen, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi telah mencapai 100 persen, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten telah mencapai 5,65 persen pada tahun 2021, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 persen, ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan telah mencapai 68,93 persen, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah mencapai 70,94 persen, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar telah mencapai 68,41 persen, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 100 persen: Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya. Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah mencapai 78,82 persen, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 18,83 persen, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 53,41 persen, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar telah mencapai 58,32 persen, persentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan telah mencapai 100 persen. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD telah mencapai 100 persen, dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah mencapai 166 jiwa.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman (ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan daerah ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal. Adapun prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung Jawab Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Prasarana Jalan Kabupaten Samosir
Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung Jawab Tahun 2017-2021

Tahun	Satus Jalan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2017	188	-	771,21	959,21
2018	188	74.45	696,76	959,21
2019	188	74.45	696,76	959,21
2020	188	74.45	696,76	959,21
2021	NA	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Samosir (Samosir Dalam Angka Tahun 2022)



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa panjang jaringan jalan di Kabupaten Samosir sampai pada tahun 2020 adalah 959,21 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh satu), yang terdiri dari jalan negara sepanjang 188 km (seratus delapan puluh delapan kilometer), jalan provinsi sepanjang 74,45 km (tujuh puluh empat koma empat puluh lima kilometer) dan jalan kabupaten sepanjang 696,76 km (enam ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam) kilometer. Adapun Prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan Atas Kondisi Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.29

Prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan, Kondisi dan Jenis Permukaan Tahun 2021

No	Keadaan Jalan	Status Jalan			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Jenis Permukaan				
1	Hotmix	188	74.45	165,098	353,098
2	Aspal			118,426	118,426
3	Perkerasan Beton			132,891	132,891
4	Krikil			267	267,1
5	Tanah			87,7	87,7
II	Keadaan Jalan				
1	Baik	188	74.45	266,17	266,17
2	Sedang			164,086	164,086
3	Rusak			94,844	94,844
4	Rusak Berat			246,115	246,115

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir

Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya pengaturan penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan memperhatikan jenis angkutan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terbesar dan dimensi kendaraan bermotor. Banyaknya kategori jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-jalan di Kabupaten Samosir hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm (seribu dua ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) ukuran paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pembangunan infrastruktur di bidang jalan jembatan merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Samosir, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya adalah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni 56,60 persen menjadi 55,79 persen. Luas irigasi dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 90,34 persen pada tahun 2021 menjadi 83,06 persen, kawasan kumuh 1,08 persen, persentase jumlah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten sebesar 52,39 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.30**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53,66	52,37	54,06	56,60	55,79
2	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	91,24	93,43	NA	90,34	83,06
3	Kawasan Kumuh	Persen	0	0	0	1,08	1,08
4	Presentase panjang jalan kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Persen	NA	NA	0,56	NA	0
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	13,21	13,21	NA
6	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan kresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	51,41	51,41	NA
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	44,49	52,21	53,19	55,65	52,39
8	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
9	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	69/ 21,84	2	NA	NA	NA

Sumber: DISPUPR & DISPORA KPP Kabupaten Samosir, 2021

d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya rumah tangga pengguna air bersih untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021



cenderung mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 44,49, pada tahun 2018 sebesar 52,21 persen, pada tahun 2019 sebesar 53,19 persen, pada tahun 2020 sebesar 55,68 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 3,29 persen menjadi 52,39 persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Kawasan kumuh yakni 0 persen, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,08 persen. Sementara itu, Rumah layak huni pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan yakni pada tahun 2017 sebanyak 79,64 persen menjadi 91,90 pada tahun 2021. Rumah Tangga Bersanitasi cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 44,49 persen menjadi 55,68 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 52,39 persen. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yakni 0 unit menjadi 4 unit pada tahun 2021. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten yakni 0 persen, persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 0 persen, pada tahun 2020 menjadi 1,44 persen dan pada tahun 2021 menjadi 0 persen. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) telah mencapai 22,66 pada tahun 2019 persen, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 12,47 persen, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 16,32 persen, presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yakni 0 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.31

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	44,49	52,21	53,19	55,68	52,39
2	Kawasan kumuh	Persen	0	0	0	1,08	1,08
3	Rumah layak huni	Persen	79,64	81,70	89,36	89,55	91,90
4	Rumah Tangga Per Sanitasi	Persen	44,49	52,21	53,91	55,68	52,39
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	unit	0	0	0	0	4
6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	0	0	0	0	0
7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	0	0	0	1,44	0
8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,32	5,85	22,66	12,47	16,52
9	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang



e. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Berbagai capaian indikator kerja pada Pembinaan politik daerah pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2017 untuk pembinaan politik sebanyak 3 kegiatan dan terus mengalami penurunan menjadi 2 kegiatan pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing 1 kegiatan. Serta capaian indikator lainnya adalah persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan telah mencapai 100 persen, persentase perda dan perkada yang ditegakkan telah mencapai 90 persen, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum terlayani disebabkan tidak adanya kegiatan yang mendukung karena dukungan anggaran belum tersedia, persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100persen, waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran telah mencapai 20,52persen, dan persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS telah mencapai 2,85persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.32

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1
3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	NA	NA	88,38	100	100
4	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	NA	NA	100	100	90
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	NA	NA	100	100	0
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Persen	NA	NA	82.531	82.531	0



No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	kesiapsiagaan terhadap bencana						
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	NA	NA	82.531	82.531	0
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	NA	NA	35	35	100
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	NA	NA	15	15	20,5
10	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Persen	NA	NA	2,85	2,85	2,85
11	Kejadian Bencana	Kejadian	14	34	14	20	5

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir Tahun 2021

f. Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Sosial diantaranya sarana sosial adalah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni sebanyak 3 buah, persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni tahun 2017 sebanyak 34,31 persen menjadi 32,24 persen pada tahun 2021, PMKS yg memperoleh bantuan sosial cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni tahun 2021 sebanyak persen menjadi 20,68 persen dari 61 persen pada tahun 2020 dan capaian indikator lainnya sampai tahun 2021 adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) sebanyak 42,31 persen, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten sebanyak 100 persen, rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng sebanyak 100 persen, persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak 0 persen dan rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan sebanyak 94,40 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.33**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	3	3	3	3	3
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	34,31	34,31	NA	24,99	32,24
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	23,28	95,96	NA	61	20,68
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	NA	NA	15,48	15,48	42,31
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	NA	NA	100	100	100
6	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Persen	NA	NA	100	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Persen	NA	NA	100	100	0
8	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang di sediakan	Persen	NA	NA	17,38	17,38	94,40

Sumber: Dinas Sosial



2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Berdasarkan data statistik Kabupaten Samosir, pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh Kabupaten Samosir cenderung meningkat dari tahun 2017-2021 yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 30 persen, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak ditemukan data. Untuk pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017-2018 yakni 56,30 persen. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja telah mencapai 100 persen, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi telah mencapai 0,95 persen, tingkat produktivitas tenaga kerja telah mencapai 4.246.82, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah mencapai 100 persen, persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten telah mencapai 100 persen, persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial telah mencapai 100 persen, persentase instruktur bersertifikat kompetensi telah mencapai 100 persen dan persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.34

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh	Persen	30	30	NA	NA	NA
2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	56,30	56,30	NA	NA	NA
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	NA	NA	100	100	NA
4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	0,31	0,31	0,95
5	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rasio	NA	NA	4.3757.340	4.3757.340	4.246.82
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	NA	NA	100	100	NA
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar	Persen	NA	NA	100	100	NA



NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	kerja dalam wilayah kabupateN						
8	Persentase perselisihan hubungan industrial Yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	NA	NA	100	100	NA
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	50	50	100
10	Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan	Persen	NA	NA	100	100	NA

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.35

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	63,6	63,6	61,17	61,17	77,56
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Persen	97,40	97,40	97,53	97,12	98,63
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	99,35	99,35	98,98	56,03	57,67
4	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen	NA	NA	0,30	0,30	0,03



NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	NA	NA	0.02	0.02	0,01
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	NA	NA	14,24	NA	0,01
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari Tabel di atas tampak bahwa persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yakni pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 63,5 persen, menjadi 61,17 persen pada tahun 2019-2020 pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 77,56 persen. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 97,40 persen dan kemudian menjadi 98,63 persen sejak tahun 2021. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 99,35 persen menjadi 57,67 persen. Capaian indikator persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD telah mencapai sebesar 0,30 persen pada tahun 2021, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0,01 persen. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yakni 0.01 pada tahun 2021, sedangkan persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani telah mencapai sebesar 100 persen dan partisipasi angkatan kerja perempuan telah mencapai sebesar 100 persen.

c. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Samosir, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan diantaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kabupaten Samosir selama tahun 2017 sampai dengan 2021 telah mengeluarkan peraturan Bupati diantaranya adalah Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019, Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 23



Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir. Untuk ketersediaan bahan pangan utama yakni Padi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni tahun 2017 sebanyak 39.888 ton menjadi 30.766 ton pada tahun 2021, jagung cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebanyak 19.513 ton menjadi 26.287 ton pada tahun 2021, ubi kayu cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebanyak 8.089 ton menjadi 3.766 ton pada tahun 2021 dan ubi jalar cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebanyak 6.375 ton menjadi 7.099 ton pada tahun 2021, sedangkan untuk bahan pangan kacang tanah pada tahun 2017 sebanyak 115 ton, pada tahun 2018 sebanyak 84 ton, pada tahun 2019 sebanyak 73 ton, pada tahun 2020 sebanyak 216 ton dan pada tahun 2021 sebanyak 108 ton. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan belum tersedia. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan dihubungkan dengan analisis ketersediaan beras di Sumatera Utara terhadap kebutuhan beras Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.36

Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Regulasi ketahanan pangan 1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Samosir Tahun 2015-2019 2. Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir; 3. Keputusan Bupati Samosir Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir; 4. Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir 5. Keputusan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang	Ada/ Tidak	Ada	Ada	ada	Ada	Ada



NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir						
2	Ketersediaan bahan pangan utama	Ton					
	a. Beras		39.888	42.066	47.619	47.973	30.766
	b. Jagung		19.513	17.414	47.848	31.056	26.287
	c. Ubi		8.089	3.956	2.671	3.810	3.766
	d. Ubi Jalar		6.375	7.623	9.326	8.201	7.099
	e. Kacang	115	84	73	216	108	
3	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	a/ Tidak Ada	NA	NA	NA	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir

d. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah penanganan sampah cenderung meningkat sejak tahun 2017-2021 yakni sampah yang tertangani sebesar 55 persen pada tahun 2017-2018 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menjadi 58,8. Tempat pembuangan sampah juga mengalami peningkatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yakni 108,724 persen pada tahun 2017 menjadi 243,1001 persen pada tahun 2020. Penegakan hukum lingkungan belum ada yang terlaksana sejak tahun 2017-2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota (Kategori Baik) menjadi 68,49 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 86,52. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 38,22 persen mengalami penurunan sebesar 15,28 persen menjadi sebesar 38,22 persen dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah telah mencapai sebesar 92,5 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 2.37
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penanganan sampah	Persen	55	55	58,8	58,8	58,8
2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	108,724	243,1001	NA	243,1001	NA
3	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0	0	0	0	0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Persen	86,94	86,936	86,931	86,52	68,49
5	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kabupaten	Persen	NA	NA	53,5	53,5	38,22
6	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	NA	NA	100	100	92,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

e. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik. Pada tahun 2017, persentase kepemilikan KTP masyarakat Kabupaten Samosir sebesar 92,35 persen dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 97,38 persen. Sedangkan persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun 83, 2 persen pada tahun 2020 menjadi 83,39 persen pada tahun 2021 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sejak tahun 2012 telah diberlakukan. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2021 diantaranya persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran adalah 94,46 persen, persentase Penduduk berumur dari 17 tahun keatas yang mempunyai KTP Elektronik sebesar 94,66 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.38**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kepemilikan KTP	Persen	92,35	94	99	99	97,38
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	80,3	87,4	NA	83,2	83,39
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Persentase penduduk usia 0 -18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	Persen	NA	NA	83,99	100	94,46
5	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Persen	NA	NA	95,92	98	94,66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir

f. Urusan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator PKK sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk Posyandu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi dan menurun yakni tahun 2016 sampai tahun 2018 telah mencapai 100 persen, kemudian tahun 2019 turun menjadi 81,06 persen, dan tahun 2020 turun menjadi 80 persen, prevalensi peserta KB aktif sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yakni tahun 2016 sebesar 75,05 persen menjadi 67,17 persen pada tahun 2020. Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB) sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2016 sebesar 4,46 persen menjadi 22,39 persen pada tahun 2020. Untuk capaian indikator lainnya sampai tahun 2020 diantaranya adalah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19*) telah mencapai 5,44 persen, TFR (Angka Kelahiran Total) telah mencapai 2,42 persen, Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) telah mencapai 62,48 persen, dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) telah mencapai 17,30 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.39**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
2	Posyandu	Persen	100	100	81,06	80	86
1	Prevalensi peserta KB aktif	Persen	65,54	70,26	70,26	67,17	68,20
2	Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB)	Persen	4,46	22,39	22,39	22,39	23,88
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	NA	NA	2,68	2,42	2,13
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR15-19)	Persen	NA	NA	5,63	5,44	4,5
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	NA	NA	66,37	62,48	68,20
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	NA	NA	17,34	17,30	16,07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

g. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Samosir, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang perhubungan adalah angkutan darat bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun serta kelancaran masyarakat menjalankan aktivitasnya. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 rasio konektivitas kabupaten yakni sebesar 70,47 persen, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 80,60 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.40

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[8]
1	Angkutan darat	Persen	0,0004	0,00098	NA	0,00098	NA
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Persen	NA	NA	70,47	70,47	80,60
3	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Range	NA	NA	0,21-0,44	0,21-0,44	NA

Sumber: Dinas Perhubungan

h. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi



dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.41

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Web site milik pemerintah daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/expo	kali	6	16	NA	6	N/A
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	NA	NA	100	100	100
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	NA	NA	59,30	59,30	78,78
6	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak	NA	NA	Ada	Ada	Ada
7	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	NA	NA	100	100	NA
8	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari Tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.samosirkab.go.id/> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan Pameran/Expo yakni pada tahun 2017 sebanyak 6 kali tetapi pada tahun 2021 tidak ada. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen, persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah mencapai 100 persen, Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten telah mencapai 78,78 persen pada tahun 2021, Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi *e-government* telah ada, Persentase ASN pengelola TIK yang,



tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen dan tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen.

i. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai sebesar 100 persen, untuk usaha Usaha Kecil dan menengah sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2017 sebesar 94 persen dan menjadi 88 persen pada tahun 2021, persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni 52,38 persen menjadi 21,87 pada tahun 2021, meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 3,51 persen menjadi 25 persen pada tahun 2021, persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar 4,30 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.42

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koperasi aktif	Persen	100	100	100	100	100
2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	94	88	88	88	NA
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	52,38	52,38	21,87	21,87
4	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	NA	3,51	3,60	25	25
5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	NA	100	100	4,30	4,30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

j. Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Samosir memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Samosir dapat dilihat diantaranya melalui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Samosir cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan yakni nilai realisasi PMDN dan PMA pada tahun 2017 sebesar 0,03 persen, tahun 2017 sebesar 4,19 persen dan tahun 2018 sebesar 46 persen, tahun 2019 sebesar 46 persen dan tahun 2020 sebesar 52 persen dan Persentasepeningkataninvestasidi Kabupaten Samosir pada tahun



2020 sebesar 1,17 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.43
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	610	933	1.060	1.136	1.190
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	1,31	2,24	1,30	7,17	4,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Samosir.

k. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Per 100.000	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
2	Lapangan olahraga .	Per 100.000	0,00035	0,2291	0,2291	0,2291	0,2291
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	NA	0,03	0,03	3,26
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	NA	6,83	6,83	43,90
5	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	NA	NA	5	5	NA
6	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Persen	NA	NA	63,63	75	72

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir



Dari tabel diatas tampak juga bahwa tampak bahwa capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk di Kabupaten Samosir tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 yakni 0.00001 per 1000 penduduk, sedangkan Lapangan olahraga per 100.000 penduduk mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebanyak 0.2291 per 100.000 penduduk. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 0.03 persen menjadi 3,26 pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 43, 90 persen pada tahun 2021, Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan pada tahun 2021 mencapai 72 persen.

I. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kabupaten. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.45

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Luas lahan bersertifikat	Persen	3,56	8,97	14,48	14,48	NA
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	0	0	NA	100	NA
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	Persen	0	0	NA	100	NA
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	NA	NA	100	100	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	NA	100	100	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	NA	NA	100	100	100
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	NA	NA	100	100	NA
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Persen	NA	NA	100	100	NA
9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	NA	100	100	NA

Sumber: Badan Pertanahan



Dari Tabel diatas menunjukkan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, tersedianya Tanah Obyek *Landreform*(TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dan tersedianya tanah untuk masyarakat dan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi telah mencapai 100 persen. Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu Satu Pintu diharapkan proses perizinan di Kabupaten Samosir dapat dilakukan secara optimal.

m. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2017-2021 antara lain tersedianya dokumen Buku Kabupaten Samosir dalam angka dan Buku PDRB Kabupaten untuk penyusunan rencana pembangunan daerah serta sejak tahun 2021 persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.46
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	NA	NA	100	100	100
4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

n. Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian terkait dengan pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan



informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Adapun capaian kinerja persandian sampai tahun 2021 adalah Tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen.

o. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Samosir diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah. Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan selama tahun 2017-2021 antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) dilaksanakan 3 kali pada tahun 2021. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung tidak mengalami perubahan yakni 3 buah. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 64 buah dari tahun sebelumnya dari 17 buah pada tahun 2021. Terlestarikannya Cagar Budaya sampai tahun 2021 telah mencapai 44,75 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.47
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	4	8	5	3
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	3	NA	3	NA
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	75	100	100	17	64
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	NA	NA	24	25	44,75

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir

p. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2017-2021 antara lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah cenderung meningkat yakni pada tahun 2017 sebanyak 46 persen dan kemudian menjadi 73,97 persen pada tahun 2021. Pengunjung perpustakaan juga cenderung sama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yakni sebanyak 5,7 Penerapan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan dilakukan sejak tahun 2017 dan tahun 2021 dan telah terlaksana 1



kegiatan. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2021 adalah nilai Budaya Baca telah mencapai 21,10 persen, persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan telah mencapai 100 persen, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009) telah mencapai 100 persen dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat telah mencapai 100 persen. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat yakni sebesar 50 persen pada tahun 2021. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	46	49	73,95	73,97	73,97
2	Pengunjung perpustakaan	Persen	10,3	11,2	5,7	5,7	5,7
3	Nilai Budaya Baca	Persen	NA	NA	21,1	21,1	21,1
4	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	NA	NA	100	100	100
5	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	100
6	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1
7	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	Persen	NA	NA	100	100	100
8	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	NA	NA	50	50	50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah



3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatake Kabupaten Samosir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir dari sektor pariwisata. Pencapaian kinerja urusan Parawisata selama tahun 2017-2021 antara lain jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami jumlah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 278.059 orang, pada tahun 2018 sebanyak 378.649 orang, pada tahun 2019 sebanyak 418.271 orang, pada tahun 2020 sebanyak 405.203 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 663.848 orang. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2021 yakni sebesar 1,71 persen. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara perkebangaan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2021 tidak ada kunjungan wisatawan manca negara dikarenakan Pandemi Covid-19. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang pada tahun 2021 adalah 16,46 persen, tingkat hunian akomodasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 58,71 persen pada tahun 2021 dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD meningkat dan telah mencapai 36 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Parawisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Parawisata
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kunjungan wisata	Orang	278.059	378.649	418.271	405.203	663.848
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	5,16	5,24	5,23	5,19	1,71
3	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan manca negara	Persen	55,68	17,85	-22,45	-94,29	0
4	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Persen	43,50	40,77	17,38	9,53	16,46
5	Tingkat hunian akomodasi	Persen	NA	NA	8,4	8,10	58,71
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	Persen	NA	NA	9,17	1,48	36

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, 2021

b. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang



pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 5,20 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 4.79 ton/ha, produktivitas jagung atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 5,37 ton/ha, pada tahun 2021 menjadi 5,40 ton/ha. Produktivitas ubi kayu atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar juga cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 28,44 ton/ha menjadi 25,60 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas kacang tanah atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 1,77 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 1,20 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas ubi jalar per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan pada tahun 2021 yakni sebesar 23,01 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 20,6 ton/ha pada tahun 2021. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 51,17 persen menjadi 51,00 persen pada tahun 2021 dan Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sampai tahun 2021 telah mencapai 43,32 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.50

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	5,20	5,13	5,30	4,79	4,79
- Padi	7,31		5,37	5,51	5,40	5,40	
- Jagung	28,44		31,39	25,43	25,60	25,60	
- Ubi Kayu	23,01		19,30	20,05	20,60	20,6	
- Ubi Jalar	1,77		1,28	1,19	1,20	1,20	
- Kacang Tanah							
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Persen	51,17	51,03	50,55	50,55	51,00
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	NA	NA	73,33	80	43,32

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan



c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral sampai tahun 2021 yakni persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten belum ada.

d. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mendefinisikan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Pencapaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2017-2021 antara lain kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2016 sebesar 10,80 persen menjadi 11,03 persen pada tahun 2021. Ekspor Bersih Perdagangan US\$ sampai tahun 2021 belum tersedia datanya. Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 100 persen, persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 100 persen, persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tidak tersedia datanya. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.51

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	10,80	10,89	10,88	10,88	11,03
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	0	0	NA	NA	NA
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	NA	NA	100	100	100
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	NA	NA	47,41	47,41	100
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandaterasah yang berlaku	Persen	NA	NA	39,97	39,97	NA

Sumber: Dinas Perdagangan



e. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Samosir cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni tahun 2017 sebesar 0,53 persen dan kemudian menjadi 0,514 persen pada tahun 2021, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020 diuraikan pada Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.52
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kontribusi sektor Industri pengelolaan (manufacturing) terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	0,53	0,52	0,51	0,516	0,514
2	Pertumbuhan Industri	Persen	4,70	4,70	NA	4,60	NA
3	Pertambahan jumlah industri besar di kabupaten	Persen	NA	NA	8,21	8,20	NA
4	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	NA	NA	100	100	NA
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	NA	NA	100	100	100
6	Persenta sejumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah Yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	NA	NA	100	100	NA



NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Persen	NA	NA	100	100	NA

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2017-2021 antara lain Pemerintah Kabupaten Samosir telah tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PerdaNo.3/2011 tentang RPJP Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan juga Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Perda No.84/2016 tentang RPJMD Kabupaten Samosir 2017-2021 serta dokumen RKPd setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.53
 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
 Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan

b. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2016-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:



Tabel 2.54
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]	[8]
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW, TMP, WDP, WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen	NA	NA	NA	13,42	11,35
3	Rasio PAD	Persen	NA	NA	NA	2,05	8,27
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	NA	NA	NA	9,72	83,10
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to front line service delivery units</i>)	Persen	NA	NA	NA	100	100
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas pencapaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Samosir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 antara lain adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2017 dengan wajar dengan pengecualian (WDP) dan tahun 2018 sampai tahun 2021 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan telah mencapai 13,42 persen, rasio PAD telah mencapai 2,05 persen, rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*) telah mencapai 100 persen, informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to front line service delivery units*) telah mencapai 100 persen dan akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) telah mencapai 100 persen.

c. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sampai 2021 antara lain persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai 6,45 persen dan Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai 6,45 persen, terlaksananya kegiatan penyusunan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seluruh organisasi perangkat daerah, terlaksananya kegiatan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan, terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan fungsional, terlaksananya



penyusunan rencana pembinaan karir PNS, terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dan terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.55

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NoO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	6,45	6,45	84,36
2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	6,45	6,45	27,78

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

d. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan. Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2017-2021 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan.

e. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.56

Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	NA	NA	Level 2	Level 2	Level 2



2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	NA	NA	Level 2	Level 2	Level 2
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	NA	NA	0	0	NA
4	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	NA	NA	3,45		6,85
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	NA	NA	48,86	48,87	86,32
6	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	NA	NA	91,96	91,90	10,51
7	1. Asset management: Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya/ Tidak	NA	NA	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya
8	<i>Cash Management</i> : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	NA	NA	5,10	4,99	5,14

Sumber : Inspektorat

Dari Tabel di atas pencapaian kinerja urusan pengawasan sampai tahun 2021 adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) telah mencapai level 2, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level 2, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama sebanyak 0 persen, persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 3,45 persen, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan telah mencapai 48,87 persen, *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mencapai 91,90 persen, assets management: Apakah ada daftar asset tetap?, apakah ada manual, untuk menyusun daftar asset tetap? Dan apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? seluruhan telah terlaksana dan *Cash Management*: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya telah mencapai 4,99 persen.



5. Urusan Pendukung

a. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pebaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, di antaranya yaitu pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki sistem informasi manajemen Pemda yakni pada tahun 2017 sebanyak 10 buah menjadi 20 buah pada tahun 2021. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu melakukan survey kepuasan layanan masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penunjang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Sistim Informasi Manajemen Pemda 1. E- Perencanaan; 2. E-Kinerja 3. SIMDA Kab.Samosir; 4. SIM-RS; 5. Sipodasa/e-Perizinan; 6. Dompok Samosir; 7. E-Sakip; 8. E-Was; 9. E-Office; 10. SIMPATDA; 11. SIMPEG; 12. Transda; 13. Owncloud.	Buah	7	16	16	20	25
2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Daerah

b. Sekretariat Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana 5 (lima) tahunan



(RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) di Provinsi Sumatera Utara diharapkan terus membaik. Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2017-2021 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.58

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Samosir	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Tahun 2017-2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa mempe rhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.59
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan	837.177	847.835	957.215	1.094.051,-	1.124.111

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Samosir cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni dengan rata-rata sebesar Rp. 837.177 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.124.111 pada tahun 2021. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

b. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Berdasarkan besaran output dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka adapun produktivitas dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.60
Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Samosir
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
a.	Padi					
	Luas Panen (ha)	7.662,00	8.850,70	8.976	9.043	9.072
	Produksi (ton)	39.891,00	45.393,00	47.619	47.973	43.491
	Produktivitas	5.21	5.13	5,31	4,79	4,79
2	Jagung					
	Luas Panen (ha)	2.668,20	3.237,40	8.683,9	5.795	4.868
	Produksi (ton)	15.913,00	17.543,00	47.848	31.928	26.287
	Produktivitas	5.96	5.42	5,51	5,4	5,4
3	Kedelai					
	Luas Panen (ha)	1,00	487,00	NA	NA	NA
	Produksi (ton)	1,00	347,10	NA	NA	NA
	Produktivitas	0.71	NA	NA		NA
4	Kacang Tanah					
	Luas Panen (ha)	65,00	65,90	61	181	80
	Produksi (ton)	115,00	76,00	73	216	108
	Produktivitas	1.77	1.15	1,2	1,2	1,1
5	Ubu Kayu					
	Luas Panen (ha)	122,00	126,00	105	149	147
	Produksi (ton)	3.825,00	4.420,00	2.671	3.790	3.766
	Produktivitas	31.35	35.08	25,4	25,4	25,6
6	Ubi Jalar					
	Luas Panen (ha)	277,00	395,00	465	398	367



No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Produksi (ton)	6.375,00	7.584,00	2.671	3.790	7.099
	Produktivitas	23.01	19.20	20,1	20,1	20,6

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa luas panen padi pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 7.662,00 ha menjadi 9.072 ha pada tahun 2021, sedangkan produksi padi cenderung mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 39.891 ton menjadi 43.491 ton pada tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 4,79 ton/ha. Untuk Jagung luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 dengan luas panen sebesar 2.668,20ha menjadi 4.868 ha pada tahun 2021, serta produksi padi mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 15.913 ton menjadi 26,287 ton pada tahun 2021 dengan produktivitas yakni 5,96 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 5,4 ton/ha pada tahun 2021. Untuk kedelai luas panen tahun 2021 tidak dihitung. Untuk kacang tanah luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 65 ha menjadi 80 ha pada tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yakni 181 ha, produksi kacang tanah cenderung menurun yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 115 ton dengan produktivitas 1,77ton/ha menjadi 108 ton pada tahun 2021 dengan produktivitas 1,1 ton/ha. Untuk ubi kayuluas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 122 ha menjadi 147 ha pada tahun 2021, serta produksi ubi kayu cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 produksi sebesar 3.825 ton menjadi 3.766 ton pada tahun 2021. Untuk Ubi Jalar luas panen pada sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 277 ha menjadi 367 ha pada tahun 2021 walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 398 ha pada tahun 2020, produksi ubi jalar cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 6.375 ton menjadi 7.099 ton pada tahun 2021.

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja. PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha. Kondisi untuk Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.61
Produktivitas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha / Industrial Original	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Produktifitas Daerah Kab Samosir (RP/tahun)	82,294,244.10	89,611,301.22	97,278,231.11	99,650,127.23	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Samosir



Dari Tabel diatas terlihat bahwa rata rata produktifitas Daerah Kabupaten Samsir pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, dimana rata rata produktifitas daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.75.513.731,68/tahun menjadi sebesar Rp.99.650.127,23/tahun pada tahun 2020.

- Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2017-2021

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi
Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Konsumsi Non Pangan	38.18	36.75	40.86	43,95	39,32
	Konsumsi pangan	61.82	63.25	59.14	56,05	60,68

Sumber: BPS Kabupaten samsir

Dari Tabel 2.62 di atas terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Kabupaten Samsir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 lebih tinggi pada konsumsi pangan dibandingkan dengan konsumsi non pangan yakni dengan rata-rata sebesar 39,32persen untuk konsumsi non pangan dan sebesar 60,68persen pada konsumsi pangan.

d. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Aktivitas dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sangat diperlukan terutama untuk negara-negara yang memiliki bentuk perekonomian terbuka. Adanya perbedaan berupa keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif merupakan faktor yang selanjutnya dapat mendorong terjadinya pertukaran di antara dua Negara/Kota. Kegiatan pertukaran berupa impor yang dilakukan oleh suatu negara ditujukan untuk memenuhi permintaan suatu negara terhadap komoditas yang dihasilkan dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional berupa impor dikatakan tidak dapat pula dihindarkan karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang berdampak pada biaya produksi dan harga. Perkembangan ekonomi Kabupaten Samsir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan imporyang memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung perekonomian Kabupaten Samsir yang semakin terbuka. Adapun kondisi ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.63
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB
Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021 (Milyar)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Ekspor	710,51	749,53	790,41	754,78	802,14
2	Impor	743,41	771,94	802,97	761,02	806,62
3	Ekspor+ Impor	1453,92	1521,47	1593,38	1515,8	1.608,76
4	PDRB	2.776,85	2.931,70	3.098,74	3.080,43	3.162,10



5	Rasio Ekspor+ Impor terhadap PDRB	52,36	51,90	51,42	49,21	50,81
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) sejak tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 sebesar 53,86 persen menjadi 49.21 persen pada tahun 2020.

e. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR

Simpanan masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), termasuk juga penghimpunan dana dengan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Simpanan masyarakat adalah dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka. Adapun posisi simpanan masyarakat rupiah dan valuta asing Bank umum dan BPR di Kabupaten Samsir Tahun 2017-2021 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.64

Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR (juta rupiah):Giro, Simpanan, Tabungan	276, 97	272, 09	NA	NA	NA
	Giro	56.61	31.11	NA	NA	NA
	Simpanan	49.52	59.27	NA	NA	NA
	Tabungan	170.85	18172	NA	NA	NA

Dari Tabel di atas terlihat bahwa posisi simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.276,15 Milyar menjadi 272,09 milyar pada tahun 2018 berupa giro, simpanan dan tabungan. Penghimpunan dana perbankan ini mengalami penurunan disebabkan karena menurunnya jumlah dana Giro sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

f. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Adapun Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020 diuraikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.65**

Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran	450 049	475 906	NA	NA	NA
2.	Modal Kerja	273 075	289.465	NA	NA	NA
3.	Investasi	47.333	38.684	NA	NA	NA
4.	Konsumsi	129.642	147.757	NA	NA	NA

Dari tabel di atas terlihat bahwa posisi pinjaman rupiah dan valuta asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2016 sebanyak Rp 428,045 Milyar menjadi Rp 475,906 milyar pada tahun 2018 yang tersebar pada pinjaman modal kerja, investasi dan konsumsi.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di Pusat Perkembangan Penduduk, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.66

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Samosir Tahun 2021

NO	Indikator	Satuan	2021
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	53,9
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,11
3	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Persen	80,90
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen	68,4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Samosir

3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Kasus kriminalitas di Kabupaten Samosir sejak tahun 2017-2021 untuk Jenis Tindak Pidana (JPT) cenderung mengalami penurunan setiap tahun



begitu juga dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) untuk periode tahun 2017-2021 mengalami penurunan.

b. Jumlah Dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan, bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67

Jumlah Pajak dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir
Tahun 2020-2021

NO	Indikator	Satuan	2020	2021
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	41	41
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7,25	8,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2020-2021 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8,27 persen dari tahun 2020 sebesar 7,25 persen. Peningkatan persentase PAD tersebut diperoleh dari peningkatan wajib pajak dan retribusi Daerah.

4. Fokus Sumber daya Manusia

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi. Untuk mewujudkan program pembangunan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk daerah yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.68

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir
Tahun 2017 - 2021(Jiwa)

No	Kegiatan Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angkatan Kerja	72.182	67.897	66.999	45.588	74.458
	Bekerja	71.259	66.983	66.160	45.043	73.937
	Pengangguran	923	914	839	545	521
	Persentase Bekerja	98.72	98.65	98.75	98,80	99,30
2	Bukan Angkatan Kerja	9.037	14.128	15.128	41.800	13.784



No	Kegiatan Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Sekolah	2.264	6.423	5.741	4.603	3.758
	Mengurus Rumah Tangga	4.279	5.570	6.396	32.863	5.921
	Lainnya	2.494	2.135	2.989	4.334	4.105
	Jumlah	81.219	82.205	82.127	87.388	88.242
Rasio Penduduk		NA	88.87	82.59	81.58	84,37

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Samosir jumlah penduduk angkatan kerja sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung menurun tetapi pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dari 72.182 jiwa penduduk usia kerja, 71.259 jiwa adalah yang bekerja dengan persentase sebesar 98,72 persen dan yang pengangguran sebanyak 923 jiwa dengan persentase sebesar 1,28 persen dan yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 9.237 jiwa terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sedangkan pada tahun 2021 dari 45.588 jiwa penduduk angkatan kerja, sebanyak 45.043 jiwa yang bekerja dengan persentase berkerja sebesar 99,30 persen dan 521 jiwa yang pengangguran dengan persentase sebesar 0,70 persen dan yang bukan angkatan kerja adalah sebesar 13.784 yang terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sebagaimana data pada Tabel 2.28 di atas, diketahui rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar 88.87 persen menjadi 84,37 persen pada tahun 2021.

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan disajikan pada Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.69

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56,23	56,21	56,20	56,24	50,57

Sumber: BPS Kabupaten Samosir.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir selama periode 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan yakni angka partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 sebesar 56,23 persen menjadi 56,24 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,67 persen menjadi 50,57 persen.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak



produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.70
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Umur 0 - 14 Tahun	34.784	41.415	37.696	41.485	39.425
2	Umur 15 - 64 Tahun	98.422	92.127	90.461	85.027	91.369
3	Umur 65+ Tahun	10.890	10.402	11.801	9.292	11.188
4	RasioKetergantungan	31.70	36.00	51.91	60,47	55.39
5	Angka beban Tanggungan Anak	24.14	28.77	37.67	48,79	43.14
6	Angka Beban Tanggungan Lanjut Usia	7.56	7.23	10.40	11,67	12.24

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir

Rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 31,70 persen dan tahun 2020 sebesar 60,47 persen dan Rasio ketergantungan tahun 2021 sebesar 55,39 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55,39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

5. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasinya, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik



(Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

2.5 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Yang Direncanakan Dalam Rpjmd Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021

1. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi target capaian Program terhadap RPJMD adalah Realisasi Program berdasarkan hasil Renja pada tahun 2021 terhadap proram-program RPJMD dimana program-program tersebut. Adapun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Kabupaten SAMOSIR Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.71

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Nama SKPD	Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	Dinas Pendidikan		79.82 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.50 %
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.98 %
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.16 %
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92.86 %
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0.00 %
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	90.00 %
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.97 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	72.90 %
2	Dinas Kesehatan		77.37 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.15 %
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	71.43 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.03 %
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100.0 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 %
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	33.33 %
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.1	Puskesmas Buhit		88.89 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.67 %
		Administrasi Umum	66.67 %
2.2	Puskesmas Ronggur Nihuta		100 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.3	Puskesmas Limbong		94.44 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.33 %
		Administrasi Umum	83.33 %
2.4	Puskesmas Harian		100 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.5	Puskesmas Simarmata		100 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.6	Puskesmas Tuktuk Siadong		100 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.7	Puskes Ambarita		83.33 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.00 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.00 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.8	Puskesmas Lontung		88.89 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
2.9	Puskesmas Mogang		91.67 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.00 %
		Administrasi Umum	75.00 %
2.10	Puskesmas Sitio-tio		95.83 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87.50 %
		Administrasi Umum	87.50 %
2.11	Puskesmas Sirait		100 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		DAERAH	
		Administrasi Umum	100 %
2.12	Puskesmas Onan Runggu		100.0 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100 %
		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Umum	100 %
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga		88.19 %
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	88.89 %
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	66.67 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.33 %
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.00 %
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		85.10 %
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.63 %
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.21 %
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.05 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	74.50 %
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.50 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	184 %
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	184 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	40.00 %
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	100 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	20.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.55 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	98.57 %
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		86.66 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	133 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	133 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	73.26 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.26 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	140 %
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	140 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	50.00 %
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50.00 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0.00 %
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	17.33 %
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0.00 %
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34.67 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.73 %
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00 %
		Administrasi Keuangan	125 %
		Administrasi Umum	88.46 %
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	81.54 %
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.54 %
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		77.22 %
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	56.25 %
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0.00 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	113 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Bencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	106 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	102 %
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
7	Satuan Polisi	Pamong Praja	83.33 %
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.00 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00 %
8	Dinas Sosial		69.92 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.50 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.00 %
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	0.00 %
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	50.00 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.00 %
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.08 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	94.23 %
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa		75.39 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.75 %
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	87.50 %
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.00 %
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.00 %
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	116 %
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	116 %
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150 %
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.37 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150 %
		Administrasi Keuangan	150 %
		Administrasi Umum	85 %
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12.50 %
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.50 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	50.00 %
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.00 %
10	Dinas Ketahanan Pangan		75.00 %
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	50.00 %
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0.00 %
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0.00 %
		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	0.00 %
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	200 %
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	150 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0.00 %
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 %
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0.00 %
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
11	Dinas Lingkungan Hidup		82.60 %
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	76.79 %
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	129 %
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25.00 %
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	109 %
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	109 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.00 %
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.00 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100 %
		Pengelolaan Sampah	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
11.1	UPTD Kebun Raya Samosir		95.45 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.45 %
		Administrasi Umum	90.91 %
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		82.64 %
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	68.00 %
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68.00 %
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	129 %
		Pelayanan Pencatatan Sipil	129 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.00 %
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	50.00 %
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
		Penataan Administrasi Kependudukan	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		66.67 %
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0.00 %
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0.00 %
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	77.78 %
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	33.33 %
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
14	Dinas Perhubungan		67.39 %
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0.00 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0.00 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	69.57 %
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0.00 %
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	109 %
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100 %
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		DAERAH	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		86 %
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	36.80 %
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.80 %
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	200 %
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100.0 %
16	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		77.50 %
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0.00 %
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0.00 %
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0.00 %
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0.00 %
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0.00 %
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0.00 %
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100 %
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	90.00 %
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	90.00 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	80.00 %
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	80.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0.00 %
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0.00 %
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100 %
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150 %
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150 %
16.1	Balai Latihan Kerja Kab. Samosir		91.67 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	91.67 %
		Administrasi Umum	91.67 %
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		83.26 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0.00 %
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	133 %
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	133 %
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150 %
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		89.71 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	90.82 %
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.63 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.50 %
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	0.00 %
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50.00 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57.74 %
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.50 %
		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.71 %
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150 %
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125 %
		Administrasi Keuangan	50.00 %
		Administrasi Umum	100 %
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		72.29 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0.00 %
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0.00 %
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	65.42 %
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.50 %
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.33 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100 %
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100 %
20	Dinas Pariwisata		71.53 %
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	52.78 %
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	106 %
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0.00 %
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	83.33 %
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	83.33 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50.00 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 %
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
21	Dinas Pertanian		80.92 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	84.76 %
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	66.67 %
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	103 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	50.00 %
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0.00 %
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	150 %
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100 %
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100 %
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100 %
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	51.85 %
		Pengembangan Prasarana Pertanian	0.00 %
		Pembangunan Prasarana Pertanian	104 %
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100 %
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 %
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0.00 %
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
22	Sekretariat Daerah		87.46 %
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	84.57 %
		Administrasi Tata Pemerintahan	98.15 %
		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	66.67 %
		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	88.89 %
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	74.55 %
		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	92.16 %
		Administrasi Pembangunan	50.00 %
		Pengadaan Barang dan Jasa	81.48 %
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	90.74 %
		Penataan Organisasi	90.74 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %
23	Sekretariat Dewan		81.94 %
		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	83.33 %
		Layanan Administrasi DPRD	100 %
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	66.67 %
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	87.50 %
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.00 %
		Peningkatan Kapasitas DPRD	75.00 %
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.78 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	73.33 %
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00 %
		Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan	100 %
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		78.04 %
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.00 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.00 %
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	46.30 %
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	88.89 %
		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	0.00 %
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.00 %
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0.00 %
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0.00 %
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		80.89 %
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	72.79 %
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	106 %
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	83.33 %
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.56 %
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	75.00 %
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	75.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.31 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	84.62 %
26	Badan Pendapatan Daerah		92.32 %
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0.00 %
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0.00 %
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	87.31 %
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	87.31 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	131 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		DAERAH	
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.25 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	92.72 %
27	Badan Kepegawaian Daerah		80.07 %
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	90.77
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	82.50 %
		Mutasi dan Promosi ASN	95.83 %
		Pengembangan Kompetensi ASN	94.74 %
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	90.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	99.44 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	98.33 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.00 %
		Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0.00 %
28	Inspektorat Daerah		76.04 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	75.00 %
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50.00 %
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	53.13 %
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	0.00 %
		Pendampingan dan Asistensi	106 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
29	Kecamatan Pangururan		83.50 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.00 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.00 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.50 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.50 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.00 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
30	Kecamatan Simanindo		81.25 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.00 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.00 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.00 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.00 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
31	Kecamatan Palipi		97.43 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98.04 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.04 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	91.67 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	83.33 %
32	Kecamatan Nainggolan		77.81 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.83 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.33 %
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	108 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0.00 %
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0.00 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.74 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.74 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	107 %
33	Kecamatan Onanrunggu		68.83 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0.00 %
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.00 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	173 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0.00 %
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	0.00 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	117 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0.00 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	225 %
		Administrasi Keuangan	125 %
		Administrasi Umum	100 %
34	Kecamatan Ronggur Nihuta		98.96 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.83 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.83 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
35	Kecamatan Sianjur Mula-mula		85.42 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.67 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.67 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.00 %
		Administrasi Keuangan	50.00 %
		Administrasi Umum	100 %
36	Kecamatan Harian		97.12 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.46 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.46 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	100 %
37	Kecamatan Sitio-tio		82.81 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.33 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.33 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.00 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.00 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.92 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	95.83 %
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		87.01 %



No	Nama	Program/Kegiatan	Tingkat
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	33.76 %
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	33.76 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.43 %
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71.43 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	90.74 %
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	90.74 %
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	93.33 %
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	93.33 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.56 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Administrasi Keuangan	100 %
		Administrasi Umum	86.67 %
REKAPITULASI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			85.11 %

Sumber: Evaluasi terhadap RKPD 2021

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2021, pada dasarnya kurang berjalan dengan baik hal ini diakibatkan adanya pengurangan Dana Transfer Dari Pusat dan juga refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, hal ini mungkin akan berpengaruh kepada capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2021. Dari pencapaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Untuk lebih jelasnya, pencapaian tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.72

Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Misi I					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, berorientasi pada pelayanan publik					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Daerah	A	BB*	87,73%*



2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya daya saing pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,0	3,16	105%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks tata kelola pemerintahan desa	90%	92,54%	102,8%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan IKM Kategori "Baik"	81	84,34	104%
Misi II					
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas					
6	Meningkatnya Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	68,55	69,37	101,19%
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Nilai UN Pendidikan Dasar	47	N/A	-
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,5	71,41	101,2%
9	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase menurunnya penduduk miskin	8,5	12,68	50,82%
		Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	0,5	0,21	42%
MISI 3					
Mengembangkan perekonomian berbasis pariwisata dan pertanian secara berkelanjutan					
10	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	6,17	4,95	80,2%
11	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	15%	8,31%	55,4%
12	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,87%	0,7%	119,54%
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	75-85	51,82	69,09%
		Indeks Kualitas Udara	50-80	91,68	114,6%
		Indeks Tutupan Lahan	50-70	54,23	108,46%
MISI 4					
Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar berwawasan lingkungan					
14	Meningkatnya akses dan kualitas jalan strategis dan jembatan	Rata-rata Persentase panjang jalan dan jembatan pada ruas jalan strategis dalam kondisi baik	80%	77,99%	97,4%
		Waktu tempuh antar sentra kegiatan pertanian dan pariwisata	40 km	44,28 km	110,7%
15	Meningkatnya kualitas bangunan pelayanan publik	Persentase bangunan publik berfungsi baik	81%	88,08%	108,7%
16	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	82,86%	82,56%	99,6%



		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi layak	65%	52,39%	80,6
		Persentase jumlah layanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65%	52,39%	80,6

Sumber: Evaluasi terhadap RKPD 2021

Secara umum faktor penghambat yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Pembangunan Tahung Anggaran 2021 adalah :

1. Belum sesuai kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
2. Belum sesuai rencana program dan kegiatan P-RKPD Tahun 2021;
3. Kapasitas output kegiatan dalam mengungkit indikator sasaran dirasa masih belum cukup apabila disupport oleh sentuhan P-APBD Kabupaten Samosir saja, sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain (APBD Kab, APBN, Swasta, dan Masyarakat);
4. Tingkat serapan anggaran yang rendah akibat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan aplikasi Pemerintah Pusat belum maksimal, berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya;
5. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

a. Pendidikan

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabuapten Samosir

Tabel 2.73
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2021	Target Kinerja
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 sampai 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63,25	63
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7 sampai 15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,87	97,86



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2021	Target Kinerja
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0	100

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir 2021

b. Kesehatan

Penerapan SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir dan RSUD dr. Hadrianus Sinaga Panguruan, Puskesmas se-Kab.Samosir.

Tabel 2.74
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021 (%)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	68,93
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	70,94
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	68,41
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
6	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	78,82
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	18,83
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	53,41
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100 %
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100 %
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	58,32

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir 2021

c. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Realisasi SPM Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Samosir pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.75
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Realisasi
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum dan ditegakkannya perda 2 Jumlah Pengaduan yang ditangani 156 kasus Jumlah Pengaduan yang dilaporkan 156 kasus	100%



NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Realisasi
2	Pelayanan informasi rawan bencana	3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0 %
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5 Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	6 Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir 2021

d. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab.Samosir pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.76

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	55%	52,39%

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir 2021

e. Urusan Sosial

Realisasi SPM Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.77

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	indikator	target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara peyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	42,31 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	42,31 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	400 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	-



No	Jenis Pelayanan Dasar	indikator	target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100 %

Sumber: LPPD Kabupaten Samosir 2021

3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. Perpres tersebut memuat: (1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; dan (3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Jumlah indikator TPB Kabupaten Samosir berdasarkan pilar TPB yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (*cross cutting*), terdapat 194 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Samosir. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Capaian TPB per masing masing Pilar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78

Capaian TPB Kabupaten Samosir Berdasarkan Pilar

No	Pilar	TPB	Kondisi TPB		
			Mencapai Target (indikator)	Belum Mencapai Target (indikator)	Tidak ada Data (indikator)
1	Sosial	1	11	11	1
		2	6	4	1
		3	23	5	3
		4	7	4	2
		5	7	6	1
2	Ekonomi	8	4	8	6
		9	9	1	1
		10	3	4	1
		17	7	2	2
		7	0	1	5
3	Lingkungan	6	8	2	6
		11	3	3	2
		12	0	3	1
		13	2	0	0
		14	0	0	0
4	Hukum dan Tata Kelola	15	0	1	2
		16	4	2	10
Jumlah			94	57	43

Sumber : KLHS Kabupaten Samosir



2.6 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Samsir baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Samsir yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Permasalahan yang muncul juga berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Samsir yang disajikan pada Bab 2 dokumen ini.

Berdasarkan kondisi diatas, maka permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan Kabupaten Samsir adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Samsir sudah masuk dalam tahap pengembangan daya saing pendidikan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Samsir adalah Masih rendahnya daya saing pendidikan, dimana pada tahun 2021 persentase Akses Pendidikan di kabupaten Samsir adalah sebesar 69,37 persen. Hal ini disebabkan oleh Masih rendahnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang terstandar dan Belum Optimalnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelajar kurang mampu dan berprestasi.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan mendasar yang harus diselenggarakan dengan baik guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Samsir masih menghadapi permasalahan Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti belum terpenuhinya Universal Health Coverage, bahwa pada Tahun 2021 jumlah peserta PBI JKN di Kabupaten Samsir pada Tahun 2021 sebanyak 84,5 persen, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS, masih tingginya angka stunting, data tahun 2021 di Kabupaten Samsir, angka Stunting sebesar 28,4 persen sesuai dengan sumber data yang didapat dari Survey Status Gizi Indonesia.

c. Sosial

Kesejahteraan sosial di Kabupaten Samsir masih menjadi permasalahan. Kondisi ini terlihat dari tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Fakir miskin dan lanjut usia terlantar merupakan jenis PPKS yang paling banyak di Kabupaten Samsir. Permasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samsir yang harus diselesaikan. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Sosial diantaranya sarana sosial adalah sarana sosial seperti panti sosial tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni sebanyak 3 buah, persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial cenderung



mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni tahun 2017 sebanyak 34,31 persen menjadi 32,24 persen pada tahun 2021.

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar. Salah satu persoalan yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan adalah belum terjaminnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan jembatan. Sementara itu, sub-urusan penataan ruang dan bangunan belum terselenggara dengan baik disebabkan oleh masih belum optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan, implementasi dan pengendalian. Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah rendahnya kesiapsiagaan bencana yang disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bangunan-bangunan pengendali bencana. pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pada capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya adalah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni 56,60 persen menjadi 55,79 persen. Luas irigasi dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 90,34 persen pada tahun 2021 menjadi 83,06 persen, kawasan kumuh 1,08 persen, persentase jumlah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten sebesar 52,39 persen.

e. Pertanian

Pada urusan pertanian, masalah pokok yang dihadapi adalah kurangnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah Rendahnya nilai tukar petani dan akar masalah Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani dan Rendahnya pengembangan benih varietas unggul dan pemberantasan hama penyakit. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 5,20 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 4,79 ton/ha, produktivitas jagung atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 5,37 ton/ha dan pada tahun 2021 menjadi 5,40 ton/ha. Produktivitas ubi kayu atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar juga cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar 28,44 ton/ha menjadi 25,60 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas kacang tanah atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 1,77 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 1,20 ton/ha pada tahun 2021, produktivitas ubi jalar per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yakni sebesar 23,01 ton/ha pada tahun 2017 menjadi 20,6 ton/ha pada tahun 2021. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 51,17 persen menjadi 51,00 persen pada tahun 2021 dan Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sampai tahun 2021 telah mencapai 43,32 persen.

f. Pariwisata

Pada urusan pariwisata, masalah pokok yang dihadapi adalah belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan akar masalah Belum adanya objek wisata unggulan yang memenuhi standar nasional, Belum optimalnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata dan Kurangnya akses menuju destinasi wisata. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung tidak mengalami perubahan yakni 3 buah.



g. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, masalah yang dihadapi adalah masih rendahnya daerah yang tangguh bencana di Kabupaten Samosir dan belum optimalnya penanganan bencana cepat dan tepat. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 daerah yang tangguh bencana sebesar 0 persen dan penanganan bencana cepat dan tepat sebesar 50,44 persen.

h. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup unik dan beragam. Oleh karena itu, pelestarian budaya merupakan agenda penting yang harus dilakukan dalam rangka menjaga budaya lokal. masalah pokok yang dihadapi adalah Kelestarian Kebudayaan asli mengalami degradasi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah Belum optimalnya pengenalan budaya karena Kurangnya implementasi kebudayaan asli dalam kehidupan sehari-hari dan belum optimalnya penggalian ritus-ritus budaya. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi capaian Persentase kebudayaan non benda yang lestari pada tahun 2021 sebesar 61,9%, Persentase kebudayaan benda cagar budaya dan benda diduga cagar budaya yang lestari sebesar 50 % dan Persentase kelompok seni dan budaya yang mempunyai legalitas sebesar 2,58%

i. Reformasi birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP selama 3 tahun berturut-turut, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal.

2.7. Isu Strategis

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP. Maka **isu strategis Kabupaten Samosir Tahun 2023** adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Kurangnya Inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat
3. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dampak Covid-19
4. Rendahnya Kualitas Hidup Sosial Masyarakat
5. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
6. Rendahnya Daya Saing Pendidikan
7. rentannya pandemi Covid-19 dan bencana lainnya
8. Kelestarian Budaya Asli mengalami degradasi
9. Kurang optimalnya sarana prasarana publik
10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis pada RKPD Kabupaten Samosir tahun 2023 sudah konsisten dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, permasalahan pembangunan, isu strategis dalam RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara dan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.79**

Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2023

Permasalahan RKPD 2023	Isu Strategis RKPD	Prioritas Kabupaten
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial 4. Pekerjaan Umum dan penataan Ruang 5. Pertanian 6. Pariwisata 7. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 8. Kebudayaan 9. Reformasi Birokrasi	1. Tingginya angka kemiskinan 2. Kurangnya Inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat 3. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dampak Covid-19 4. Rendahnya Kualitas Hidup Sosial Masyarakat 5. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat 6. Rendahnya Daya Saing Pendidikan 7. rentannya pandemi Covid-19 dan bencana lainnya 8. Kelestarian Budaya Asli mengalami degradasi 9. Kurang optimalnya sarana prasarana publik 10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan 2. Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam 3. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur 5. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Samosir yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional. Kebijakan ekonomi Kabupaten Samosir pada Tahun 2023 disusun dengan lebih memperhatikan kondisi perekonomian Tahun 2021 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Arahan atau kondisi perekonomian nasional dan provinsi di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional) dan RPJMN serta RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Global

Menurut laporan *Global Economic Prospects* terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada Tahun 2021. Pada tahun 2023, Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang. Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5 persen pada 2021 menjadi 3,8 persen pada 2022 dan 2,3 persen pada 2023.

Laju pertumbuhan ini diperkirakan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara ini. Namun, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, semua ekonomi maju akan mencapai pemulihan output penuh; namun output di negara berkembang akan berada 4 persen di bawah level pra-pandemi. Bagi banyak ekonomi yang rentan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan akan terasa lebih besar. Perekonomian negara yang terdampak konflik diperkirakan lebih rendah 7,5 persen dari level pra-pandemi, sedangkan di negara-negara kepulauan diproyeksikan lebih rendah 8,5 persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan tekanan inflasi yang sangat memukul pekerja berpenghasilan rendah akan menghambat kebijakan moneter. Secara global dan di negara maju, inflasi berjalan pada level tertinggi sejak 2008. Di negara berkembang, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2011. Banyak negara berkembang menarik dukungan kebijakan untuk menahan tekanan inflasi, padahal laju pemulihan ekonomi belum selesai. memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melemah dari 5,9% di tahun 2021 menjadi 4,4 persen di tahun 2022. Prediksi ini disampaikan IMF dalam laporan terbarunya *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2022.

International Monetary Fund (IMF) menilai pelemahan ekonomi global setahun ke depan akan dipengaruhi risiko penyebaran Covid-19 varian Omicron, gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi, ketegangan geopolitik, serta ancaman



bencana alam terkait perubahan iklim. Kendati demikian, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara akan tetap stabil bahkan meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India tahun 2022 diproyeksikan stabil seperti tahun 2021, yakni di level 9 persen. Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,6 persen menjadi 6,3 persen, Spanyol tumbuh dari 4,9 persen menjadi 5,8 persen, Malaysia tumbuh dari 3,5 persen menjadi 5,7 persen, Mesir tumbuh dari 3,3 persen menjadi 5,6 persen, Indonesia tumbuh dari 3,3 persen menjadi 5,6 persen, dan Arab Saudi tumbuh dari 2,9 persen menjadi 4,8 persen. Ada juga beberapa negara yang diramalkan mengalami penurunan PDB namun tetap terhitung cukup kuat di skala global, yaitu China dari 8,1 persen menjadi 4,8 persen, Inggris dari 7,2 persen menjadi 4,7 persen, dan Polandia dari 5,4 persen menjadi 4,6 persen. Untuk menghadapi tantangan ekonomi tahun 2022, IMF mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi, mengencakan vaksinasi Covid-19, memperkuat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi untukantisipasi bencana perubahan iklim, serta menjaga likuiditas melalui kerja sama internasional.

2. Kondisi Ekonomi Nasional

Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen di 2023. "Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2023 tentunya menjadi faktor penting.

Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, sebut Febrio, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 55,18 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,61 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,93 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,46 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,99 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 persen; Konstruksi sebesar 0,27 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,26 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,77 persen; diikuti oleh



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,18 persen; Real Estate sebesar 0,07 persen; dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,84 persen.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,18 persen; yang diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar -1,52 persen, dan PMTB -0,36 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari komponen lainnya sebesar 4,99 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,90 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen.

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta HBKN Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.30-4.30 % dan Tahun 2022 tercatat sebesar 4.50-5.50%.
2. Berdasarkan hasil rakortek yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Target Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,4 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis (*high scenario*) sebesar 5,00-5.40% dengan nilai tengah 5,20%. Namun, akibat pandemi covid-19 yang masih belum teratasi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 10 Kab/Kota dengan kasus tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menjadi 3,00-4,00% dengan nilai *middle* sebesar 3,50 % dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,00-5,00% (*low scenario*) dengan nilai *middle* 4,50%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Realisasi Pertumbuhan Tahun 2020, 2021 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)			
	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,95	3,87	4,87	3.40 - 4.40
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,31	1,92	2,92	2.50 - 3.50
C. Industri Pengolahan	-0,84	1,43	2,43	2.80 - 3.80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,93	3.80 - 4.80



Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)			
	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	3,79	3,62	4,62	3.50 - 4.50
F. Konstruksi	-3,42	2,18	3,18	3.30 - 4.30
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,94	3,62	4,62	3.80 - 4.80
H. Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	-2,63	3.40 - 4.40
I. Akomodasi dan Makan Minum	-9,26	-0,81	0,81	4,60 - 5.60
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,51	5.70 - 6.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	5,46	4.00 - 5.00
L. Real Estate	1,57	2,50	3,50	2.90 - 3.90
M,N. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	0,14	2.00 - 3.00
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	0,73	2,08	3,08	4.50 - 5,50
P. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	4,05	3,00 - 4,00
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	1,25	3.00 - 4.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-3,74	1,43	2,43	3.50 - 4.50
PDRB	-1,07	2,61	3,13	4,00-5,00

Sumber : Berita Resmi Statistik, 07 Februari 2022

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2023, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2021 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel di berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

Tabel 3.2
Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)				
	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET		
	2020	2021	2022	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	1,69	2,60 - 3,60	3,60 - 4,60	4,60-5,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	0,60 - 1,60	1,60- 2,60	2,60-3,00
3. Pengeluaran Konsumsi	-1,69	3,46	2,10 - 3,10	3,10 - 4,10	4,10-4,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,47	1,60 - 2,60	2,60 - 3,60	3,60-4,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-10,31	15,09	8,70 - 9,70	9,70 - 10,70	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-14,87	18,34	3,60 - 4,60	4,60 - 5,60	4,00-4,40
P D R B	-1,07	2,61	3,00 - 4,00	4,00-5,00	5,00-5,40

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2021



Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

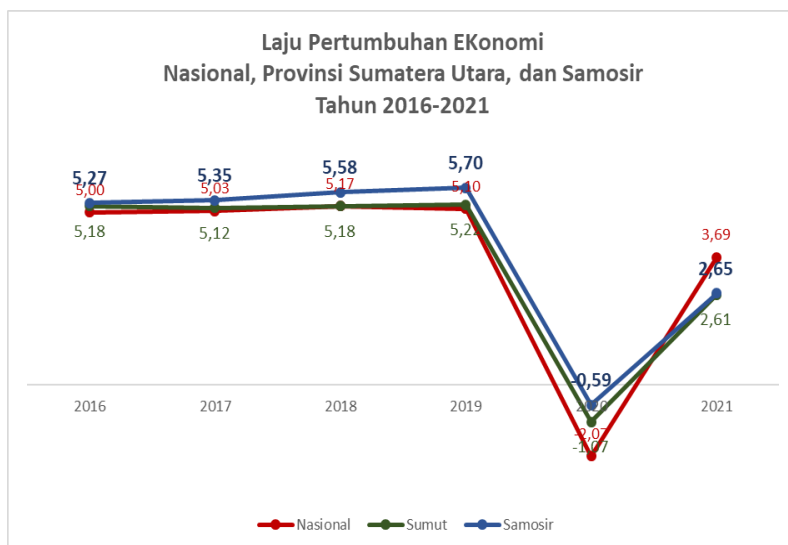
4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Samsir

Kondisi perekonomian Daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi, diantaranya:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Indeks gini
- c. Tingkat kemiskinan
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka
- e. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samsir Tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari -0,59 persen menjadi 2,65 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa sektor ekonomi seperti sektor pariwisata dan sektor pertanian. Grafik 3.1 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samsir lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara (2,61 persen) dan dibawah ekonomi Nasional (3,69 persen).



Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Samsir, Provsu dan Nasional

Grafik 3.1
Pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara, Nasional
Sumber: BPS

Bila dilihat dari pertumbuhan menurut lapangan usaha, hampir semua dari seluruh total kategori lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,46 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar -1,16 persen. Pertumbuhan tertinggi yakni lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,76 persen, jasa keuangan dan



asuransi sebesar 5,84 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,21 persen dan lapangan usaha lainnya tumbuh positif dibawah 5 persen. Hal ini dapat kita lihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.3

Laju pertumbuhan ekonomi riil menurut lapangan usaha 2016-2021 (persen).

LAPANGAN USAHA		ADHK						Proyeksi 2023
		2016	2017	2018	2019	2020*)	2021**)	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,97	5,31	5,22	4,63	-0,28	2,51	2.761
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,00	7,61	6,48	5,81	2,43	3,01	3.311
3.	Industri Pengolahan	2,65	2,7	2,57	3,42	1,09	1,67	1.837
4.	Pengadaan listrik dan gas	2,30	3,4	2,35	3,39	5,61	4,8	5.28
5.	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	5,70	5,78	3,6	4,31	3,11	2,04	2.244
6.	Konstruksi	6,92	7,15	10,93	8,16	-3,35	4,83	5.313
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6,97	4,99	4,72	6,15	-0,42	5,21	5.731
8.	Transportasi dan pergudangan	7,95	7,84	6,91	9,87	-3,81	2,02	2.222
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,90	7,92	7,43	9,83	-2,86	0,03	0.033
10.	Informasi dan Komunikasi	7,61	7,65	7,3	9,01	8,55	7,76	8.536
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	4,74	4,84	4,7	4,96	3,8	5,84	6.424
12.	Real estat	5,60	5,58	3,07	4,24	3,97	0,4	0.44
13.	Jasa Perusahaan	5,24	5,57	3,89	4,33	2,75	2,94	3.234
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,70	2,3	2,38	4,9	-0,30	-0,46	0.506
15.	Jasa Pendidikan	6,00	5,96	5,97	5,56	4,57	4,65	5.115
16.	Jasa kesehatan dan Kegiatan sosial	5,60	5,67	5,68	6,05	-0,13	-1,16	1.276
17.	Jasa lainnya	6,47	5,58	6,07	7,84	-0,27	2,85	3.135
PDRB		5,27	5,35	5,58	5,7	-0,59	2,65	3,1

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

***) angka sementara**

*****) angka sangat sementara**

Pendapatan per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kabupaten Samosir selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung tidak stabil hal ini dapat kita lihat selama tahun 2019 s.d 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Samosir terus mengalami penurunan sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3 dibawah ini.



Tabel 3.4
Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Samosir

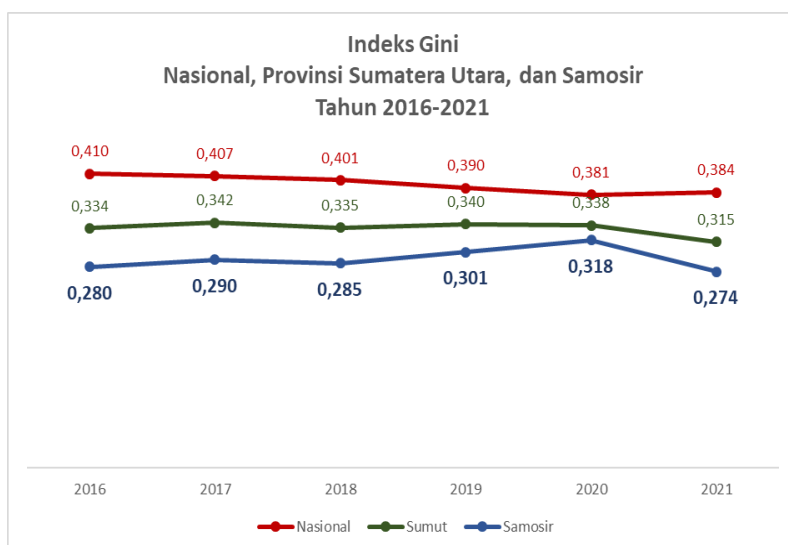
PDRB	ADHB					
	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021
1. Nilai PDRB ADHB (Triliun rupiah)	3,44	3,75	4,08	4,43	4,54	NA
2. Penduduk (jiwa)	124.496	125.099	125.816	126.188	136.441	NA
PDRB per kapita ADHB (Juta rupiah)	27,6	29,9	32,4	35,1	33,4	NA

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022
*) angka sementara

b. Indeks Gini

Indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan penduduk di suatu daerah atau dengan kata lain, indeks gini mengindikasikan kelompok masyarakat mana yang diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi. Jika indeks gini suatu daerah mendekati 1, berarti hanya penduduk kaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika indeks gini mendekati 0, maka pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua kelompok pendapatan masyarakat. Kategori penilaian pada indeks gini adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang, dan $G > 0,50$ mengindikasikan ketimpangan yang tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Samosir selama 5 tahun terakhir membaik dari yang semula berada pada kategori sedang menjadi kategori rendah. Dengan angka perbandingan Gini-nya relatif menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Indeks Gini di Kabupaten Samosir dari 0,318 menjadi 0,274 angka ini menurun sebesar 0,044. Artinya pengeluaran penduduk masih pada kategori tingkat ketimpangan pengeluaran rendah. Indeks Gini Kabupaten Samosir masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.



Gambar 3.2
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Samosir

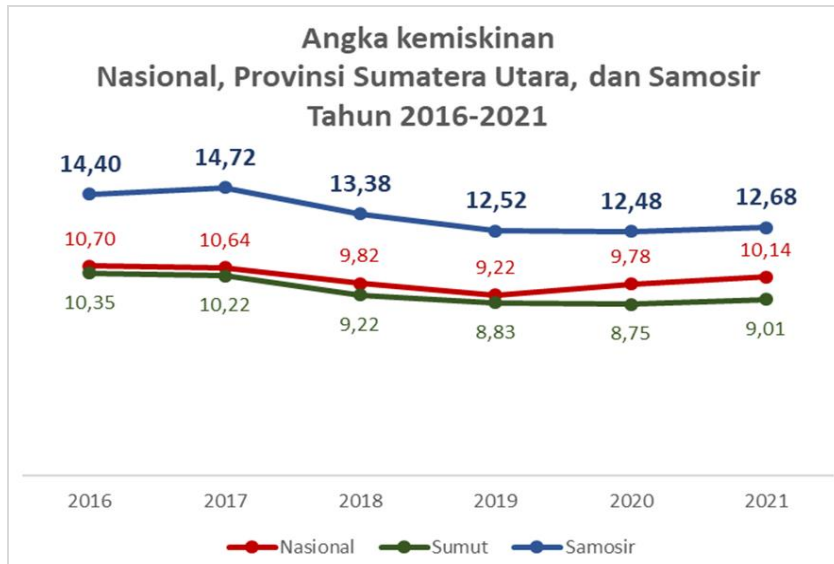
Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

c. Tingkat kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan membuat pemerintah harus berjabaku dalam menanganinya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 14,11 persen dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017 menjadi 14,72 persen. Pada tahun 2018-2020 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 menjadi 12,48 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 12,68 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda dan berdampak pada turunnya kunjungan wisata di Kabupaten Samosir sehingga menurunnya



pendapatan masyarakat. Kondisi kemiskinan Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada Grafik berikut ini :



Gambar 3.3
Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir,
Sumber: BPS Samosir, 2022

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada tahun 2021 angkatan kerja di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 74.458 jiwa (84,38 persen). Angkatan kerja yang bekerja adalah sebanyak 73.937 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 521 jiwa. Kemudian penduduk yang tergolong bukan angkatan Kerja adalah sebanyak 13.784 jiwa (15,62 persen), yaitu yang bersekolah sebanyak 3.758 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 3.758 jiwa, dan melakukan kegiatan lainnya sebanyak 4.105 jiwa. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2021 adalah sebesar 0.07 persen.

Jika dibandingkan antara TPT Provinsi Sumatera Utara dengan TPT Kabupaten Samosir berbanding lurus pada tahun 2021 dimana TPT Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya sementara Kabupaten Samosir juga mengalami penurunan sebesar 0,50 dari tahun sebelumnya. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada grafik berikut ini :



Gambar 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir,
Sumber: BPS Samosir, 2022

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

e. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Samosir terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Samosir meningkat dari 65,81 pada 2011 menjadi 70,83 pada 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Samosir rata-rata tumbuh sebesar 0,77 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" sejak

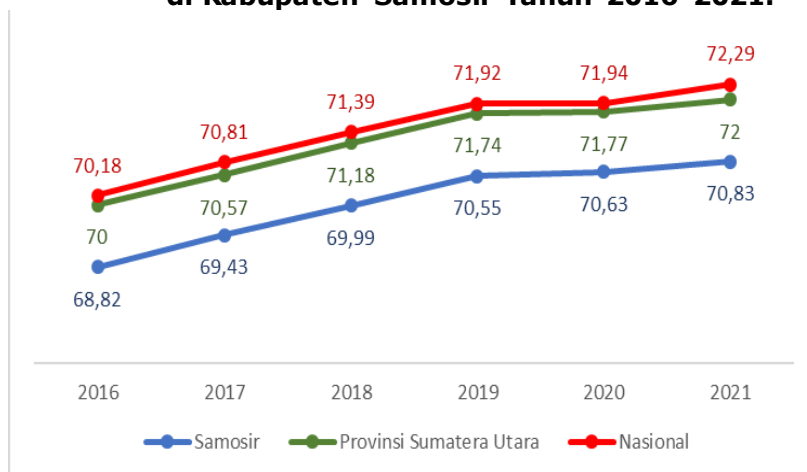


2019. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Samosir. IPM 2020 tercatat sebesar 70,63 atau tumbuh 0,11 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan IPM 2019 sebesar 0,80 persen. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, IPM mulai mengalami percepatan di 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Samosir 2021 adalah sebesar 70,83 atau tumbuh 0,28 persen (meningkat 0,20 poin) dibandingkan capaian IPM 2020. Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,97 persen dibanding 2020. Dari sisi pendidikan, pada 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan 2020 yang mencapai 13,47 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 9,43 tahun menjadi 9,44 tahun pada 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,41 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya IPM Kabupaten Samosir, seluruh kabupaten/kota lainnya juga mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Perubahan status terjadi pada Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pada 2021 mencapai status "tinggi". Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (61,99), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,21) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada 2021 adalah sebanyak 20, dengan status "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah 12, dan dengan status "rendah" (IPM < 60) sudah tidak ada lagi. Sejak 2018, tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia "rendah". Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir saat ini dapat terlihat seperti pada Grafik berikut ini :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021.



Grafik 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir,
Sumber:
BPS Samosir, 2022

Sumber : Samosir dalam angka tahun 2022

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam kurun satu tahun terakhir, ekonomi Indonesia terkontraksi akibat virus Covid-19 yang menginfeksi dengan sangat cepat. Pandemi yang berkepanjangan juga berdampak besar pada sektor ekonomi baik di level global, nasional, regional dan lokal. Dengan dimulainya program vaksinasi diharapkan mampu membawa dan mempercepat ekonomi Indonesia kembali tumbuh. Diharapkan hal ini juga berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian Kabupaten Samosir di Tahun 2023. Dalam rangka mempercepat kebangkitan ekonomi tersebut, diperkirakan perekonomian Kabupaten Samosir akan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:



- a. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akibat Covid-19 meningkat.
- b. Tingkat pengangguran meningkat karena dampak dari Covid-19.
- c. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami penurunan nilai produksi secara signifikan sebanyak akibat dampak Pandemi Covid-19.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi oleh IKM/UMKM dalam melakukan aktifitas produksi, distribusi dan pemasarannya (e-commerce). Fakta di lapangan ternyata masih banyak IKM/UMKM di Kabupaten Samosir yang belum familiar dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja produksi, distribusi dan pemasarannya.
- e. Permasalahan investasi, seperti keterbatasan lahan bagi investor, sering terjadi ketidaksesuaian lokasi investasi, lahan yang diminati para investor tidak sesuai dengan status peruntukan pemanfaatan lahan.
- f. Kurang minatnya masyarakat terutama generasi muda pada sektor pertanian dan sektor pariwisata. Banyak penduduk usia produktif di Kabupaten Samosir lebih memilih mencari pekerjaan di luar Kabupaten Samosir. Kurang minatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan kurangnya insentif dalam usaha tani ini. Selain itu, penguasaan lahan yang sempit dan tidak adanya akses terkait dengan lahan menyebabkan generasi muda enggan menekuni sektor pertanian ini.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Pemberian bantuan pupuk kepada petani, Dilakukan upaya peningkatan layanan pertanian yang telah ada baik melalui berbagai upaya sosialisasi, pendampingan dan bantuan alsintan kepada masyarakat petani yang ada di Kabupaten Samosir
2. Peningkatan layanan Kesehatan, Pandemi Covid-19 telah banyak menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan upaya peningkatan layanan Kesehatan yang telah ada baik melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19 disamping itu dilaksanakan juga Peningkatan pelayanan rumah sakit rujukan, penurunan prelevansi stunting serta layanan Kesehatan terhadap lansia.
2. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM dan IKM baru tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Peningkatan konektivitas infrastruktur (sentra produksi, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, daerah tertinggal) Dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata, aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan daerah tertinggal akan menurangi kesenjangan yang berpadat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi daerah, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan untuk tahun 2023 disusun untuk tetap mempertahankan stabilitas perekonomian. Tekanan di sektor pendapatan diperkirakan akan tetap terjadi baik pada tahun 2023 ini sehingga pengalokasian belanja akan lebih ketat dengan menggunakan prinsip *Money Follow Priority Program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan pemulihan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19 yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan sesuai tugas dan fungsi.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian berakhirnya Pandemi Covid-19, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan akan menyesuaikan sesuai keadaan yang terjadi. Sesuai dengan perkiraan bahwa masih akan adanya tekanan pada sektor pendapatan, maka keuangan daerah dan kerangka pendanaan tahun 2022 akan mengalami perubahan.

Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan struktur APBD, kebijakan keuangan



daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan: pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota); 3) Kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pendapatan diantaranya adalah;

- a. Nilai besaran pajak/retribusi daerah yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penurunan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
- c. Terbatasnya database wajib pajak dan aplikasi pengelolannya untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Kondisi beberapa obyek retribusi khususnya obyek wisata, yang kurang dikelola dan dikembangkan dengan baik yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk mengunjungi kembali ke obyek tersebut. Indikator yang dapat diamati dengan relatif kurangnya wisatawan di beberapa obyek wisata yang dikelola oleh daerah.
- e. Kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani pungutan pendapatan daerah yang masih terbatas. Pada beberapa sumber pendapatan tertentu, belum bisa tertangani sepenuhnya dikarenakan keterbatasan ini.
- f. Belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Samosir, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi informasi;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi;
5. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi;
7. Menyusun database dan membuat sistem informasi perpajakan/retribusi.
8. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan;
9. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni;
10. Merencanakan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, inovatif dan berdaya saing.



Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Dari kondisi yang terjadi saat ini, pendapatan Kabupaten Samosir tahun 2018 s.d 2021 dan proyeksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2021

<i>Uraian</i>	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan asli daerah	47.440.829.517,36	60.419.121.293,09	71.993.820.280,00	72.779.566.625
<i>Pajak daerah</i>	14.788.292.147,60	17.342.605.511,21	18.473.236.900,00	18.217.815.667
<i>Retribusi daerah</i>	5.035.312.250,00	4.519.328.545,00	9.256.792.960,00	8.615.415.000
<i>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>	2.714.607.460,00	4.533.993.582,00	5.000.000.000,00	5.058.583.046
<i>Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</i>	24.902.617.659,76	34.023.193.654,88	39.263.790.420,00	40.887.752.912
Dana Perimbangan	608.164.685.810,00	636.204.549.291,00	668.389.756.000,00	575.731.484.030,00
<i>Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak</i>	14.543.956.836,00	11.061.424.582,00	12.333.404.000,00	25.966.743.415,00
<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	453.737.230.000,00	465.249.052.000,00	470.064.939.000,00	413.694.824.957
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	139.883.498.974,00	159.894.072.709,00	185.991.413.000,00	137.442.587.659,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	147.099.777.609,00	188.389.164.470,00	185.648.713.249,00	215.137.309.210,00
<i>Hibah</i>	0,00	7.698.069.000,00	0,00	0,00
<i>Dana Darurat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya</i>	16.539.591.307,00	32.000.332.470,00	20.534.555.249,00	25.966.743.415,00
<i>Dana penyesuaian dan otonomi khusus</i>	112.734.959.749,00	148.690.763.000,00	165.114.158.000,00	163.789.321.000,00
<i>Bantuan keuangan dari provinsi</i>	17.825.226.553,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	802.705.292.936,36	885.012.835.054,09	926.032.289.529,00	852.922.385.204,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2021
dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Samosir

URAIAN	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Rencana Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	61,871,566,524.27	62,052,850,214.18
<i>Pajak daerah</i>	15,733,887,338.32	15,779,987,628.22
<i>Retribusi daerah</i>	4,555,511,977	4,568,859,627.09
<i>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>	5,058,583,046	5,073,404,694.32
<i>Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</i>	36,523,584,162.95	36,630,598,264.55
Pendapatan Transfer	765,487,548,445	768,024,589,943.57
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	739,520,805,030	741,981,763,970.36
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	25,966,743,415	26,042,825,973.21
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25,381,244,795	25,455,611,842.25
<i>Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan</i>	25,381,244,795	25,455,611,842.25
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	852,740,359,764.27	855,533,052,000.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas, berpengaruh pada kondisi belanja daerah. Arah kebijakan belanja daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja penanganan pandemi Covid-19 yang bersifat darurat dan mendesak.
- Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2023.
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.



Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow priority program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Belanja daerah juga akan dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak dan alokasi belanja diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2022 sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dari kondisi yang terjadi saat ini, belanja Kabupaten Samosir tahun 2018 s.d 2020 dan proyeksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2020

BELANJA	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
Belanja Tidak Langsung	434.702.631.763,00	489.937.667.143,00	528.680.745.716,14
<i>Belanja Pegawai</i>	286.877.239.255,00	320.420.999.605,00	319.099.614.951,72
<i>Belanja Hibah</i>	5.268.996.090,00	5.646.012.000,00	38.038.681.070,00
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	1.288.350.000,00	3.179.225.000,00	4.370.000.000,00
<i>Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa</i>	1.257.915.000,00	2.128.407.540,00	1.466.091.216,92
<i>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa</i>	138.498.749.418,00	157.590.921.998,00	151.924.718.776,50
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	1.511.382.000,00	972.101.000,00	13.781.639.701,00
Belanja Langsung	369.187.647.752,00	365.075.523.337,00	308.263.514.056,74
<i>Belanja pegawai</i>	24.347.774.145,00	21.956.031.600,00	26.328.605.399,00
<i>Belanja barang dan jasa</i>	158.564.928.705,00	179.025.657.358,00	174.070.012.589,41
<i>Belanja modal</i>	186.274.944.902,00	164.093.834.379,00	107.864.896.068,33
TOTAL BELANJA	803.890.279.515,00	855.013.190.480,00	836.944.259.772,88

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Tabel 3.8**

Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 Kabupaten Samosir

URAIAN	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Rencana Tahun 2023 (Rp)
Belanja Operasi	516,363,895,207.02	544,763,909,443.41
<i>Belanja Pegawai</i>	319,071,661,571.00	336,620,602,957.41
<i>Belanja barang dan jasa</i>	184,084,043,576.02	194,208,665,972.70
<i>Belanja Hibah</i>	4,473,409,228.00	4,719,446,735.54
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	8,734,780,832.00	9,215,193,777.76
Belanja Modal	145,760,961,570.29	153,746,196,717.94
<i>Belanja Modal Tanah</i>	1,203,045,487.00	1,269,212,988.79
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	44,469,305,684.00	46,915,117,496.62
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	31,533,915,741.92	33,268,281,107.73
<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	66,029,764,297.37	69,629,783,595
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	2,524,930,360.00	2,663,801,529.80
Belanja Tidak Terduga	153,454,447.00	161,894,441.59
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	153,454,447.00	161,894,441.59
Belanja Transfer	154,178,946,300.00	162,658,788,346.50
<i>Belanja Bagi Hasil</i>	2,773,002,900.00	2,925,518,059.50
<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	151,405,943,400.00	159,733,270,287.00
TOTAL BELANJA	816,457,257,524.31	861,330,788,949

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2022.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian;
3. Kekurangan belanja untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan sebagaimana terdapat dilampiran dipenuhi dengan pendanaan alternatif seperti dana CSR, kerjasama pihak ketiga, hibah pemerintah pusat dan provinsi, pinjaman daerah atau sumber lain peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.9.**

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2021

PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah				
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</i>	25.000.000.000,00	24.437.136.065,79	25.000.000.000,00	36.607.741.681,32
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>				
<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>				
<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>				
<i>Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00	24.437.136.065,79	25.000.000.000,00	36.607.741.681,32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo</i>	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00
<i>Penyertaan Modal Daerah</i>				
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>				
<i>Pemberian Pinjaman Daerah</i>				
<i>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</i>				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto (D - E)	21.000.000.000,00	20.437.136.065,79	21.000.000.000,00	32.607.741.681,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F + C)	19.815.013.421,36	50.436.780.639,88	110.088.029.756,12	68.890.843.921,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 dan
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Rencana Tahun 2023 (Rp)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	36,607,741,681.32	36,000,000,000
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</i>	36,607,741,681.32	36,000,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36,607,741,681.32	36,000,000,000
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,000,000,000	4,000,000,000
<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	4,000,000,000	4,000,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4,000,000,000	4,000,000,000
Pembiayaan Neto (D - E)	32,607,741,681.32	32,000,000,000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Samosir digali dari filosofi luhur nenek moyang bangso batak yang merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia, yaitu "Dalihan Na tolu" dengan pengertian sebagai berikut:

1. Dalihan artinya Tungku;
2. Na artinya yang/ke.
3. Tolu artinya Tiga.

Jadi jika dirangkai akan menjadi Dalihan Na Tolu yang diartikan Tungku yang tiga atau tungku yang memiliki tiga dasar penopang. Dalihan natolu terkenal di adat dan budaya batak. Yang memiliki arti tiga dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat orang batak. Dalihan natolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat batak yang didasari tiga asas pokok dasar yang dikenal dengan tiga istilah, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru. Filosofi pembangunan Kabupaten Samosir tersebut menjadi hal yang mendasar dalam menetapkan sasaran, prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir baik yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat *indikatif*. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2021 serta perkiraan pada tahun 2023 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 penentuan tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Samosir berdasarkan pada hasil sinkronisasi dan integrasi seluruh dokumen strategis perencanaan daerah Kabupaten Samosir serta perencanaan pembangunan tingkat provinsi sumatera utara dan dokumen perencanaan tingkat nasional tahun 2023 serta isu-isu strategis pembangunan yang harus segera ditangani yang menjadi prioritas di tingkat kabupaten. Sinkronisasi dan integrasi ini dilakukan agar arah pembangunan yang telah disusun dapat mewujudkan visi jangka panjang dan menengah yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Makna pembangunan dalam frasa pembangunan nasional ini lebih mengarah pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap masyarakatnya, supaya menuju perubahan sosial yang lebih baik. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu "**terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**".



Tujuan pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 dengan tujuan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Kesempatan kerja
3. Lapangan berusaha
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Nasional, dimana target Makro sasaran pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,3- persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 73,27-73,35
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 7,5- 8,5 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 5,3-60 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,375-0,278 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 27,02 juta Ton CO2

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut diturunkan untuk pencapaian program prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan *Major Project* Nasional sebanyak 8 (delapan) program pembangunan yakni sebagai berikut:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 8) Pembangunan Ibukota Nusantara,

2. Tujuan Dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi - misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi- misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki visi "**Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat**"

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-6,00persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,25 - 72,75
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8.80 - 7.80 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 6,30-5,30 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO2

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Samosir

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Visi RPJPD Kabupaten Samosir yang disusun adalah "**Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Internasional 2025**".

Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 adalah:



1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pariwisata dan pertanian secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas;
4. Mewujudkan masyarakat Samosir yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Kabupaten Samosir. Visi Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera Dan Bermartabat, Secara Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan”**

Maka dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir sesuai dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 menetapkan 12 Tujuan Pembangunan dengan Indikator Tujuan sebanyak 13 dan menetapkan 28 Sasaran Pembangunan dengan indikator sebanyak 43 dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2023. Keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir seperti berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	1 Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	nilai	CC
		1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	nilai	BB
		1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	opini	WTP
		1.3 Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,38
IGA (Indeks Government Award)	kategori		inovatif		

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

		1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik
2	Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,80
		1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	2,50
			Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7
		1.2 Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	14,6
		1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	65-75
		3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	62,06
			Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	62,06
			Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	61,00
			Persentase rumah layak huni	persen	87
			Persentase layanan air bersih	persen	64
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	4 Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	70,73
		1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,49
		1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,57
		1.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	68,51
			Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.878,75

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

		1.4 Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	17,8
--	--	---	---	--------	------

Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2023 menetapkan prioritas dan sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun yang menjadi sasaran dan target Indikator Makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,0 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 71,85
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 11,85 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 0,6 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,26 poin

Selanjutnya Tujuan dan sasaran Pembangunan yang tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan oleh Perangkat daerah berdasarkan sasaran dan target yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas

Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			SETDAKAB, BAPPEDA LITBANG, BPKPD, INSPEKTORAT, dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK			BPKPD, INSPEKTORAT
	Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			DISKOMINFO, BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD pengguna TI
		IGA (Indeks Government Award)			BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			Seluruh OPD pelayanan publik dan kecamatan



Misi II. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi			
	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian			DKPP, DISPUTR
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD			DISBUDPAR, DISPUTR, DISKOMINFO
	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM			DISKOP NAKERINDAG
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			DISLINGKUP
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap			DISPUTR
		Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik			DISPUTR
		Persentase rumah layak huni			DISPUTR
		Persentase layanan air bersih			DISPUTR
Misi III. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)			DISDIKPORA, SETDAKAB
	Meningkatnya Kualitas	UHH (Umur			DINKES, RSUD, DISP3A



	Kesehatan masyarakat	Harapan Hidup)			PPKB
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			DIDSIKORA, DISP3A PPKB
		Pendapatan Perkapita			DINSOSPMD
	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi			DISBUDPAR

4.2. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023

Disamping penetapan isu strategis Kabupaten Samosir dalam lima tahun kedepan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 untuk penetapan perencanaan tahun 2023, ditetapkan juga isu strategis Kabupaten Samosir yang akan mempengaruhi perencanaan tahun 2023 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Samosir yang perlu ditangani dalam pembangunan 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. Tingginya angka kemiskinan;
Covid 19 berdampak terhadap turunnya kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat pendapatan masyarakat akibat adanya pembatasan sosial mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Kurangnya inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat;
Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi serta akses dan konten informasi yang belum merata menyebabkan belum optimalnya penerapan pelayanan publik untuk pelayanan dasar dan perizinan (fasilitasi izin komoditi hasil koperasi Usaha tani, seperti label halal dan *brand*). Hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan teknologi inovasi SDM Aparatur dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dampak covid-19;
Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Terdapat 3 isu strategis dampak covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten samosir yaitu: menurunnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata serta menurunnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi akibat terganggunya sektor pariwisata serta menurunnya pendapatan daerah dari penerimaan pemerintah Pusat.
4. Rendahnya kualitas hidup sosial masyarakat;
5. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Samosir adalah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas disamping perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan akibat kurangnya sanitasi.
6. Rendahnya daya saing pendidikan;
Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya dapat mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar kecamatan.
7. Rentannya pandemi Covid-19 dan bencana lainnya;
8. Kelestarian Budaya Asli mengalami degradasi;



Kelestarian budaya sangat berpengaruh pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor Pariwisata sebagai penyumbang PAD sangat terdampak signifikan akibat adanya Pandemi Covid 19. Sektor ini terdampak akibat penurunan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Salah satu rantai produksi pada sektor ini adalah SDM

9. Kurang optimalnya sarana prasarana publik;
Sarana dan prasarana publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif. Dalam rangka peningkatan perekonomian untuk pemulihan pembangunan ekonomi pasca Covid19, percepatan peningkatan konektivitas transportasi jalan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pemulihan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Pemenuhan air bersih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.
10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN serta rendahnya inovasi dan kreativitas SDM aparatur mengharuskan Kabupaten Samosir untuk melakukan pengembangan dan pengoptimalan dalam penggunaan SPBE serta meningkatkan manajemen Aparatur.

Perumusan isu strategis Kabupaten Samosir tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Strategi Pembangunan Tahun 2023 akan dilaksanakan dengan konsep :

- Kebijakan Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Gagasan kerjasama Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara dan Pemerintah Atasan melalui Inovasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam upaya bersama untuk melakukan penyelesaian permasalahan masyarakat sekaligus pencapaian keberhasilan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing
- Money Follow Program Priority yaitu Penerapan pola *money follows program priority* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas dan keberhasilan pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

4.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan

Kebijakan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Samosir tahun 2023 menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yaitu:

- a. **Tematik** dimaknai bahwa tema RKPD Kabupaten Samosir tahun 2023 menjadi prioritas pembangunan tahun 2023 yang telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. **Holistik** artinya penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dalam suatu rangkaian kegiatan hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang diarahkan untuk menjawab tuntutan kineja daerah tahun 2023;
- c. **Terintegrasi** dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan dicapai melalui berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- d. **Spasial** dapat diartikan bahwa lokasi telah dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan.



Tabel 4.3

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN				
Misi	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi
				Pengoptimalan sistem <i>reward and punishment</i>
				Pengoptimalan penegakan disiplin oleh Tim Penegakan Disiplin
				Pengoptimalan sistem penargetan kinerja yang <i>smart-c (specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve)</i>
				Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah
				Pengembangan program/sistem yang terintegrasi antar OPD
				Peningkatan efisiensi belanja aparatur
			Pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan	Peningkatan alokasi belanja publik dan percepatan realisasi
				Penyederhanaan kelembagaan dan SOTK Perangkat Daerah sesuai bidang urusan dan kebutuhan
				Integrasi pengembangan dan peningkatan potensi unggulan berbasis pemberdayaan dan teknologi
			Perencanaan dan penganggaran berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
			Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	
Peningkatan kapasitas pejabat pengelola barang				



				Peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak ketiga/lembaga lainnya	
				Penempatan Pegawai berdasarkan <i>merit system</i>	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Pendampingan dan sosialisasi penatakelolaan keuangan	
				Peningkatan legalitas aset melalui pihak-pihak terkait	
				Peningkatan keakuratan status fisik aset terkini	
				Mapping dan pengaturan pemanfaatan aset di kabupaten Samosir	
		Meningkatnya inovasi	Penerapan SPBE berbasis proses bisnis.	Peningkatan infrastruktur SPBE	
				Optimalisasi SDM yang sesuai kebutuhan	
			Meningkatkan budaya inovasi daerah		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah
					Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana	Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah	
				Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan Publik	
Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i>	
				Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian	



				Optimalisasi sarana prasarana pertanian
				Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
				Optimalisasi diversifikasi produksi dan hasil pangan
				Pemasaran pariwisata berbasis TI yang inovatif
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan event pariwisata
				Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
				Peningkatan fasilitasi Perijinan Kepariwisata
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur untuk mendukung produksi dan tataniaga dalam menjamin ketersediaan pangan
				Peningkatan kualitas sarana prasarana kepariwisataan
			Pengintegrasian kepariwisataan berkelanjutan	Peningkatan sinergitas kepariwisataan berbasis agrowisata, ekowisata dan Geopark
		Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah		Pendampingan dan pembinaan pengelola koperasi dan pelaku UMKM (rumah solusi, klinik bisnis, dll)
			Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Pengutamakan produk UMKM berbasis ekonomi kreatif
				Penguatan kapasitas SDM melalui pendampingan pelaku pasar modern
				Fasilitasi pemasaran produk berbasis Teknologi Informasi
				Penyusunan regulasi Pembatasan pengembangan pasar modern baru dan pendampingan UMKM



				Penguatan regulasi pengembangan industri Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan pelaku pasar modern Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dan standarisasi produk IKM Replikasi teknologi IKM yang tepat guna
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Pengembangan penatausahaan penyediaan bank tanah Fasilitasi kerjasama investor dan pemilik lahan Peningkatan iklim investasi yang kondusif Penataan jejaring pemasaran Penataan infrastruktur perdagangan
			Pengintegrasian sektor pertanian yang mendukung sektor pariwisata (eko-wisata)	Optimalisasi promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis sentra produksi
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan Pengalihan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) melalui teknologi tepat guna Menjamin kualitas dan kuantitas air Danau Toba dan mencegah terjadinya banjir bandang Kerjasama pengolahan dan pengelolaan B3 dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Konservasi lahan berkelanjutan Pengendalian dan pengalihan penggunaan pupuk kimia menjadi



				pupuk organik/ramah lingkungan
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
				Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras perhubungan
				Penyediaan akses informasi dan telekomunikasi pada pusat - pusat pelayanan publik
				Konservasi dan penataan sumber-sumber air
				Peningkatan fungsi sarana prasarana distribusi air
				Peningkatan layanan air bersih
				Peningkatan layanan sanitasi dan air limbah
				Pembangunan jaringan listrik
				Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan
				Pengelolaan persampahan
				Pengoptimalan bantuan stimulan perumahan swadaya
				Peningkatan kualitas permukiman kumuh
				Peningkatan kualitas jalan lingkungan (\pm 500 meter dari dan menuju permukiman)
				Penataan lingkungan permukiman sesuai dengan tata ruang
				Legalisasi perda Bangunan dan Gedung
				Pembangunan Gedung kantor
				Penyusunan regulasi alih fungsi lahan
				Pengadaan lahan/tanah
				Pengamanan fungsi dan pengelolaan batas



				sempadan danau Penyediaan RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Penyediaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Samosir Peningkatan ketahanan daerah
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
				Bantuan pendidikan /beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi
			Peningkatan daya saing pendidikan	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
				Peningkatan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dan pelaksanaan redistribusinya
				Bantuan kepada tutor PAUD dan alat peraga edukatif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
				Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan reproduksi
				Peningkatan pelayanan visitasi kehamilan/kelahiran
				Peningkatan sarana-prasarana fasilitas kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan
				Peningkatan Pengawasan obat dan makanan
Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan lingkungan (STBM-L)				
Penyelenggaraan UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)				



				Pemberian asupan gizi tambahan kepada balita/masyarakat
				Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
				Peningkatan penyuluhan kesehatan pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS)
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Peningkatan kompetensi pencari kerja baru sesuai dengan standar dan kebutuhan
				Penyediaan sarana publik yang responsif gender dan pengarusutamaan gender
				Penyediaan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
				Peningkatan kemampuan literasi hak perempuan dan anak
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/masyarakat
				Peningkatan dan pengembangan produktivitas BUMDes berbasis potensi lokal
				Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat
				Penyediaan sarana prasarana olahraga
				Peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga
				Penelusuran dan pembinaan minat dan bakat olahraga
				Penyelenggaraan kalender event tetap olahraga
				Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan



				pemuda
				Peningkatan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan/penguatan budaya Samosir	Peningkatan implementasi nilai budaya pada kehidupan sehari-hari
				Penggalian dan penelusuran ritus-ritus budaya
				Revitalisasi kelembagaan adat
				Pengoptimalan konservasi situs budaya

4.4 Prioritas Pembangunan

1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut diturunkan untuk pencapaian program prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional sebanyak 8 (delapan) program pembangunan yakni sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2023 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan penting yang dilakukan antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

- pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat "padat karya" di sektor energi, mineral dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan kebijakan feed-in tariff, pengurangan bea impor, relaksasi TKDN, dan pemberian insentif; (b) pembangunan "strategi memanfaatkan tangki *idle* di kilang-kilang tua yang tidak berproduksi serta pemanfaatan sumur-sumur lapangan tua yang telah tidak berproduksi sebagai storage untuk minyak mentah (*crude oil*) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri;
- penguatan Perhutanan Sosial berupa *agroforestry*, *silvopasture*, dan *silvofishery* untuk mendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan;
- revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok online dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d) perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan; (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; dan (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
- pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi dunia usaha dalam melakukan re-hiring dan re-training tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi; (d) peningkatan ekspor melalui relaksasi lartas impor tujuan ekspor, perluasan akses pendanaan ekspor, perluasan pasar ekspor yang didukung inquiry handling, peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri, serta optimalisasi PTA/FTA/CEPA; (e) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri; (f) peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat, pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan TIK; (g) percepatan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) prioritas; (h) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan; dan (i) transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-sektor strategis di beberapa kawasan;
- pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif tiket pesawat dan pengaturan hari libur nasional;
- (b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara melalui misi penjualan dan paket tur bersubsidi yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/wholesaler; (c) dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (MICE pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata; (e) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerja sama rantai pasok, serta pelatihan sertifikasi-penempatan SDM; dan (f) peningkatan penumbuhan usaha kreatif/start-up yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar; serta
- peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b) percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan,



pariwisata dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi; dan (d) perluasan positive lists investasi.

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan Wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Kerangka prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pengembangan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial.
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.



Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi.

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Prioritas Nasional 8 Pembangunan Ibukota Nusantara

Tema RKP 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema dari RKP 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"



2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan a) RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; b) Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023; c) Hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 (evaluasi RKPD 2019); d) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; serta e) Kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan daerah pasca pandemi COVID-19.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Visi-misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi-misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 dimana masih terjadinya varian baru yang sempat memengaruhi kondisi masyarakat sehingga prioritas pembangunan lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan diatas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023** adalah **"Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023

Agar dapat terlihat keterkaitan antara isu strategis dan penentuan Prioritas Pembangunan dalam RKPD kabupaten Samosir Tahun 2023, berikut tabel konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis daerah.



Tabel 4.4

Konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruhnya masyarakat miskin tercover layanan PBI-BPJS kesehatan • Dampak Covid-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan • Belum optimalnya akses maupun penggunaan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian • Kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah • Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja • Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM • Manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM masih rendah • Kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah • Kurangnya pengembangan hasil industri lokal • Belum optimalnya pemasaran produk lokal ke luar daerah • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan) • Belum idealnya distribusi dan ketersediaan guru antar wilayah kecamatan • Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas • Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan 	<p>Tingginya Angka Kemiskinan</p> <p>Kurangnya Inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat</p> <p>Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi</p> <p>Rendahnya Kualitas Hidup Sosial Masyarakat</p> <p>Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Rendahnya daya Saing Pendidikan</p>	<p>1. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan</p>



Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
<p>lingkungan akibat kurangnya sanitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil , bersalin dan balita 		
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam • Belum tersedianya database identifikasi daerah rawan bencana • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan pencegahan bencana 	<p>Rentannya Pandemi Covid 19 dan Bencana lainnya</p>	<p>2. Pencegahan dan Penanganan bencana alam non alam</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya asli 	<p>Kelestarian Budaya Asli yang mengalami degradasi</p>	<p>3. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik • Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya • Akses penyediaan air bersih yang masih jauh dari memenuhi • Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada • Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten samosir • Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih (membuang sampah pada tempatnya) 	<p>Kurang optimalnya sarana dan prasarana publik</p>	<p>4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur</p>



Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik • Penggunaan SPBE yang belum optimal 	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5. Percepatan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Samosir ini, Pemerintah Daerah harus tetap melaksanakan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat yang harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, meskipun dilakukan dengan standar minimal yakni meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Tema RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2021 yakni: **Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan.** Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperhatikan arah kebijakan Nasional serta mempedomani sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mencapai target-target Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Samosir, maka metode pengembangan dilakukan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pariwisata dilakukan dengan;
 - a. Mengidentifikasi jenis wisata yang ada, dengan optimalisasi asset:
 - Asset berwujud yakni : Gunung, pegunungan, danau, pantai, sungai, lembah dan hutan.
 - Asset tidak berwujud yakni : situs dan budaya.
 - b. Pengembangan daya Tarik wisata di kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan dengan analisa potensi yang dimiliki, misalnya:
 - Danau kanal sebagai waduk kecil penampung air untuk kebutuhan pertanian sekaligus dimanfaatkan sebagai objek wisata, yang perlu dilakukan pengkajian sesuai potensi;
 - Pendakian;
 - Lomba Dragon boat, Lomba kayak;
 - Outbond (Pepohonan, Hutan, Bukit, dll);
 - Agrowisata;
 - Ekowisata;
 - Embung/danau kecil;
 - Atraksi budaya;
 - Pertunjukan;
 - Kekhususan (kekhasan) desa.
2. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pendidikan dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak mampu maupun yang berprestasi dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir maupun dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
3. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pertanian dilakukan dengan:
 - a. Kolaborasi dengan desa/kelurahan dalam penyediaan bahan baku rumah kompos melalui peningkatan manajemen persampahan. Desa/kelurahan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik sebagai bahan baku utama rumah kompos. Dengan demikian, selain kebersihan desa/kelurahan itu sendiri dapat dijaga, kebutuhan bahan baku rumah kompos melalui pemanfaatan sampah organik juga secara bersamaan dapat dipenuhi.
 - b. Sinkronisasi Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa dilakukan dengan:



- Membangun Rumah Kompos baru maupun mengaktifkan kembali Rumah Kompos yang sudah ada;
 - Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Kompos;
 - Penyediaan tenaga pendamping dalam pengelolaan rumah kompos yang dimanfaatkan melalui kegiatan 1 Desa 1 Penyuluh.
4. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor UMKM dilakukan dengan:
- a. Identifikasi komoditi unggulan dari 128 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Samosir. Komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan misalnya: kopi, jagung, kentang, kacang tanah, mangga, kemiri, andaliman dan bawang merah;
 - b. Menjaga ketersediaan komoditi unggulan yang dikembangkan menjadi bahan baku produk UMKM;
 - c. Produk UMKM hasil pengembangan dari komoditi unggulan tersebut kemudian dipasarkan melalui media digital dan konvensional.
5. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor infrastruktur dilakukan dengan:
- a. Kolaborasi dengan pemerintah Desa dengan mendorong program pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, air bersih dan sanitasi;
 - b. Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kabupaten dengan program pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa, melalui : pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Usaha Produksi (JUP);
 - c. Kolaborasi dengan Pemerintah Atasan dalam hal pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, persampahan dan jaringan telekomunikasi) baik di Desa dan Kabupaten melalui anggaran yang bersumber dari DAK, DID, BKP Provinsi;
 - d. Untuk optimalisasi mekanisme Kolaborasi dan Sinkronisasi (pada poin a, b, dan c) maka perlu didukung dengan program sirtunisasi desa melalui pemanfaatan alat berat.
6. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Kesehatan dilakukan dengan memberikan bantuan iuran BPJS kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tahapan sesuai target.

Dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir untuk dokumen RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang diselaraskan dalam pencapaian prioritas dan sasaran nasional yang selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas daerah dengan menetapkan 5 Prioritas Daerah yakni: 1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan; 2) Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam; 3) Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan; 4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur; 5) Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya kelima prioritas pembangunan Kabupaten Samosir ini dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan semua OPD se-Kabupaten Samosir. Adapun Program Prioritas Kabupaten Samosir tahun 2023 untuk mendukung visi dan misi Bupati Samosir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah I : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan

1. Menciptakan koperasi dan UMKM yang produktif;
2. Peningkatan produktivitas pertanian;
3. Menghadirkan enam produk UMKM berdasarkan potensi desa/kelurahan;
4. Ketersediaan pupuk dan bibit yang merata;
5. Peningkatan pasca panen pertanian melalui peningkatan peran teknopark;
6. Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu;
7. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan;
8. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
9. Peningkatan kelembagaan, keahlian dan kompetensi masyarakat.



- 2. Prioritas Daerah II** : Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
1. Pencegahan Pandemi Covid-19;
 2. Penanganan Pandemi Covid-19;
 3. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.

- 3. Prioritas Daerah III** : Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
1. Pengembangan kawasan pariwisata;
 2. Pelestarian budaya;
 3. Pembangunan pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat.

- 4. Prioritas Daerah IV** : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Dasar.

- 5. Prioritas Daerah V** : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1. Peningkatan manajemen aparatur;
 2. Pengembangan dan pengoptimalan penggunaan sistem SPBE.

Selanjutnya kelima prioritas pembangunan Kabupaten Samosir ini dijabarkan kedalam konsistensi Prioritas terhadap Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 4.5
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan	Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif	Mendorong penciptaan wirausaha baru (<i>entrepreneurship</i>) dan lapangan kerja baru (start up)	Jumlah wirausaha baru yang tercipta	
		Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal	Jumlah lapangan kerja baru yang dibentuk	
		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah produk lokal daerah yang dimanfaatkan	
		Pengembangan level UMKM (mikro ke kecil, kecil ke menengah, dst)	Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki daya saing	
	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
		Kajian dibidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan		Jumlah kajian yang dilakukan
		Penerapan dan inovasi teknologi pertanian		Jumlah inovasi teknologi



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
			pertanian yang diterapkan
	Menghadirkan Enam produk UMKM berdasarkan potensi desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat/ Poktan	Jumlah barang/ jasa memenuhi standar layak konsumsi yang dihasilkan masyarakat
		Pemberdayaan IKM dan UMKM	Jumlah produk IKM dan UMKM layak jual yang diproduksi
		Promosi produk UMKM melalui media digital/ media konvensional lainnya	Jumlah produk layak jual yang dipromosikan
	Ketersediaan Pupuk dan bibit yang merata	Ketersediaan Pupuk	Jumlah pupuk organik gratis yang diberikan untuk petani
		Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tepat waktu	Persentase pengawasan ketersediaan pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
		Pembangunan rumah kompos	Jumlah rumah kompos yang dihasilkan
		Pembangunan Penangkar Bibit bersertifikasi	Persentase ketersediaan bibit komoditi unggulan dibanding dengan kebutuhan
	Peningkatan Pasca Panen Pertanian melalui peningkatan peran teknopark	Standarisasi Keamanan pangan	Jumlah PIRT
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok masyarakat yang memproduksi pangan sumber daya lokal
		Fasilitasi Izin komoditi hasil Koorporasi Usaha Tani (label halal, PIRT, brand), dan komoditi usaha lainnya	Jumlah komoditi yang memiliki izin
		Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Samosir	Jumlah sarana dan prasarana BBI
		Peningkatan peran teknopark Samosir (canned food, packaging dan inovasi lainnya)	Persentase peningkatan kegiatan teknopark yang dilaksanakan



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat Kurang Mampu	Penyediaan BPJS Gratis dan Jamkesda	Persentase masyarakat yang mendapatkan BPJS gratis
		Pemberian Bantuan Sosial	Jumlah PMKS/PPKS yang mendapat bantuan
	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendidikan
		Peningkatan Kemampuan Guru, Pendirian dan Inisiasi Sekolah Vokasi/ Akademik komunitas	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih
		Bantuan pendidikan untuk pelajar berprestasi dan/atau tidak mampu	Jumlah pelajar yang mendapat bantuan
		Pemenuhan sarpras untuk sekolah & jaringannya	Jumlah sekolah yang tertangani
		Peningkatan literasi masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan
		Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis Kebudayaan	Jumlah materi dan metode pembelajaran kebudayaan yang dimuat dalam muatan lokal
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	Cakupan layanan Kesehatan bagi masyarakat
		Peningkatan Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan sarpras faskes yang terpenuhi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang handal	Rasio ketersediaan tenaga medis yang handal
		Pengoptimalan sistem pelayanan kesehatan	Jumlah SOP kesehatan yang diterapkan
		Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan layanan kesehatan



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan
		Penurunan kasus stunting	Prevelensi stunting
		Peningkatan pencegahan dan penurunan penyakit	Prevalensi sepuluh penyakit menular
	Peningkatan Kelembagaan, keahlian dan Kompetensi Masyarakat	Pembentukan Perusda di Kabupaten Samosir	Jumlah Perusda
		Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui diklat kompetensi	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan
		Penataan dan Penguatan kapasitas Kelembagaan Pelaku Usaha UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan kategori baik
		Penataan dan Penguatan BUMDes	Jumlah BUMDes yang aktif
		Penguatan Kapasitas Lembaga Adat pada usaha masyarakat	Jumlah usaha yang melibatkan lembaga adat

2. Prioritas Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam

Tabel 4.6

Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Penerapan protokol kesehatan	Jumlah fasilitas umum dan perkantoran yang menerapkan proses
		Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah fasilitas penerapan hidup sehat
		Pengawasan masyarakat yang rentan virus Covid-19 secara berkala	persentase masyarakat yang diawasi secara berkala
	Penanganan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Pengadaan bahan dan alat kesehatan	Jumlah bahan dan alat kesehatan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC (Tim Reaksi Cepat) Nakes penanganan penderita Covid-19	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase kesiapsiagaan bencana yang terpenuhi



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
		Penguatan peringatan dini bencana	Jumlah peringatan dini bencana yang dilaksanakan

3. Prioritas Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Tabel 4.7

Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata
		Pembentukan Agrowisata	Jumlah agrowisata
		Pengembangan Paket Wisata	Jumlah paket wisata
		Pengembangan Kawasan Pemancingan Middle-higher class	Jumlah kawasan pemancingan
		Pembangunan Floating Food Court	Jumlah floating food court
		Pengembangan Homestay	Jumlah homestay
	Pelestarian Budaya	Penggalian situs budaya benda dan non benda	Jumlah situs budaya
		Program pelestarian Budaya	Persentase pelestarian budaya
	Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat	Mengefektifkan komunitas kepemudaan	Persentase keefektifan kepemudaan
		Peran Ulubalang di Kepariwisataaan	Persentase desa/ kelurahan adat/budaya yang memiliki ulubalang
		Peran Pemuda dalam Kepariwisataaan	Jumlah kelompok pemuda dalam kepariwisataaan

4. Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Tabel 4.8

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik
		Pengadaan dan pemeliharaan Alat Berat	Persentase penggunaan alat berat



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
		Pembangunan infrastuktur Jalan strategis Kabupaten	Persentase jalan strategis kondisi mantap
		Pembangunan infrastuktur Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Pembangunan infrastuktur Air Bersih	Persentase cakupan rumah tangga berakses air bersih
		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase sampah yang ditangani
		Menjalin Kerjasama dengan Investor dalam rangka pengadaan teknologi (cth : pemanfaatan Air Minum)	Jumlah kerjasama dengan investor
			Jumlah perusda yang terbentuk
		Pembangunan drainase	Panjang drainase yang terbangun
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani
			Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani
			Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Pembangunan/Peningkatan kualitas dermaga	Jumlah dermaga yang dibangun
		Peningkatan sarana/prasarana dan kualitas layanan perhubungan	Persentase kelengkapan marka jalan
			Persentase pelayanan perhubungan
		Pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik	Jumlah lahan yang dibebaskan
		Pembangunan dan/atau penataan bangunan gedung	- Jumlah gedung kantor yang dibangun
			- Jumlah regulasi tentang bangunan gedung
		Penyelenggaraan penataan ruang	- Jumlah peraturan yang diterbitkan
			- Jumlah titik sempadan danau



5. Prioritas Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 4.9

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan	Peningkatan kualitas AKIP	Nilai AKIP
		Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
		Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP
		Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah	Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti diklat
	Pengembangan dan Pengoptimalan Penggunaan Sistem SPBE	Membangun layanan dan Memperkuat tatakelola SPBE	Indeks layanan tatakelola SPBE
		Membangun SDM yang berkompeteren dan Inovatif berbasis TIK	Persentasi pegawai yang dinovatif berbasis TIK
		Peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan internet	Jumlah zona blankspot internet di Kabupaten Samosir
			jumlah pembangunan fiber optik
			Persentase sarana publik yang tersedia internet

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023

Keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. Keselarasan program prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan prioritas daerah Kabupaten Samosir tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.10

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir Tahun 2023

NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
	Tema : "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema : Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tema : Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris ▪ Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata 	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan ○ Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi ▪ Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Kelestarian Budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam



NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi penyelarasan prioritas nasional, Provinsi dan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Samosir, dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 dan rencana pembangunan pada tahun 2023.

Selain itu sinkronisasi perencanaan tidaklah cukup berhenti disini, Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unsur dominan yang memengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran diantaranya :

a. Pemerintah

Selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.

b. DPRD

Dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.

c. Gubernur

Dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. Perangkat Daerah

Dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.

e. Masyarakat

Dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.

f. Lain-lain

Mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran

Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini mencerminkan upaya- upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

4.6 Pembangunan Inovasi Daerah

Inovasi Perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, telah berhasil menciptakan beberapa aplikasi dalam menunjang pembangunan



Kabupaten Samosir, sesuai dengan fungsi aplikasi tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir yang berperan sebagai koordinator terciptanya aplikasi tersebut yang perlu peningkatan dan penciptaan aplikasi terbaik di Kabupaten Samosir sehingga aplikasi tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Berbagai inovasi pada Pemerintah Kabupaten Samosir, diantaranya yaitu:

A. Inovasi yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Samosir:

Tabel 4.11
Inovasi yang Diimplementasikan

NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BKPSDM
2.	e-Kinerja	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BKPSDM
3.	SIMPATDA	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BPKPD
4.	BPHTB	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BPKPD
5.	e-sakip	Tata kelola Pemerintahan Daerah	SETDAKAB
6.	e-sewa tanah	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BPKPD
7.	e-Onan	Pelayanan Publik	Diskopnakerindag
8.	e-UMKM	Pelayanan Publik	Diskopnakerindag
9.	Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Publik	BPBD
10.	POKBANG (Kelompok Bangkit untuk Penanggulangan Kemiskinan)	Inovasi Daerah Lainnya	Dinsos PMD
11.	Bus Wisata Samosir	Pelayanan Publik	Disbudpar
12.	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Bagot	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
13.	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Pangaribuan	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
14.	KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) NAPOSO NAINGGOLAN CREATIVE	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar



NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
15.	Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Sosor Galung (SORGA)	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
16.	Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi	Pelayanan Publik	Disdikpora
17.	DOMPAK (Daftar Online Masyarakat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Publik	Disdukcapil
18.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI KEGIATAN PEMKAB	Pelayanan Publik	Dishub
19.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI BESAR KEAGAMAAN	Pelayanan Publik	Dishub
20.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI LAINNYA	Pelayanan Publik	Dishub
21.	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Inovasi Daerah Lainnya	Diskpp
22.	VAKSINASI RABIES MASSAL	Inovasi Daerah Lainnya	Diskpp
23.	Gerakan Bertanam Pohon (GABEHON)	Inovasi Daerah Lainnya	Dislingkup
24.	Sistem Informasi Perizinan Online Daerah Kabupaten Samosir (SIPODASA)	Pelayanan Publik	DISPMPTSP
25.	Wistle-blowing System (WBS)	Pelayanan Publik	Itda
26.	Pendaftaran Orkemas (Organisasi Kemasyarakatan)	Pelayanan Publik	Kesbangpol
27.	BUSER Ternak (BLT)	Pelayanan Publik	Satpol pp
28.	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Pelayanan Publik	Setdakab

B. Inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

Tabel 4.12
Inovasi Ujicoba Tahun 2022 dan Implementasi Tahun 2023

NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	Bunga desa	Pelayanan Publik	Dinsos PMD
2.	Absensi Wajah Pemkab. Samosir	Tata kelola Pemerintahan Daerah	BKPSDM
3.	Fishing-camp Siarubung, Harian	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
4.	Batu marompa, Sitiotio	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
5.	Sipatungan, Sitiotio	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar



NO	DAFTAR INOVASI	BENTUK INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
6.	Sekolah alam, Ronggur nihuta	Pelayanan Publik	Disbudpar, Disdikpora
7.	Batu guru, Nainggolan	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
8.	Pantai siriaon, Pangururan	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
9.	Bukit holbung, Harian	Inovasi Daerah Lainnya	Disbudpar
10.	e-stay	Pelayanan Publik	Disbudpar
11.	e-penelitian	Pelayanan Publik	Bappeda Litbang
12.	LARIKE-BUPATI	Tata kelola Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang
13.	e-LAGAI SEKDA	Tata kelola Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang
14.	e-OFFICE	Tata kelola Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang

- C. Inovasi Program Pembangunan Daerah terkait kebijakan perencanaan, yaitu:
1. Pendampingan pembukaan jalan baru dan pelaksanaan sirtunisasi jalan baru;
 2. Mendekatkan Kepala Daerah kepada masyarakat dengan berkantor di Desa (Bunga Desa);
 3. Memperkuat basis perencanaan pra maupun pasca pandemi covid-19;
 4. Pelaksanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran dari Pemerintah Atasan;
 5. Memperkuat basis perencanaan;
 6. Membuat perpustakaan mini kesetiap pelosok perdesaan;
 7. Dan lain-lain.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. **861,330,788,949,-**. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. **855,533,052,000,-** dan penerimaan pembiayaan sebesar **Rp. 32,000,000,000,-**. Alokasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Sedangkan Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Proyeksi rincian belanja operasi dan belanja transfer dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Kabupaten Samosir Tahun 2023

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	544,763,909,443.41
1	Belanja Pegawai	336,620,602,957.41
2	Belanja barang dan jasa	194,208,665,972.70
3	Belanja Hibah	4,719,446,735.54
4	Belanja Bantuan Sosial	9,215,193,777.76
II	Belanja Modal	153,746,196,717.94
III	Belanja Tidak Terduga	161,894,441.59
IV	Belanja Transfer	162,658,788,346.50
JUMLAH		861,330,788,949

Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, dan Rencana DAK dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini:



Tabel 5.2

Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
1.	Usuran pemerintahan bidang pendidikan	4	13	72	230,327,004,410	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Usuran pemerintahan bidang kesehatan	5	14	55	64,894,000,000	Dinas Kesehatan
3.	Usuran pemerintahan bidang kesehatan	3	10	20	45,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
4.	Usuran pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	10	17	46	117,726,788,949	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Usuran pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	1	1	1	1,040,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Usuran pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2	9	20	4,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Usuran pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3	10	24	6,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Usuran pemerintahan bidang sosial	5	12	25	8,030,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.	Usuran pemerintahan bidang tenaga kerja	4	8	18	6,748,960,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
10.	Usuran pemerintahan bidang tenaga kerja	2	4	10	1,000,000,000	UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Samosir
11.	Usuran pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	10	21	6,641,302,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
12.	Urusan pemerintahan bidang pangan	3	5	8	1,517,892,197	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Urusan pemerintahan bidang pertanahan	4	4	10	4,382,673,072	Sekretariat Daerah
14.	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	5	10	26	12,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	2	4	10	800,000,000	UPTD Kebun Raya Samosir
16.	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4	8	18	4,200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	3	3	10	970,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3	4	10	1,458,697,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19.	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	3	11	27	5,000,000,000	Dinas Perhubungan
20.	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	3	7	27	5,950,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	5	5	5	7,225,390,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
22.	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	6	12	26	4,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	2	6	13	5,672,995,590	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
24.	Urusan pemerintahan bidang statistik	1	1	1	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	Urusan pemerintahan bidang persandian	1	1	1	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
26.	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	3	7	17	2,887,818,830	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
27.	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	1	2	12	196,949,300	Sekretariat Daerah
28.	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	1	3	4	71,050,700	Sekretariat Daerah
29.	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	3	4	5	11,215,558,803	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30.	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	4	6	17	13,612,181,170	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31.	Urusan pemerintahan bidang pertanian	6	10	20	22,266,549,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
32.	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	3	3	4	675,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
33.	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	1	1	2	500,000,000	UPT. Metrologi Legal Daerah Kabupaten Samosir
34.	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	1	1	1	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
35.	Sekretariat daerah	3	17	66	28,349,326,928	Sekretariat Daerah
36.	Sekretariat dprd	2	12	28	23,500,000,000	Sekretariat Dewan
37.	Perencanaan	3	10	25	7,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
38.	Keuangan	4	12	53	163,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
39.	Kepegawaian	2	7	18	4,097,851,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40.	Pendidikan dan pelatihan	1	2	2	2,902,148,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41.	Penelitian dan pengembangan	1	1	2	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
42.	Inspektorat daerah	3	8	23	6,000,000,000	Inspektorat
43.	Kecamatan	5	10	24	5,370,000,000	Kecamatan Pangururan
44.	Kecamatan	5	10	26	3,200,000,000	Kecamatan Simanindo
45.	Kecamatan	5	9	23	2,800,000,000	Kecamatan Palipi
46.	Kecamatan	5	10	25	4,500,000,000	Kecamatan Nainggolan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
47.	Kecamatan	5	9	24	2,000,000,000	Kecamatan Onanrunggu
48.	Kecamatan	5	9	23	1,600,000,000	Kecamatan Ronggur Nihuta
49.	Kecamatan	5	10	26	1,700,000,000	Kecamatan Sianjur Mula-mula
50.	Kecamatan	5	9	24	1,650,000,000	Kecamatan Harian
51.	Kecamatan	5	9	23	1,450,000,000	Kecamatan Sitio-tio
52.	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	43	2,300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		183	391	1,064	861,330,788,949	



5.1 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Samosir Tahun 2023

Perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2023 yang merupakan sinergitas antara bottom up dan top down untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir. Kebersamaan tersebut yakni dengan pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir dengan menjaring aspirasi usulan program/kegiatan dari masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir pada implementasinya sudah dilaksanakan sebahagian pada APBD Kabupaten Samosir tahun 2022 dan dilanjutkan kembali pengusulannya ke tahun 2023 tanpa melampirkan anggaran kebutuhan usulan tersebut. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui usulan masyarakat tersebut merupakan kebutuhan riil yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dituangkan dalam aplikasi SIPD e-pokir dan juga yang disampaikan secara tertulis kepada Bappeda Kabupaten Samosir.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Samosir tersebut merupakan:

1. Perumusan dari permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir;
2. Permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
3. Diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran Kabupaten Samosir;
4. Penelaahan dari konsultasi publik oleh Bappeda Litbang Kabupaten Samosir serta diikuti anggota DPRD selaku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.

pokok-pokok pikiran yang disampaikan melalui SIPD sebanyak 680 usulan dengan usulan dari rincian fraksi sebagai berikut :

1. Fraksi Demokrat sebanyak 29 usulan;
2. Fraksi Gabungan sebanyak 35 usulan;
3. Fraksi Golkar sebanyak 67 usulan;
4. Fraksi Nasdem sebanyak 77 usulan;
5. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 447 usulan;
6. Fraksi PKB sebanyak 25 usulan.

Program pembangunan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut akan menjadi prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk ditampung pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Samosir untuk selanjutnya dapat langsung diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 5.3

Usulan Kegiatan Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2023

No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
1	DEMOKRAT	Pemagaran Puskesmas Onan Runggu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Onan Runggu	1 paket	Kesehatan
2	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja Katolik St. Petrus Janji Maria	Penataan Gereja	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja Katolik Stasi Jungjungan	Penataan Gereja	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	DEMOKRAT	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik kepada Kelompok Tani se Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
5	DEMOKRAT	Pengadaan Hand Traktor kepada Kelompok Tani	Pengadaan Hand Traktor	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
6	DEMOKRAT	Fasilitas Laptop dan Printer ke CU/Koperasi	Pengadaan Sarana Prasarana Pengembangan UMKM	Onan Runggu	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	DEMOKRAT	Fasilitasi Pelaku Usaha UMKM	Pengembangan UMKM	Onan Runggu	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	DEMOKRAT	Pengadaan Mesin Pompa Air Bersih di Dusun Parhorasan	Pengadaan Pompa Air	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
9	DEMOKRAT	Pembangunan Jembatan Penghubung dari Objek Wisata Pondok Remaja ke Perkampungan Lagundi	Pembangunan Jembatan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	DEMOKRAT	Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Buntu Pasir Desa Onan Runggu	Pembangunan Jalan Lingkungan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	DEMOKRAT	Perbaikan/Pembangunan Dermaga Sitinjak	Pembangunan Dermaga	Onan Runggu	1 paket	Perhubungan
12	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja Katolik Sukkean	Penataan Gereja	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
13	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja Katolik Janji Matogu	Penataan Gereja	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	DEMOKRAT	Penataan Halaman dan Pemagaran Gereja HKBP Malau	Penataan Gereja	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	DEMOKRAT	Pembangunan Kantor Desa	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	DEMOKRAT	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik kepada Kelompok Tani	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Simanindo	1 paket	Pertanian
17	DEMOKRAT	Pengadaan Hand Traktor kepada Kelompok Tani	Pengadaan Hand Traktor	Simanindo	1 paket	Pertanian
18	DEMOKRAT	Fasilitasi Laptop dan Printer ke CU/Koperasi	Pengadaan Sarana Prasarana Pengembangan UMKM	Simanindo	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	DEMOKRAT	Fasilitasi Pelaku UMKM	Pengembangan UMKM	Simanindo	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	DEMOKRAT	Pembangunan Jalan menuju Pasir Putih Pea Desa Siallagan Pinda Raya	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	DEMOKRAT	Pembangunan WC/Kamar Mandi SMP Negeri 1 Ambarita	Pembangunan Sanitasi Sekolah	Simanindo	1 paket	Pendidikan
22	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja Katolik Simanindo	Penataan Gereja	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Gereja GKPI Simanindo	Penataan Gereja	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
24	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan Pustu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Simanindo	1 paket	Kesehatan
25	DEMOKRAT	Pembangunan Jembatan penghubung Rina Bolak-Simarpinggan	Pembangunan Jembatan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	DEMOKRAT	Penataan Pekarangan SD Negeri 8	Penataan Sekolah PUTR	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	DEMOKRAT	Pengadaan Mesin Pemipil Jagung kepada Kelompok Tani	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
28	DEMOKRAT	Pengadaan Mesin Pemipil Jagung kepada Kelompok Tani	Pengembangan Tanaman Pertanian/Perkebunan	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
29	DEMOKRAT	Pengadaan Meubeler di SDN 8 Desa Pardomuan	Pengadaan Meubeler di sekolah	Onan Runggu	1 paket	Pendidikan
30	GABUNGAN	Kantor Camat sudah banyak yang rusak, maka sangat diperlukan Pembangunan/ Rehab Kantor Camat Palipi	Penataan Kantor Camat	Palipi	500 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	GABUNGAN	Jalan tidak memadai dilalui, maka perlu Pembangunan Rabat Beton dari Lumban Dolok menuju Buntu Mauli Desa Hatoguan	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
32	GABUNGAN	jalan tidak meadai, maka perlu Pembangunan Jalan SImpang Rindu menuju Lumban Nator Desa Hatoguan	Pembangunan Jalan	Palipi	150 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	GABUNGAN	belum ada penataan sekolah TK. Negeri Nainggolan	Penataan Sekolah PUTR	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	GABUNGAN	belum adanya saluran, maka perlu Pembangunan Saluran di Dusun II Kelurahan Siruma Hombar	Pembangunan saluran Irigasi	Nainggolan	150 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	GABUNGAN	kekurangan	Pengadaan Container/Bak Sampah	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	GABUNGAN	saluran dan rabat ada tapi sudah longsor maka perlu pembangunan saluran dan rabat beton kembali	Pembangunan Drainase Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	GABUNGAN	kurangnya penataan kantor	Penataan Kantor Camat	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	GABUNGAN	belum tersedianya jalan	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	GABUNGAN	kurangnya kebutuhan masyarakat bibit jagung	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 paket	Pertanian
40	GABUNGAN	kurangnya penataan sekolah	Penataan Sekolah PUTR	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	GABUNGAN	kurangnya penataan sekolah	Penataan Sekolah PUTR	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	GABUNGAN	kurangnya penataan sekolah	Penataan Sekolah PUTR	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	GABUNGAN	belum ada jalan	Pembangunan Rabat Beton	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	GABUNGAN	kurangnya kebutuhan masyarakat untuk	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian,	Ronggur	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		bibit jagung	Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Nihuta		
45	GABUNGAN	perlunya pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	GABUNGAN	perlunya pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	Pangururan	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	GABUNGAN	perlunya lanjutan peningkatan jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	GABUNGAN	Perlunya pembangunan pagar sekolah	Pemagaran Sekolah	Ronggur Nihuta	1 paket	Pendidikan
49	GABUNGAN	perlunya pembangunan/peningkatan jalan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	GABUNGAN	Perlunya Peningkatan jalan di dusun Nahornop Desa Sijambur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	GABUNGAN	jalan sudah rusak	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	GABUNGAN	perlunya pengadaan ternak babi, karena masih minim	Pengembangan Ternak Babi	Pangururan	1 paket	Pertanian
53	GABUNGAN	masih minimnya ditemukan bibit jagung P32	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 paket	Pertanian
54	GABUNGAN	masih minimnya bibit jagung P32 di Kabupaten Samosir	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
55	GABUNGAN	perlunya pengadaan rumah kompos dan pengadaan pupuk kompos	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Pangururan	1 paket	Pertanian
56	GABUNGAN	akses jalan rusak, maka perlunya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	GABUNGAN	belum tersedia akses jalan, maka perlunya Pembangunan Jalan dan Pemasangan Conblok	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
58	GABUNGAN	jalan belum memadai dilalui, maka perlunya lanjutan Rabat Beton	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
59	GABUNGAN	jalan belum memadai dilalui, maka perlunya Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
60	GABUNGAN	belum tersedianya akses jalan, maka perlunya Pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
61	GABUNGAN	akses jalan belum memadai, maka perlunya Lanjutan Peningkatan Jalan dan Hotmix	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	GABUNGAN	akses jalan belum memadai menuju lokasi pertanian, maka perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Palipi	1 paket	Pertanian
63	GABUNGAN	belum tersedia kases jalan, maka perlunya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	GABUNGAN	belum tersedianya embung air untuk kebutuhan masyarakat, maka perlunya Pembangunan Embung Air	Pembangunan Embung Air	Palipi	1 paket	Pertanian
65	GOLKAR	Penataan Puskesmas Pembantu Desa Ginolat	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Sianjar Mula Mula	1 paket	Kesehatan
66	GOLKAR	Lanjutan DYK/TPT Jalan ke Desa Sianjur Mulamula	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
67	GOLKAR	Penataan Perkampungan Huta Bagas Limbong	Penataan Kampung / Huta	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Parmonangan Huta Galung	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
69	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Sarimarihit Singkam	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	GOLKAR	Peningkatan Jalan Siganjang Sitohang	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Siboro-Huta Gurgur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	GOLKAR	DAM Parit/DYK	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	GOLKAR	Penataan Hutabagas	Penataan Kampung / Huta	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	GOLKAR	Lanjutan DYK/TPT Hutaraja Dolok	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Sitio-tio	150 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	GOLKAR	DYK/TPT Jalan Protokol Lumban Uruk Tamba Nagodang	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Sitio-tio	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	GOLKAR	Penataan/Paving Block Lumban Nauli Banjar Dolok Sitonggor	Paving Block	Sitio-tio	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	GOLKAR	lanjutan pembangunan jalan menuju simanuk-manuk desa pardomuan nauli kecamatan palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	700 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	GOLKAR	perlunya pembangunan TPT di Huta Sosor Gonting Desa Pardomuan Nauli	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Palipi	500 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
79	GOLKAR	jalan sudah rusak di Desa Gorat Pallombuan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	100 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	GOLKAR	jalan sudah rusak di sibuntuon Desa Parsaoran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	GOLKAR	Perlu pembangunan TPT di Desa Urat II	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Palipi	100 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82	GOLKAR	perlu pemagaran SDN 23 Desa Urat II	Pemagaran Sekolah	Palipi	1 paket	Pendidikan
83	GOLKAR	perlu pembangunan jalan menuju tardas Desa Hatoguan	Pembangunan Jalan	Palipi	150 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
84	GOLKAR	perlu peningkatan jalan karena sudah rusak di Kelurahan Parhusip Kecamatan Nainggolan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	500 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	GOLKAR	perlu adanya lanjutan peningkatan jalan di dusun Parmanukan Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	400 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	GOLKAR	minimnya handtraktor di kecamatan palipi	Pengadaan Hand Traktor	Palipi	1 paket	Pertanian
87	GOLKAR	minimnya alat pertanian pemipil jagung di kecamatan palipi	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Palipi	1 paket	Pertanian
88	GOLKAR	minimnya alat pertanian jenis pemipil jagung di kecamatan nainggolan	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Nainggolan	1 paket	Pertanian
89	GOLKAR	perlu penanganan dyk binanga lobu Desa Gorat Pallombuan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Palipi	100 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90	GOLKAR	belum pernah di tata kampung/huta tangga batu desa Urat II	Penataan Kampung / Huta	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91	GOLKAR	perlu peningkatan jalan di Dusun Soburan menuju Pintu Batu, menghubungkan 2 Desa dan 2 Kecamatan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 Km	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	GOLKAR	perlu pembangunan pustu di Desa Urat II	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Palipi	1 paket	Kesehatan
93	GOLKAR	perlu rehabilitasi kantor desa gorat pallombuan	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Palipi	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
94	GOLKAR	perlu penataan halaman SD Janji Marapot Kecamatan Nainggolan	Paving Block	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	GOLKAR	perlu pemagaran SMPN 1 Atap Pananggangan Kecamatan Nainggolan	Pemagaran Sekolah	Nainggolan	1 paket	Pendidikan
96	GOLKAR	perlu pembangunan jalan tepi pantai Desa Pallombuan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 Km	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
97	GOLKAR	perlu peningkatan jalan menuju Tampahan Desa Sideak	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	GOLKAR	minim handtraktor di Kecamatan Nainggolan	Pengadaan Hand Traktor	Nainggolan	1 paket	Pertanian
99	GOLKAR	perlu peningkatan jalan Tampahan menuju Simanampang Desa Urat II	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	800 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100	GOLKAR	perlu peningkatan jalan Pondok Bulu menuju Simanampang Desa Urat II	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	450 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Tangga Batu - Huta Tingi Desa Urat II	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	350 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102	GOLKAR	Peningkatan Jalan menuju HKBP Siantar-antar Desa Huta Dame	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan ke Sitio-tio Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	GOLKAR	Lanjutan peningkatan Jalan Simangabang Aek Nahombar Desa Pananggangan I Kecamatan Nainggolan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	150 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
105	GOLKAR	Peningkatan Jalan menuju Huta Gurgur Desa Saor Nauli	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	400 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	GOLKAR	Peningkatan Jalan menuju Lumban Manik Desa Sigaol Marbun	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	300 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	GOLKAR	Penataan Pekarangan SDN 17 Sinaga Uruk Pandiangan Kecamatan Nainggolan	Paving Block	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Dolok Marisi menuju Pintu Batu Desa Pasaran Parsaoran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	400 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
109	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Martabe Desa Suhutnihuta Pardomuan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	150 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	GOLKAR	Pembangunan Jalan Sitio-tio Sihapur Tonga-tonga, Dusun 2 Desa Huta Ginjang	Pembangunan Jalan	Palipi	300 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
111	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan menuju lumban dolok Desa Suhut Nihuta Pardomuan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	300 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	GOLKAR	perlu pengadaan ternak kerbau di Kecamatan Palipi	Pengembangan Ternak Kerbau	Palipi	1 paket	Pertanian
113	GOLKAR	perlu pembangunan resapan air di halaman SMPN I Nainggolan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan jalan menuju janji maria Desa Hutaginjang Kecamatan Palipi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
115	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan Siaek Mual Desa Urat Timur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
116	GOLKAR	Peningkatan jalan simpang gorat silengket-lengket Desa Gorat Pallombuan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 Km	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
117	GOLKAR	Lanjutan Peningkatan Jalan ke Siuntegodang, Desa Urat II	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	200 m2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118	GOLKAR	belum tersedianya jalan lingkungan, maka perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
119	GOLKAR	jalan tidak memadai, maka perlunya Pembangunan Jembatan Penghubung	Pembangunan Jembatan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120	GOLKAR	kurangnya perekonomian masyarakat, maka perlunya Bibit Bawang jenis Batu Hijau dan Bima	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 paket	Pertanian
121	GOLKAR	kurangnya perekonomian masyarakat, maka perlunya pengadaan bibit bawang jenis batu hijau 1,5 ton/ha, dan bima 800 kg/ha	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pertanian
122	GOLKAR	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	GOLKAR	belum tersedia jalan untuk dilalui oleh masyarakat, maka perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	GOLKAR	belum tersedia jalan ringroad, maka perlunya pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	GOLKAR	belum tersedianya jalan, maka perlunya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
126	GOLKAR	kurangnya kompos kebutuhan petani, maka perlunya Pengadaan Kompos (Ramosdo) 5 ton/ha	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	5 ton	Pertanian
127	GOLKAR	kurangnya kompos untuk kebutuhan petani, maka perlunya Pengadaan Kompos (Ramosdo) 5 ton/ha	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	5 ton	Pertanian
128	GOLKAR	banyaknya hama, maka perlunya Pengadaan Insektisida (obat gulok) prepaton, Fungisida (obat Singgar) Dithaen Daconel	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	1 paket	Pertanian
129	GOLKAR	banyaknya hama, maka perlunya Pengadaan Insektisida (obat Gulok) Prepaton, dan Fungisida (obat Singgar) Dithaen Daconel	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	1 paket	Pertanian
130	GOLKAR	kurangnya pupuk untuk petani, maka perlunya Pupuk TSP (300 kg/ton), ZA (300 kg/ha), NPK Mutiara (400 kg/ha)	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	1 paket	Pertanian
131	GOLKAR	Kekurangan pupuk untuk petani maka perlunya pengadaan pupuk TSP (300 kg/ton), ZA (300 kg/ha), NPK Mutiara (400 kg/ha)	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	1 Paket	Pertanian
132	NASDEM	Lanjutan Rabat Jalan Huta Sitonggor Kelurahan Parhusip III	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	200 Juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
133	NASDEM	Rabat Lanjutan Jalan di Huta Situmpol Kelurahan Parhusip III	Pembangunan Rabat Beton	Seluruh Kecamatan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
134	NASDEM	Rabat Jalan Lumban di Huta Situmpol Kelurahan Parhusip III	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
135	NASDEM	Rabat Jalan Lumban Jior Dusun I	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
136	NASDEM	Rabat Jalan menuju Kantor Desa Nainggolan	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	100 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
137	NASDEM	Rabat dan DYK Jalan Pertanian Desa Sipinggan	Pembangunan Rabat Beton	Seluruh Kecamatan	50 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
138	NASDEM	Paving Block Halaman SMA Santo Petrus Urat Timur	Paving Block	Palipi	50 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	NASDEM	Pembuatan Pagar Gereja HKBP Nainggolan	Penataan Gereja	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	NASDEM	Penataan Drainase dan Penataan Pantai Indah Sipinggan	Pembangunan Drainase Jalan	Seluruh Kecamatan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	NASDEM	Hibah ke Partungkoan Adat Samosir/Pelatihan dan Sertifikasi Hulubalang	Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata	Nainggolan	200 juta	Pariwisata
142	NASDEM	Pantai Sitinjak belum ditata, sehingga diperlukan penataan	Penataan Objek Wisata	Onan Runggu	1 paket	Pariwisata
143	NASDEM	perlu ada pembangunan rabat beton	Pembangunan Rabat Beton	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
144	NASDEM	belum tersedianya handtraktor di beberapa kelompok tani di Kecamatan Onan Runggu	Pengadaan Hand Traktor	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
145	NASDEM	masih minimnya kerbau di kecamatan Onan Runggu	Pengembangan Ternak Kerbau	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
146	NASDEM	sulitnya mendapat benih jagung P32 di Kecamatan Onan Runggu	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
147	NASDEM	Perlu pembangunan rumah kompos untuk menanggulangi penggunaan pupuk kimia	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
148	NASDEM	perlu untuk pembangunan dyk	Pembangunan PUSTU/POSKESDES/POLINDES DYK	Onan Runggu	1 paket	Kesehatan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
149	NASDEM	perlunya pembangunan rabat beton	Pembangunan Rabat Beton	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150	NASDEM	perlunya adanya penataan tempat bak air penampungan/reservoar dan sambungan pipa ke rumah penduduk	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
151	NASDEM	perlunya penataan tempat bak air penampung/reservoar dan sambungan pipa ke rumah penduduk	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
152	NASDEM	perlunya pembangunan gorong-gorong	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
153	NASDEM	Perlunya penataan rumah adat di desa Sitinjak	Penataan Objek Wisata	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pariwisata
154	NASDEM	perlunya peningkatan/pemeliharaan jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
155	NASDEM	perlunya rehabilitasi pustu di Kecamatan Onan Runggu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Onan Runggu	1 paket	Kesehatan
156	NASDEM	Perlunya pembangunan lapen/aspal jalan di Desa Sitinjak dusun Siparunggu	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
157	NASDEM	perlunya adanya pengadaan pupuk kompos	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
158	NASDEM	perlunya pengadaan kendaraan angkut sampah	Pengadaan Container/Bak Sampah	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
159	NASDEM	perlunya pengadaan pupuk organik cair	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangurusan	1 paket	Pertanian
160	NASDEM	perlunya pengadaan pupuk organik cair di kecamatan ronggur nihuta	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
161	NASDEM	perlunya pengembangan kerbau di kecamatan pangururan	Pengembangan Ternak Kerbau	Pangururan	1 paket	Pertanian
162	NASDEM	perlunya pengembangan ternak kerbau di kecamatan ronggur nihuta	Pengembangan Ternak Kerbau	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
163	NASDEM	perlunya pengembangan ternak babi di kecamatan pangururan	Pengembangan Ternak Babi	Pangururan	1 paket	Pertanian
164	NASDEM	perlunya pengembangan ternak babi di kecamatan ronggur nihuta	Pengembangan Ternak Babi	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
165	NASDEM	perlunya pembangunan jalan lingkungan di kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
166	NASDEM	perlunya pembangunan jalan lingkungan di kecamatan ronggur nihuta	Pembangunan Jalan Lingkungan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
167	NASDEM	perlunya pembangunan jalan usaha tani di kecamatan pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1 paket	Pertanian
168	NASDEM	pengembangan jalan usaha tani di kecamatan ronggur nihuta	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
169	NASDEM	akses jalan belum memadai, maka perlunya rekonstruksi jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
170	NASDEM	akses jalan belum memadai, maka perlunya rekonstruksi jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
171	NASDEM	akses jalan belum memadai, maka perlunya rekonstruksi jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
172	NASDEM	Akses jalan menuju pertanian belum memadai, maka perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Sitio-tio	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
173	NASDEM	tembok sudah longsor, maka perlunya Pembangunan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
174	NASDEM	Tembok sudah longsor, maka perlunya Pembangunan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
175	NASDEM	Tembok sudah Longsor, maka perlunya Pembangunan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
176	NASDEM	Tembok sudah longsor, maka perlunya Pembangunan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
177	NASDEM	belum tersedianya dermaga untuk kebutuhan masyarakat, maka perlunya Pembangunan Dermaga Siringo-ringo Toba	Pembangunan Dermaga	Sitio-tio	1 paket	Perhubungan
178	NASDEM	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlunya Pengadaan Ternak Kerbau	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Sitio-tio	1 paket	Pertanian
179	NASDEM	belum tersedianya dermaga untuk mempelancar transpotasi, maka perlunya Pembangunan Dermaga	Pembangunan Dermaga	Sitio-tio	1 paket	Perhubungan
180	NASDEM	TPT belum tuntas, maka perlunya lanjutan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
181	NASDEM	belum selesainya Pembangunan bronjong, maka perlunya Lanjutan Pembangunan Bronjong	Pembangunan Bronjong Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182	NASDEM	belum memadai jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Harian	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
183	NASDEM	belum memadai jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Harian	1 paket	Pertanian
184	NASDEM	belum memadai jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Peningkatan jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Harian	1 paket	Pertanian
185	NASDEM	Jlan belum memadai, maka perlunya rekonstruksi jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
186	NASDEM	belum tersedianya sarana air bersih, maka perlunya Peningkatan Sarana Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
187	NASDEM	kurangnya perekonomian masyarakat, maka perlunya Pengadaan Ternak Kerbau	Pengembangan Ternak Kerbau	Sitio-tio	1 paket	Pertanian
188	NASDEM	kurangnya perekonomian masyarakat, maka perlunya Pengadaan Bibit Kerbau dan Kambing	Pengembangan Ternak Kerbau	Harian	1 paket	Pertanian
189	NASDEM	jalan yang sudah ada belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	NASDEM	jalan sulit dilalui, maka perlunya Pembangunan bronjong	Pembangunan Bronjong Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
191	NASDEM	jalan sulit dilalui karena kurak, maka perlunya rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
192	NASDEM	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya rekonstruksi jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	NASDEM	jalan sudah rusak, maka perlunya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
194	NASDEM	Jalan sulit untuk dilalui dilokasi pertanian maka perlunya Rekonstruksi Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
195	NASDEM	Belum tertatanya huta panampangan	Paving Block	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
196	NASDEM	Belum tertata Huta Silundak	Paving Block	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
197	NASDEM	Belum tertata Lumban Baringin	Paving Block	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
198	NASDEM	Jalan tidak memadai untuk dilalui maka perlu lanjutan rabat beton SD Siantinganting	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199	NASDEM	Longsor maka perlunya Pembangunan dyk Binanga Sioto Desa Parlondut	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200	NASDEM	Jalan sulit dilalui maka perlunya Pembangunan rabat beton Dusun Saitnihuta Desa Siantinganting	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
201	NASDEM	sudah longsor, maka perlunya Pembangunan Bronjong pantai di saitnihuta Desa Sianting-anting	Pembangunan Bronjong Jalan	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202	NASDEM	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlunya Pengadaan ternak sapi	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 Paket	Pertanian
203	NASDEM	kurangnya pemnghasilan masyarakat, maka perlu Pengadaan Ternak Sapi	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 Paket	Pertanian
204	NASDEM	kurangnya penataan sekolah, kalau musim penghujan halaman sekolah becek tergenang air, maka perlunya Pembuatan Paving block di SMP Negeri 2 Panguruan	Paving Block	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
205	NASDEM	masyarakat sangat membutuhkan Pembangunan MCK karena desa tersebut belum ada tersedianya MCK, maka perlunya Pembangunan MCK	Pembangunan MCK	Simanindo	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
206	NASDEM	Jalan sulit dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan Desa Sianting-anting (akibat bencana alam)	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
207	NASDEM	Jalan rusak akibat bencana alam, maka perlunya Peningkatan Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
208	NASDEM	belum tertata lingkungan dengan baik, maka perlunya Pembuatan Paving block	Paving Block	Pangururan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
209	PDI Perjuangan	sudah longsor, maka perlunya Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
210	PDI Perjuangan	sudah longsor, maka perlunya Pemabngunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
211	PDI Perjuangan	belum adanya kantor desa yang layak, maka perlunya Pembangunan Kantor Desa Turpuk Limbong	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Harian	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
212	PDI Perjuangan	sudah rusak, maka perlunya Rehabilitas PERumahan Guru SD Negeri 16 Boho	Rehabilitasi Gedung Perumahan Guru	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pendidikan
213	PDI Perjuangan	sekolah sering kurang aman, maka perlu Pembangunan Pemagaran Sekolah	Pemagaran Sekolah	Sitio-tio	1 paket	Pendidikan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
214	PDI Perjuangan	terjadi longsor, maka perlu Pembangunan Bronjong Jalan	Pembangunan Bronjong Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
215	PDI Perjuangan	jalan sudah rusak, maka perlu Pembangunan Bronjong Jalan	Pembangunan Bronjong Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
216	PDI Perjuangan	irigasi belum tersedia, masyarakat membutuhkan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi PU	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
217	PDI Perjuangan	belum ada jalan, maka sangat perlu Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
218	PDI Perjuangan	Kantor tidak layak, maka perlunya Pembangunan/Revitalisasi Kantor Kepala Desa/lurah	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Palipi	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
219	PDI Perjuangan	bronjon longsor, maka perlu Pembangunan Bronjong Binanga Sipali	Pembangunan Bronjong Jalan	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Harian	1 paket	Pertanian
221	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka sangat perlu Pengadaan bibit kerbau	Pengembangan Ternak Kerbau	Harian	1 paket	Pertanian
222	PDI Perjuangan	sudah rusak, maka sangat perlu pengadaan buku Ende/Bibel HKBP, GKPI, Katholik	Pengadaan buku ende untuk Gereja	Nainggolan	1 paket	Perpustakaan
223	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui kemdaraan, maka perlunya Peningkatan Jalan Desa Sipinggan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
224	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlu Pengadaan bibit ternak babi dan kambing	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Nainggolan	1 paket	Pertanian
225	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat,	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian,	Nainggolan	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		maka perlu Pengadaan bibit Jagung	Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya			
226	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlu Pengadaan Ternak Kerbau	Pengembangan Ternak Kerbau	Sitio-tio	1 paket	Pertanian
227	PDI Perjuangan	masyarakat sangat kekurangan bibit, maka perlu Pengadaan bibit Bawang Merah Batu ijo	Pengembangan Tanaman Bawang Merah	Harian	1 paket	Pertanian
228	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlu Penyediaan Bibit Babi dan Kerbau	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Harian	1 paket	Pertanian
229	PDI Perjuangan	sudah pecah dan rusak maka perlu Perbaikan Irigasi Silamak-lamak Aek Tumpahan	Pembangunan saluran Irigasi	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
230	PDI Perjuangan	sudah rusak dan pecah, maka perlu Perbaikan Irigasi Desa Turpuk Sihotang	Pembangunan saluran Irigasi	Harian	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	PDI Perjuangan	longsor maka perlunya Pembangunan Bronjong Tepi Danau Toba Si Bara-bara sepanjang	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Harian	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui dengan kendaraan maka perlunya Pembangunan Rabat Beton jalan Sosorbaian Desa Sipira	Pembangunan Rabat Beton	Onan Runggu	300 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233	PDI Perjuangan	jalan rusak sulit dilalui kendaraan, maka perlunya Pengaspalan Jalan Hutagodang menuju Gereja HKBP Desa Sipira	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234	PDI Perjuangan	jalan rusak sulit dilalui kendaraan, maka perlunya Pembangunan Rabat Beton dari Jalan Ringroad Upa Suhut Desa Hutaginjang	Pembangunan Rabat Beton	Simanindo	300 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
235	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlunya	Pembangunan Rabat Beton	Onan	200 meter	Pekerjaan Umum dan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		Pembangunan Rabat Beton di Jalan Peasomaila Dusun III Desa Sipira		Runggu		Penataan Ruang
236	PDI Perjuangan	Banyaknya jalan di Desa Sipira yang rusak berat sehingga susah untuk di lalui	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237	PDI Perjuangan	Banyaknya Jalan Yang rusak berlubang, longsor.	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238	PDI Perjuangan	banyaknya jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan saat musim penghujan	Perkerasan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239	PDI Perjuangan	terputusnya jalan antar kecamatan	Pembangunan Jembatan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240	PDI Perjuangan	Keadaan jalan rusak berat, sempit dan belum ada saluran dan jalan ini merupakan akses utama dalam desa	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	PDI Perjuangan	jalan rusak berlubang dan apabila hujan jalan berlumpur sehingga mengganggu aktifitas dan anak seko;lah	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242	PDI Perjuangan	Rabat Beton Lumban Sinaga Lopak-lopak sangatlah perlu karena jalan masih berlobang lobang dan sangat rusak berat.	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	PDI Perjuangan	Jalan tidak memadai untuk dilalui, maka sangat diperlukan Pengaspalan Jalan Poros Desa Sipira	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244	PDI Perjuangan	belum tersedia jalan penghubung ke desa lain, maka perlunya Pembangunan Jembatan Penghubung dari Parsilimaan menuju Sitorang Bonabona Dusun II Desa Parbaba Dolok 4 x 5 meter	Pembangunan Jembatan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245	PDI Perjuangan	jalan kurang memadai untuk dilalui,	Pembangunan Jalan	Seluruh	2 km	Pekerjaan Umum dan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		maka perlunya Pembangunan Jalan dari Parsilimaan menuju Sitorang Bona-bona Dusun II Desa Parbaba Dolok		Kecamatan		Penataan Ruang
246	PDI Perjuangan	jalan kurang memadai dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan dari Simpang II menuju Huta Simataniari Dusun II Janji Maria Toruan Desa Parbaba Dolok (6 m x 2 Km)	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	2 km	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
247	PDI Perjuangan	masyarakat kekurangan air karena belum tersedianya irigasi air Torutoru Dusun I Desa Habeahan Kec. Sianjur Mulamula	Pembangunan saluran Irigasi	Sianjar Mula Mula	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
248	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlunya Penyediaan bibit Ternak Kerbau untuk Desa Lumban Suhisui Toruan (200 Juta)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	1 Paket	Pertanian
249	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlunya Perkerasan Jalan/Sirtunisasi dari Samping RM. Nabasa menuju Lahan Pertanian Dusun II Desa Siopat Sosor (10 x 500 meter)	Perkerasan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlunya Pengadaan Bibit Ternak Babi Desa Lumban Suhisui Dolok (200 juta)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	200 juta	Pertanian
251	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlunya Pengadaan Bibit Ternak Kerbau Kelompok Tani Maduma Dusun Pardomuan Desa Lumban Suhisui Toruan dan Kelompok Tani Wanita Indah Dusun Pardomuan Desa Lumban Suhisui Toruan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Pangururan	400 juta	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
252	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlunya Rabat Beton dari Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Huta Sosor Nadeak Bariba Dusun III Desa Ronggur Nihuta	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
253	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan dari jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Gereja Katolik Ronggur Nihuta Dusun II Desa Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
254	PDI Perjuangan	jalan rusak sulit untuk dilalui, maka perlunya Lanjutan Peningkatan Jalan/Perkerasan Jalan dari Kantor Camat menuju Sibuntuon Desa Sijambur Dusun I Ronggur Nihuta (200 juta)	Perkerasan Jalan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
255	PDI Perjuangan	jalan rusak sulit dilalui maka perlunya Lanjutan Peningkatan Jalan dari Huta Nadeak Bariba menuju Bahal Dusun III Desa Ronggu Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	PDI Perjuangan	sekolah sering dimasuki masyarakat dan tidak aman, maka perlunya Pembuatan Pemagaran di lokasi SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta	Pemagaran Sekolah	Ronggur Nihuta	300 meter	Pendidikan
257	PDI Perjuangan	Lokasi Puskesmas sring dimasuki masyarakat, maka kurangnya keamanan maka perlunya Pemagaran Lokasi Puskesmas Ronggur Nihuta	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Ronggur Nihuta	120 meter	Kesehatan
258	PDI Perjuangan	Buku Ende digereja sudah rusak, maka perlunya Pengadaan Buku Ende Katholik dan Buku Ende HKBP	Pengadaan buku ende untuk Gereja	Ronggur Nihuta	2000 buku	Perpustakaan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
259	PDI Perjuangan	jalan tidak memdai dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan/Rabat Beton Jalan dari Jalan Raya Ronggur Nihuta menuju Sosor Dolok Raja Dusun III Kec. Ronggur Nihuta	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
260	PDI Perjuangan	sudah rusak Puskesmas, maka perlunya Rehab Puskesmas Sidihoni Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKEDES/POLINDES dan sarana pendukung	Ronggur Nihuta	1 paket	Kesehatan
261	PDI Perjuangan	sering terjadi longsor, maka perlunya Pembangunan Saluran dan TPT Jalan di sigorat depan katolik Sigorat Desa Paraduan Kec. Ronggur	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
262	PDI Perjuangan	kurangnya keamanan lokasi sekolah, maka perlunya Pembangunan Pemagaran Sekolah SD Negeri 11 Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta	Pemagaran Sekolah	Ronggur Nihuta	1 paket	Pendidikan
263	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan menuju Sekolah Asisi Tomok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
264	PDI Perjuangan	Rekonstruksi Jalan Huta Irnga menuju Huta Dolok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
265	PDI Perjuangan	Pembuatan Paving Block di Komplek Wisata Sigale-gale Tengah Dusun I Desa Tomok	Paving Block	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
266	PDI Perjuangan	Lanjutan Peningkatan Jalan Lumban Galung menuju Parhudonan Dusun I	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
267	PDI Perjuangan	Pembangunan Tembok Penahan Tala Pudi-pudi Dusun III	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kawasan Permukiman	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
268	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Desa (Pengaspalan) di Dusun III Langge Garoga	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
269	PDI Perjuangan	Pembangunan Tembok Penahan Tala Pudi-pudi Dusun III	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
270	PDI Perjuangan	Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Batumanimbun ke Sitio Dusun II	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pertanian
271	PDI Perjuangan	Peningkatan/perkerasan dan Pembuatan Saluran Jalan Sitio ke Janji Matogu Dusun I	Pembangunan saluran Irigasi	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
272	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT, Saluran dan Paving Block di SDN 17 Dusun II	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pendidikan
273	PDI Perjuangan	Lanjutan Rabat Beton di Huta Imbaru Dusun II	Pembangunan Rabat Beton	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
274	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Lumban Simarmata menuju Siharbangan Dusun III	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
275	PDI Perjuangan	Pemagaran dan Gerbang Sekolah SDN 14 Tanjungan Dusun II	Pemagaran Sekolah	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pendidikan
276	PDI Perjuangan	Lanjutan Rabat Lumban Tonga-tonga Dusun II	Pembangunan Rabat Beton	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
277	PDI Perjuangan	Pembangunan Irigasi Pertanian Lumban Nainggolan Dusun I	Pembangunan saluran Irigasi	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
278	PDI Perjuangan	Pembuatan Bronjong dan TPT Dusun II	Pembangunan Bronjong Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
279	PDI Perjuangan	belum adanya saluran di Huta Uruk-uruk menuju Sitio-tio Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan, panjang 250 meter	Pembangunan saluran Irigasi	Pangururan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
280	PDI Perjuangan	Tembok penahan tanah sudah hancur/longsor, maka perlunya Pembangunan TPT Sisakkil Paraduan Desa Hutnamora	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281	PDI Perjuangan	kurangnya penataan sekolah, maka perlunya penataan Sekolah SMP Satu Atap Negeri 4 Pangururan yaitu Pekerjaan Drainase dan Paving Blok Panjang 70 meter, lebar 30 meter	Penataan Sekolah PUTR	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282	PDI Perjuangan	kurangnya air penampung untuk lahan pertanian, maka perlunya Pembangunan Embung Juma Sigassip Desa Rianiate Kecamatan Pangururan	Pembangunan Embung Air	Pangururan	1 paket	Pertanian
283	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan dan Paving Blok, panjang jalan 300 meter	Pembangunan Jalan Lingkungan	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	PDI Perjuangan	belum adanya DIP dan Saluran air, maka perlunya DIP dan saluran air dengan panjang 166 meter, tinggi 1,5 meter, saluran 166 meter, lebar saluran 30 cm, tinggi saluran 30 cm	Pembangunan Drainase Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	PDI Perjuangan	jalan belum memadai dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton, panjang 140 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
286	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat beton, Leabr 3 meter, panjang 280 meter	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	PDI Perjuangan	jalan belum dapat memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat beton, panjang 380 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	400 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	PDI Perjuangan	belum memadai jalan yang dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton, panjang 400 meter, lebar 3 meter	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton Jalan, panjang 125 meter, lebar 3 meter	Pembangunan Rabat Beton	Harian	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
290	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui karena jalan rusak, maka perlunya Peningkatan Jalan, panjang 80 meter, lebar 3 meter	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	PDI Perjuangan	Rabat beton yang sudah dilaksanakan belum sampai ke tujuan lokasi, maka perlunya Lanjutan Rabat Beton, panjang 175 meter, lebar 3 meter	Pembangunan Rabat Beton	Onan Runggu	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
292	PDI Perjuangan	jalan sulit untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Rabat Beton jalan, panjang 180 meter, lebar 3 meter, tebal 20 cm	Pembangunan Rabat Beton	Ronggur Nihuta	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	PDI Perjuangan	jalan dilalui belum memadai/rusak, maka perlunya Peningkatan jalan , panjang 300 meter, lebar 6 meter,	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	400 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	PDI Perjuangan	Pemagaran belum tuntas, maka perlu Lanjutan Pemagaran Sekolah SMP Negeri 2 Sitio-tio supaya sekolah aman	Pemagaran Sekolah	Sitio-tio	200 meter	Pendidikan
295	PDI Perjuangan	Halaman Sekolah tidak tertata, maka sangat perlu Pemasangan Conblok di Halaman Sekolah SMP Negeri 2 Sitiotio	Paving Block	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
296	PDI Perjuangan	Kantor sudah banyak yang rusak, maka perlunya Rehab Kantor Camat Sitiotio dan Sarana Pendukung seperti Lapotop, Speaker, printer dll	Penataan Kantor Camat	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
297	PDI Perjuangan	Sekolah membutuhkan rehab karena sudah tidak layak, maka sangat diperlukan Rehab 2 kelas SMP Negeri 2 Sitiotio	Rehabilitasi Sanitasi Sekolah	Sitio-tio	1 paket	Pendidikan
298	PDI Perjuangan	gorong-gorong sudak rusak akibat besarnya arus air, sangat perlunya dan mendesak Pembangunan Plat Duiker Huta Paraoan Desa Parsaoran	Pembangunan Bronjong Jalan	Sitio-tio	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	PDI Perjuangan	Pembanguna bronjong belum tuntas mengantisi pasi datangnya arus air apabila musim penghujan maka sangat diperlukan Lanjutan Pembangunan Bronjong Pantai Desa Buntu Mauli sekitar 200 meter	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Sitio-tio	200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	PDI Perjuangan	belum adanya Pembangunan Dermaga/pelabuhan, maka sangat perlu Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Dusun 2 Desa Buntumauli	Pembangunan Dermaga	Sitio-tio	1 paket	Perhubungan
301	PDI Perjuangan	tanah akan longsor karena belum adanya TPT, maka diperlukan Pembangunan TPT di Rsangbosi	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Sitio-tio	50 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
302	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlu Pelaksanaan Sertunisasi terhadap jalan-jalan di Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	PDI Perjuangan	masyarakat sangat membutuhkan air bersih, maka diperlukan 2.Pembangunanpompanisasi dan pipanisasi air bersih dari danau toba ke bak penampungan (reservoar) di Siilaila	Pembangunan Pompanisasi PU	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		Dusun III Siambalo Desa Hutanamora				
304	PDI Perjuangan	Jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan pembangunan jalan (hotmix) di Desa Parmonangan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	PDI Perjuangan	kurangnya pengairan untuk pertanian, maka perlunya 4.Pembangunan pompanisasi untuk mendukung pertanian di Dusun Sidogol Desa Parmonangan	Pembangunan Pompanisasi PU	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air untuk pertanian, maka perlunya Pembangunan embung-embung Peajolo dan di Hutajanji, Pangambatan di Desa Parmonangan	Pembangunan Embung Air	Pangururan	1 paket	Pertanian
307	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan menuju Dusun Sosorganda Upahoda Desa Parmonangan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	PDI Perjuangan	Pustu belum ada tera, maka sangat dibutuhkan Pembangunan/penambahan teras di Pustu Desa Parmonangan untuk mendukung kegiatan lansia dan posyandu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Pangururan	1 paket	Kesehatan
309	PDI Perjuangan	belum tertatanya pantai, maka sangat diperlukan Penataan pantai di Desa Siopat Sosor	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	PDI Perjuangan	belum tersedia jaringan listrik, maka perlu Pembangunan jaringan listrik di Desa Hutatinggi Kec. Pangururan;	Pembangunan Jaringan Listrik	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	PDI Perjuangan	Belum tersedia Kantor Kepala Desa,	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Seluruh	1 paket	Pemberdayaan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		maka dibutuhkan Pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor desa		Kecamatan		Masyarakat dan Desa
312	PDI Perjuangan	belum ada Pembuatan profil desa, maka agar dibuatkan Profil Desa	Penataan Kantor Kepala Desa	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju perkampungan, maka perlu Pembukaan jalan bahal bolon menuju ke pea dusun i (300m) desa situngkir	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	300 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	PDI Perjuangan	jalan belum memadai dilalui, maka perlu Lanjutan jalan hotmix Desa Sinabulan menuju Parhorasan Desa Sinabulan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Perkerasan jalan Sinabulan menuju jalan Salaon Dusun I (550m) di Desa Sinabulan	Pembangunan Jalan	Pangururan	550 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
316	PDI Perjuangan	belum tersedia jalan, maka diperlukan Pembukaan jalan Lumban Sipansa menuju Lumban Suhi Dolok Dusun I Desa Sinabulan	Pembangunan Jalan	Pangururan	800 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	PDI Perjuangan	belum tersedia jalan ke perkampungan, maka perlu pembangunan Jalan Siantar Matio menuju Desa Huta Tinggi Dusun II (900m) Desa Lumban Pinggol	Pembangunan Jalan	Pangururan	900 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	PDI Perjuangan	Pembukaan Jalan Lumban Malau menuju Silobuon Dusun I Desa Lumban Pinggol	Pembukaan Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	900 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka diperlukan Perkerasan Jalan Sitaotao Batu Loting Dusun III Desa Tanjung Bunga	Perkerasan Jalan	Pangururan	800 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	PDI Perjuangan	belum ada jalan, maka perlu Pembukaan Jalan Simpang Sitabu ke Sipittupittu Dusun III Desa Tanjung Bunga	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
321	PDI Perjuangan	jalan belum memadai dilalui, maka perlu Lanjutan peningkatan jalan Tanjung Bunga Sitao-Tao Desa Tanjung Bunga	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Perkerasan jalan Siulak Hosa Dusun III (1000m) Desa Tanjung Bunga	Perkerasan Jalan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	PDI Perjuangan	Pembukaan jalan Setapak Dulang Pagordang Dusun III (1000m) Desa Tanjung Bunga	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Batu Gajah menuju Sijambur Desa Siogung-Ogung	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai dilalui, maka perlu Pembangunan Jalan Huta Gurgur - Sigira Gira (180m) Desa Parsaoran I	Pembangunan Jalan	Pangururan	180 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan perkerasan Aek Nauli ke Parhobonan Dusun II (50m) Desa Aek Nauli	Perkerasan Jalan	Pangururan	50 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	PDI Perjuangan	hjalan menuju lokasi pertanian belum memadai, maka perlu Lanjutan JUT ke Parhobonan Dusun I (700m) Desa Aek Nauli	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	700 meter	Pertanian
328	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Peningkatan Jalan Talun Nabolak-Silombu (1000m) Desa Lumban Suhi Dolok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	PDI Perjuangan	jalan rusak, Pembangunan Jalan Dugul Nangka menuju Lumban Tiga (1500m) Desa Lumban Suhi Dolok	Pembangunan Jalan	Pangururan	1500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan Lumban Siantar ke Sigaruan Desa Lumban Suhi Dolok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
331	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan Lumban Lait-Lait ke Lumban Tiga Desa Lumban Suhi Dolok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	PDI Perjuangan	jalan belum memadai dilokasi pertanian, maka perlu Peningkatan JUT Lumban Siantar-Huta Passur Desa Lumban Suhi Dolok	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1 paket	Pertanian
333	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan depan Kantor Desa Parhorasan menuju SMP N 2 Ronggurnihuta (500m	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
334	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan Protokol Desa Pea Dorma menuju Desa Pardomuan Nauli (1500m) Desa Parhorasan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan protokol di Desa Parhorasan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	PDI Perjuangan	jalan belum ada, maka perlu Pembukaan jalan Lumban Pea menuju Pea Boras (1000m) Desa Parhorasan	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	PDI Perjuangan	belum tersedia jalan, maka perlu Pembukaan jalan Nagatimbul menuju Gotting (1500m) Desa Parhorasan	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan Simpang Pangambatan menuju Pustu Desa Parmonangan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Peningkatan jalan dari HKBP menuju Begedungan Desa Parmonangan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	PDI Perjuangan	jalan belum ada, maka perlu untuk	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000	Pekerjaan Umum dan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		masyarakat Pembukaan jalan dari Pea Jola ke Pea Andehan Desa Parmonangan				Penataan Ruang
341	PDI Perjuangan	belum ada jalan, maka perlu Pembukaan jalan dari Simpang Tugu menuju Pea Tikko (1200m) Desa Parmonangan	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	PDI Perjuangan	Jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan pembukaan jalan Simarpalakka s.d. Sitindo Desa Sitoluhuta	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	PDI Perjuangan	saluran longsor, maka keadaan sekarang saluran tidak ada maka sangat diperlukan sekali Pembangunan saluran gang buntu Lumbanpea Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan	Pembangunan saluran Irigasi	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	PDI Perjuangan	Perkampungan tidak tertata, maka perlu Penataan dengan comblok, saluran Huta Lumbanpea Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	PDI Perjuangan	Rusak, maka perlu Bronjong sungai Siriaon Desa Sitoluhuta	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan Jalan Simarpalaka s.d. Lumban Dagal (3000 m) Desa Sitoluhuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	3000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Lanjutan pembukaan Jalan Simarpalaka s.d. Sitindo (2000m) Desa Sitoluhuta	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	2000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
348	PDI Perjuangan	Jalan sulit dilalui, maka perlu Peningkatan jalan Prokol Desa Pardomuan Nauli Dusun I, II (3000)m	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	3000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	PDI Perjuangan	Jalan belum memadai untuk dilalui, maka	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	2000 meter	Pekerjaan Umum dan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		perlu Peningkatan jalan penghubung Desa Pardomuan Nauli dengan Desa Parhorasan Dusun I (2000m)				Penataan Ruang
350	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan Jalan protokol Desa Pardomuan Nauli	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembukaan JUT Sitonggi-tonggi - Pea Undan Dusun I (1000m) Desa Pardomuan Nauli	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1000 meter	Pertanian
352	PDI Perjuangan	jalan belum ada untuk dilalui kelokasi pertanian, maka perlunya Pembukaan JUT Panangkohan - Sidualappis Dusun I, II (1000m) Desa Pardomuan Nauli	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1000 meter	Pertanian
353	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani Lumban Holang ke Sosor Hutaraja Dusun III (1200m) Desa Lumban Suhi Toruan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1200 meter	Pertanian
354	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlu Pembukaan jalan Lumban Tamba ke Pasir Dusun III (500m) Desa Lumban Suhi Toruan	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
355	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Peningkatan jalan di Dusun Siambalo Desa Hutnamora	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
356	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan Lumban Lobu menuju Talpe Dusun I (1200m) Desa Hutnamora	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
357	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai dilalui, maka perlunya Jalan Simaraek menuju Perkantoran (1200 m) Desa Siopat Sosor	Pembangunan Jalan	Pangururan	1200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
358	PDI Perjuangan	jalan belum ada, maka perlunya Pembukaan Jalan Saitnihuta menuju Lumban Ganda (900 m) Desa Siopat Sosor	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	900 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
359	PDI Perjuangan	Longsor, maka perlu Pembangunan jembatan penghubung sait nihuta menuju lumban turnip desa siopat sosor	Pembangunan Jembatan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
360	PDI Perjuangan	Longsor, maka diperlukan Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan saluran di Huta Dolok Desa Parbaba Dolok	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
361	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlunya Sirtunisasi jalan protokol Desa Parbaba Dolok dari Simanampang menuju Sosor Tolong (5000 m)	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	5000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
362	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlu Pembukaan jalan dari Lumban Sinaga menuju Simpang Buah Nagam (5000m) Desa Parbaba Dolok	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	5000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlunya Sirtunisasi jalan dari Simpang Dusun II menuju gereja Katholik Janji Maria Toruan (4500 m) Desa Parbaba Dolok	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	4500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	PDI Perjuangan	jalan belum tersedia, maka perlu Pembukaan jalan dari Papartahi menuju Siminggir Inggir (1000 m) Desa Parbaba Dolok	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
365	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air air ke lokasi pertanian, maka sangat membutuhkan Pembuatan embung di Pea Sibatu Desa Parbaba Dolok	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
366	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air ke lokasi pertanian, maka perlu Pembuatan embung di Sosor Lintong Desa Parbaba Dolok	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
367	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani Lumban Sinabang II menuju Sidinding (1500m) Desa Hutabolon	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1500 meter	Pertanian
368	PDI Perjuangan	Jalan rusak, amak perlu Pembangunan Jalan Sosor Ganda menuju Sianjur (150 m) Desa Hutabolon	Pembangunan Jalan	Pangururan	150 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
369	PDI Perjuangan	belum ada tersedia embung , maka perlu Pembangunan embung pariwisata dan pertanian di Desa Hutabolon;	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
370	PDI Perjuangan	jalan longsor, maka perlu Pembuatan dyk Jln Sinabang II menuju Sidinding Desa Hutabolon	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
371	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Sirtunisasi jalan protokol Pangururan-Simanindo menuju Pantai Silambo (2000m) Desa Sianting-Anting	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	2000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
372	PDI Perjuangan	belum tersedianya embung, maka perlu Pembuatan embung Panjaitan Uruk Desa Sianting-Anting;	Pembangunan Embung Air	Pangururan	1 paket	Pertanian
373	PDI Perjuangan	Jalan belum dapat dilalui, maka perlu Pembukaan jalan Kaminte-Sibuttak (400m) Desa Sianting-Anting;	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	400 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
374	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan hotmix dan saluran jalan Desa Sianting Anting;	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
375	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Peningkatan jalan /hotmix Lumban Godang menuju Lumban Pansur (1500 m) Desa Saitnihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
376	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian Pembukaan Jalan Usaha Tani Lumban Godang menuju Sigalingging (300m) Desa Saitnihuta	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	300 meter	Pertanian
377	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Peningkatan Jalan Sosor Tambok menuju Sosor Buntu (850 M) Desa Hutatinggi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	850 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
378	PDI Perjuangan	belum ada jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan JUT Simullop menuju Sosor Malau (100m) Desa Hutatinggi	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	100 meter	Pertanian
379	PDI Perjuangan	masyarakat kekurangan air, maka perlu Pembangunan embung air di Silombu Desa Hutatinggi	Pembangunan Embung Air	Pangururan	1 paket	Pertanian
380	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Peningkatan Jalan Onan Toguan menuju Butar Desa Rianiate	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
381	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan Jalan Onan Runggu menuju Upaitok (700m) Desa Rianiate	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	700 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
382	PDI Perjuangan	belum ada jalan, maka perlu Pembukaan jalan dari jalan nasional menuju Sialaman (700m) Desa Rianiate	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	700 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
383	PDI Perjuangan	masyarakat kekurangan air, maka perlu Pembangunan embung di Upaogung Desa Rianiate	Pembangunan Embung Air	Pangururan	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
384	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan pembukaan jalan menuju Kantor Desa Pardomuan I	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
385	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai dilalui, maka perlu Peningkatan Jalan Kol. Liberty Malau (belakang) Desa Pardomuan I	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
386	PDI Perjuangan	jalan belum ada menuju perkampungan, maka sangat diperlukan Pembukaan jalan lingkungan samping Telkom Desa Pardomuan I	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
387	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Peningkatan Jalan Huta Silalahi sampai ke Siparale-Ale (1600m) Desa Pardomuan I	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1600 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
388	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan pembukaan Jalan Siguminar (1000m) Desa Pardomuan I	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
389	PDI Perjuangan	masyarakat memlukan air, maka diperlukan Pembangunan embung di Simandeye Desa Pardomuan I	Pembangunan Embung Air	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pertanian
390	PDI Perjuangan	jalan menuju lokasi pertanian belum ada, maka sangat dibutuhkan Peningkatan JUT Buntu Pangaloan menuju Batu Lomlom Desa Pardugul	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pertanian
391	PDI Perjuangan	kampung tidak tertata, maka sangat diperlukan Penataan (Paving Block) dan saluran Kampung Lumban Binanga Desa Pardugul	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
392	PDI Perjuangan	Ruang rapat Kantor Desa minim dan agar ada ruang pertemuan maka sangat diperlukan Pembuatan/Pembenahan membuat ruang rapat terbuka untuk di Lokasi Dusun II Desa Pardugul	Penataan Kantor Kepala Desa	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
393	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air, maka perlunya Penataan irigasi Lintong dan Parondas Desa Pardugul	Pembangunan Jaringan Irigasi Tertier	Pangururan	1	Pertanian
394	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Sirtunisasi Jalan Utama Huta Sitiotio Desa Pardugul	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
395	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan objek wisata Busok Mangalandong/Sianggo Ihurna Desa Pardugul	Pembukaan Objek Wisata (Sesuai RIPO)	Pangururan	1 paket	Pariwisata
396	PDI Perjuangan	sangat dibutuhkan Pembangunan gedung Kantor Camat Pangururan dan Sarana Prasarana Kantor Camat	Penataan Kantor Camat	Pangururan	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
397	PDI Perjuangan	sudah ada yang rusak, maka sangat diperlukan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pasar Pangururan	Rehabilitasi Gedung	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398	PDI Perjuangan	perlunya penataan dilokasi situs, makaperlu Pembangunan jalan menuju Paromasan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
399	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlunya Pembangunan jalan di Kelurahan Pintusona	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
400	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan ke SD N 12 Pintusona	Pembangunan Jalan	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
401	PDI Perjuangan	rusak, maka perlu Perbaikan jalan, dyk TPT Papanggual Desa Parlondut	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
402	PDI Perjuangan	longsor, maka perlunya Bronjong Binanga Sitanggung/ SD 26 (diatas jalan protokol) Desa Situngkir	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
403	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Pembangunan Hotmix Silombu-Sosor Buntu Desa Hutatinggi	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
404	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan perkampungan Sosor Kobun Desa Hutatinggi	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
405	PDI Perjuangan	belum memadai, maka perlu Lanjutan bronjong rumah pompa Desa Panampangan	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
406	PDI Perjuangan	belum ada sarana, maka dibutuhkan Pengadaan mesin pupuk organik Desa Parsaoran I	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Pangururan	1 paket	Pertanian
407	PDI Perjuangan	belum ada jalan, amak dibutuhkan Pembukaan jalan dari jembatan Lumban Tonga-Tonga menuju perladangan Desa Sialanguan	Pembukaan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
408	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Peningkatan jalan protokol Desa Aek Nauli	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
409	PDI Perjuangan	jalan belum memadai dilalui, maka perlu Peningkatan jalan dari Simpang HKBP menuju Buntu Mauli Desa Parmonangan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
410	PDI Perjuangan	jalan belum emmadai untu dilalui, maka perlu Peningkatan jalan dari pangambatan menuju HKBP Desa Parmonangan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
411	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka dibutuhkan Pengaspalan/rabat beton jalan antar Desa Alngit Lumban Saragi ke Sibuntuon Desa Lumban Suhi Toruan	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
412	PDI Perjuangan	ljalan tidak memadai utnuk dilalui, maka dibutuhkan Peningkatan jalan/sirtunisasi siantar matio menuju desa huta tinggi desa lumban pinggol	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
413	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka sangat dibutuhkan Pembangunan rabat beton/conblok di Dusun Lumban Sihaloho Desa Parbaba Dolok sepanjang 1000:1,5 meter	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
414	PDI Perjuangan	kurangnya pupuk, maka dibutuhkan Pengadaan pupuk organik cair untuk kelompok tani	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Pangururan	1 paket	Pertanian
415	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlu Pengadaan ternak kerbau, babi, sapi bali; sapi perah, sapi potong	Pengembangan Ternak Kerbau	Pangururan	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
416	PDI Perjuangan	belum tertata huta, maka perlu Penataan Perkampungan Simandege Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
417	PDI Perjuangan	belum memadai, maka dibutuhkan Lanjutan pembangunan Jalan Simandege-Huta Tinggi Dusun I Pardomuan I Kecamatan Pangururan	Pembangunan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
418	PDI Perjuangan	belum tertata, maka dibutuhkan Penataan Perkampungan Huta Sigalingging Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
419	PDI Perjuangan	belum memadai, maka perlu Lanjutan peningkatan Jalan Huta Simalango Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
420	PDI Perjuangan	belum memadai, maka dibutuhkan Pembangunan dan penataan Permukiman Lumban Hariara Dusun III Sitaotao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
421	PDI Perjuangan	longsor, maka dibutuhkan Pembangunan TPT atau saluran kompleks SMP Negeri 3 Pangururan Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
422	PDI Perjuangan	longsor, maka dibutuhkan Pembangunan TPT atau saluran jalan simpang Sinaborno Dohon I Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
423	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan TPT atau saluran jalan Upahoda-Silombu Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
424	PDI Perjuangan	Longsor, maka perlu Pembangunan TPT atau saluran Lumban Silalahi-Tiga Bodai Dusun I Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
425	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Rabat beton/conblok Lumban Sihalo Desa Parbaba Dolok Pajangan 1000 Meter ; 1,5 meter Kecamatan Pangururan	Pembangunan Rabat Beton	Pangururan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
426	PDI Perjuangan	Jalan tidak memadai, maka dibutuhkan Pembangunan dyk di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
427	PDI Perjuangan	tidak tertata, maka dibutuhkan Penataan perkampungan Desa Tanjungbunga Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
428	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan dyk Jalan Tanjung Bunga menuju Sitao-Tao Kecamatan Pangururan	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
429	PDI Perjuangan	belum memadai, maka perlu Lanjutan peningkatan jalan menuju Lumban Silalahi Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
430	PDI Perjuangan	kurangnya keamanan, maka perlu Pemagaran Pustu Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Pangururan	1 paket	Kesehatan
431	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan Perkampungan Barung-Barung Dusun III Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan	Penataan Kampung / Huta	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
432	PDI Perjuangan	belum memadai, maka perlu Lanjutan pembangunan bronjong rumah pompa air Desa Panampangan Kecamatan Pangururan	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
433	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai kelokasi pertanian, maka perlu Lanjutan pembangunan Jalan Usaha Tani Jalan Lumban Tinggir Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1 paket	Pertanian
434	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan dari Sigansip – SND 9 Sijambur – Gereja Katolik Desa Sijambur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
435	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Lanjutan peningkatan jalan di Lumban Dolok menuju Lumban Sinurat Desa Sijambur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
436	PDI Perjuangan	kurangnya penghasilan masyarakat, maka perlu Pengadaan ternak sapi Desa Lintong Nihuta	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
437	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan jalan dusun-dusun Desa Lintong Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
438	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Pembangunan jalan menuju Pallimutan Desa Lintong Nihuta	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
439	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan Tanggul Binaga Sigubang Desa Sabungan Nihuta	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
440	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlunya Pembangunan jalan di Desa	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
		Sabungan Nihuta				
441	PDI Perjuangan	belum ada chekdam, maka perlu Pembangunan chekdum di Desa Ronggur Nihuta	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
442	PDI Perjuangan	jalan rusak, amak perlu Pembangunan jalan dari Sidihoni - Paraduan Desa Paraduan	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
443	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan Sabungan Nihuta - Paraduan Desa Paraduan	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
444	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat, maka perlu Pembangunan pompanisasi/saluran air bersih di Desa Paraduan	Pembangunan Pompanisasi PU	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
445	PDI Perjuangan	belum tertata, maka dibutuhkan Penataan Pea Porohan Desa Salaon Toba	Penataan Kampung / Huta	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
446	PDI Perjuangan	operasional sudah tidak layak, maka perlu Pengadaan Kenderaan Dinas Kepala Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Ronggur Nihuta	1 paket	Kesehatan
447	PDI Perjuangan	sudah rusak, maka dibutuhkan Rehabilitasi Rumah Batak di lokasi Pea Porohan Desa Salaon Toba	Rehabilitasi Gedung	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
448	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Peningkatan jalan dari Simpang Polma menuju Salaon Dolok di Desa Salaon Tonga-Tonga	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
449	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan masyarakat, maka perlu Pengadaan penggiling pupuk organik/pembangunan rumah kompos di Desa Salaon Dolok	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
450	PDI Perjuangan	belum ada tertata, maka dibutuhkan Penataan dan pembangunan tribun lapangan Kantor Camat Ronggurnihuta	Penataan Kantor Camat	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
451	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan jalan dari Simpang Kantor Camat Ronggurnihuta menuju Langgelange	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
452	PDI Perjuangan	rusak, maka dibutuhkan Perbaikan tala air tawar Ronggurnihuta	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
453	PDI Perjuangan	kurangnya kenyamanan dan keamanan kantor, maka dibutuhkan Pemagaran keliling Kantor Camat Ronggurnihuta	Penataan Kantor Camat	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
454	PDI Perjuangan	longsor, maka dibutuhkan Pembangunan TPT di Jalan Pangurusan - Lumban Sihombing Lokasi Pea Tali	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
455	PDI Perjuangan	sekolah tidak nyaman dan aman, maka dibutuhkan Pemagaran sekolah di Desa Ronggur Nihuta	Pemagaran Sekolah	Ronggur Nihuta	1 paket	Pendidikan
456	PDI Perjuangan	masyarakat butuh air, maka dibutuhkan Pengembangan jaringan air bersih Desa Ronggur Nihuta	Penambahan Jaringan Air Bersih	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
457	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Ronggur Nihuta	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
458	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai dilalui, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Lintong Nihuta	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
459	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, Pembangunan jalan di Desa Salaon Toba	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
460	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Salaon Tonga-tonga	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
461	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Salaon Dolok	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
462	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Sijambur	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
463	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Paraduan	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
464	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan petani, maka perlu Pengadaan pupuk organik cair untuk kelompok tani	Pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, kompos, bibit	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
465	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan masyarakat, maka perlu Pengadaan ternak kerbau, babi, sapi bali; sapi perah, sapi potong	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
466	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan lingkungan	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
467	PDI Perjuangan	belum adanya jalan menuju lokasi pertanian, maka perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
468	PDI Perjuangan	belum tersedia, maka dibutuhkan Penyusunan data base jaringan jalan setiap kecamatan di Kabupaten Samosir	Penambahan Jaringan Sanitasi	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
469	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan Jalan Simpang Aek Liang-Kantor Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
470	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai ke lokasi pertanian , maka perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani Sibanebane-Batu Dorpi Desa Paraduan Kecamatan Ronggurnihuta	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
471	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan bronjong Sungai Sigumbang Desa Paraduan Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
472	PDI Perjuangan	belum ada jalan ke lokasi pertanian, maka perlu Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Babaramo/Sibatu-batu Desa Saloon Toba Kecamatan Ronggurnihuta	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
473	PDI Perjuangan	longsor, maka dibutuhkan Pembangunan saluran / TPT jalan Lumban Sangkalan – Lumban Malau Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
474	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka dibutuhkan Pembangunan jalan lingkungan Perkantoran Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Jalan Lingkungan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
475	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan lingkungan GPI-lumban Borhu Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Jalan Lingkungan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
476	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Lanjutan pembangunan jalan Lumban Dugul Dusun I Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Jalan	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
477	PDI Perjuangan	belum ada penataan, maka dibutuhkan Penataan kompleks GPDI Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggurnihuta	Penataan Kampung / Huta	Ronggur Nihuta	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
478	PDI Perjuangan	Sudah tidak layak, maka perlu Pembangunan Kantor Kecamatan Simanindo	Penataan Kantor Camat	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
479	PDI Perjuangan	tidak layak karena rusak, maka perlu Pembangunan Kantor Kelurahan Tuktuk Siadong	Penataan Kantor Kepala Desa	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
480	PDI Perjuangan	tidak layak, maka perlu Pembangunan dan penataan objek wisata Pagar Batu di Desa Pardomuan	Penataan Objek Wisata	Simanindo	1 paket	Pariwisata
481	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air, maka perlu Pembangunan waduk di Desa Garoga dalam mewujudkan ketahanan pangan	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
482	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan halaman dan pemagaran Gereja HKBP Malau Desa Cinta dame	Penataan Gereja	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
483	PDI Perjuangan	sekolah tidak aman dan nyaman, maka perlu Pemasangan paving blok dan pemagaran SD Negeri 18 Simanindo Desa Simarmata	Pemagaran Sekolah	Simanindo	1 paket	Pendidikan
484	PDI Perjuangan	Pemasangan paving blok di SMPN 2 Simanindo Desa Simarmata	Penataan Sekolah PUTR	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
485	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan Pengadaan mesin pengelola sampah pada setiap desa dan pengadaan beca bermotor roda tiga untuk mengangkut sampah	Pembangunan TPA	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
486	PDI Perjuangan	belum ada, maka dibutuhkan Fasilitas sertifikasi aset desa khususnya jalan-jalan desa yang berhubungan dengan tanah masyarakat	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Simanindo	1 paket	Kesehatan
487	PDI Perjuangan	tergenang air apabila datang hujan, maka perlunya Penataan Tanah Lapang Ambarita	Penataan Kampung / Huta	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
488	PDI Perjuangan	air danau toba kotor, maka perlunya Penanganan eceng gondok di sekitar perairan Desa Ambarita	Pengembangan UMKM	Simanindo	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
489	PDI Perjuangan	Pengembangan Wisata belum ada, maka perlu Pengembangan wisata gunung ke Sioma Pea Desa Ambarita	Penataan Objek Wisata	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pariwisata
490	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan jalan Karya Bhakti TNI berupa perkerasan jalan/sirtunisasi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
491	PDI Perjuangan	belum tersedia listrik, maka perlu Pemasangan tiang listrik menuju Kantor Desa Martoba	Pembangunan Jaringan Listrik	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
492	PDI Perjuangan	rusak, maka perlu Pembangunan lantai Kantor Desa Martoba	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Simanindo	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
493	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Lanjutan peningkatan jalan dari jalan protokol menuju Kantor Desa Martoba	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
494	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Pembangunan jalan Pasar Baru Tomok sepanjang 400 meter	Pembangunan Jalan	Simanindo	400 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
495	PDI Perjuangan	Pembangunan jalan ke objek wisata kuburan tua, Tomok	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
496	PDI Perjuangan	Perlu pengerukan lumpur atas tindakan normalisasi sungai di Desa Tomok	Normalisasi Sungai	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
497	PDI Perjuangan	Tindaklanjut pembangunan water front city	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
498	PDI Perjuangan	Relokasi pedagang souvenir dampak dari pembangunan gedung Alfamidi	Pengembangan UMKM	Simanindo	1 paket	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
499	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Perbaikan jalan Inpres menuju kandang kuda Kelurahan Tuktuk Siadong belum maksimal	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
500	PDI Perjuangan	sampah menumpuk maka perlu Pengadaan dump truck untuk pengangkutan sampah	Pengadaan Dump Truck	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
501	PDI Perjuangan	tidak layak, maka perlu Pembangunan Kantor Desa Simanindo	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Simanindo	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
502	PDI Perjuangan	Tidak ada Bidan Desa, maka sangat dibutuhkan Pengadaan Bidan Desa di Desa Simanindo	Penempatan Bidan Desa	Simanindo	1 paket	Kesehatan
503	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pengerasan/sirtunisasi jalan usaha tani di Kelurahan Tuktuk Siadong	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Simanindo	1 paket	Pertanian
504	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Pembangunan jalan dari Simpang Jalan Nasional menuju Sihusapi	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
505	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan dari Simpang Jalan Nasional menuju Dusun Peanamalum Desa Sihusapi	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
506	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai untuk dilalui, maka perlu Pembangunan Jalan Simpang Jalan Nasional menuju SMA Negeri 1 Simanindo	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
507	PDI Perjuangan	tidak sarana iar bersih, maka perlu Pemasangan pipanisasi air PAM ke SMA Negeri 1 Simanindo	Pengembangan Jaringan Air Bersih	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
508	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Peningkatan jalan di Desa Marlumba	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
509	PDI Perjuangan	sudh miring, maka perlu Perbaikan tiang listrik di Dusun Janji Martahan Desa Marlumba	Pembangunan Jaringan Listrik	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
510	PDI Perjuangan	masyarakat membutuhkan air, maka perlu Pembangunan embung di Desa Tomok Parsaoran	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
511	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai dilalui, maka perlu Pembangunan jalan menuju Sekolah Asisi Tomok	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
512	PDI Perjuangan	Penyambungan/pipanisasi air bagi warga Tomok Parsaoran agar warga mengurangi pemakaian mesin penghisap/jetpam air dari Danau Toba	Pengembangan Jaringan Air Bersih	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
513	PDI Perjuangan	Kantor tidak layak, maka perlu Pembangunan Kantor Desa Garoga	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Simanindo	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
514	PDI Perjuangan	Jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan menuju pasir putih Pea Desa Siallagan Pinda Raya	Pembangunan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
515	PDI Perjuangan	kurangnya fasilitas sekolah Pembangunan WC/kamar mandi SMP Negeri 1 Ambarita	Pembangunan Sanitasi Sekolah	Simanindo	1 paket	Pendidikan
516	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan pekarangan Gereja Khatolik Simanindo	Penataan Gereja	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
517	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan pekarangan Gereja GKPI Simanindo	Penataan Gereja	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
518	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan pekarangan Pustu Desa Simanindo	Rehabilitasi Gedung PUSTU/POSKESDES/POLINDES	Simanindo	1 paket	Kesehatan
519	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Pembuatan paving blok di kompleks Wisata Sigael-Gale Tengah Desa Tomok Parsaoran, Dusun I Kecamatan Simanindo	Penataan Objek Wisata	Simanindo	1 paket	Pariwisata
520	PDI Perjuangan	jalan belum maksimal, maka perlu Lanjutan peningkatan Jalan Lumban Galung menuju Parhudonan Dusun I Desa Tomok Kecamatan Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
521	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Tembok penahan Tala Pudi-Pudi Dusun 3 Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
522	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Rekonstruksi jalan Huta Irga menuju Huta Dolok Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
523	PDI Perjuangan	belum tertata, maka dibutuhkan Penataan lingkungan pekarangan di Dusun 3 Raut Bosi Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo (7 bahal)	Penataan Kampung / Huta	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
524	PDI Perjuangan	longsor, maka diperlukan Pembangunan box-culvert/TPT/saluran menuju SD Negeri 2 Martoba	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
525	PDI Perjuangan	jalantidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan penghubung/kabupaten dari Tambun Sukkean-Sitamiang dan Pardomuan sepanjang 2 kilometer	Pembangunan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
526	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka dibutuhkan Perbaikan jalan dari Kantor Desa Sipira menuju Jalan Nasional	Perkerasan Jalan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
527	PDI Perjuangan	kurang nyaman dan aman, maka diperlukan Pemagaran Puskesmas Onan Runggu	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Onan Runggu	1 paket	Kesehatan
528	PDI Perjuangan	belum ada penataan, maka perlu Penataan pekarangan Gereja Khatolik St. Petrus Janji Maria Desa Hutahotang	Penataan Gereja	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
529	PDI Perjuangan	tidak tertata, maka perlu Penataan pekarangan Gereja Khatolik Stasi Jungjungan Desa Sipira	Penataan Gereja	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
530	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat, maka diperlukan Pengadaan hand sprayer elektrik kepada kelompok tani se-Kecamatan Onanrunngu	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
531	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat/petani, maka perlu Pengadaan hand traktor kepada kelompok tani	Pengadaan Sarana/Alat-Alat Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
532	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat/petani maka perlu Pengadaan mesin pemipil jagung kepada kelompok tani	Pengadaan Mesin Pertanian	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
533	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat, maka perlu Pengadaan mesin pompa air bersih di Dusun Parhorasan dan Desa Hutahotang	Pengadaan Pompa Air	Onan Runggu	1 paket	Pertanian
534	PDI Perjuangan	Pembangunan jembatan penghubung dari Objek Wisata Pondok Remaja ke Perkampungan Lagundi Desa Sitamiang	Pembangunan Jembatan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
535	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan lingkungan menuju Buntu Pasir Desa Onan Runggu	Pembangunan Jalan Lingkungan	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
536	PDI Perjuangan	rusak, maka perlu Perbaikan/pembangunan Dermaga Sitingjak Desa Sitingjak	Pembangunan Dermaga	Onan Runggu	1 paket	Perhubungan
537	PDI Perjuangan	belum tertata, maka diperlukan Penataan pekarangan Gereja Khatolik Sukkean	Penataan Gereja	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
538	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan pekarangan Gereja Khatolik Janji Matogu	Penataan Gereja	Onan Runggu	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
539	PDI Perjuangan	rusak, maka dibutuhkan Rehab rumah dinas guru SD Negeri 5 Huta Hotang	Rehabilitasi Gedung Perumahan Guru	Onan Runggu	1 paket	Pendidikan
540	PDI Perjuangan	jalan yang putus akibat longsor, maka perlu Perbaikan jalan Desa Pananggangan Dusun I,	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
541	PDI Perjuangan	dengan kondisi kiri kanan jalan adalah jurang, maka perlu Perbaikan jalan Desa Huta Rihit,	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
542	PDI Perjuangan	rusak, maka perlu Perbaikan saluran di Kelurahan Sirumahombar	Pembangunan saluran Irigasi	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
543	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan jalan poros Desa Harian - Toguan Galung - Janji Matogu	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
544	PDI Perjuangan	rusak, maka perlu Perbaikan jalan Simpang Tiga Nainggolan menuju Kelurahan Parhusip III - Janji Marrapot	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
545	PDI Perjuangan	jalan rusak, maka perlu Pembangunan rabat beton jalan Sibual-Bual Desa Janji Marrapot	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
546	PDI Perjuangan	halaman tidak tertata, maka perlu Penataan halaman sekolah SD 5 Janji Marapot, dengan pembuatan paving block	Penataan Sekolah PUTR	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
547	PDI Perjuangan	belum ada jaringan listrik, maka perlu Pemasangan jaringan listrik kepada 4 KK di Desa Huta Rihit	Pembangunan Jaringan Listrik	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
548	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Perbaikan (minimal sirtunisasi) jalan menuju SD 9 Huta Rihit	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
549	PDI Perjuangan	dengan kondisi saat ini kemiringan jalan sangat tajam sehingga sering terjadi kecelakaan maka perlu Perbaikan konstruksi jalan (penimbunan) dari jalan nasional menuju Puskesmas Sirait,	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
550	PDI Perjuangan	longsor, Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) perkampungan Banjar Tonga Desa Pangaloan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
551	PDI Perjuangan	Pemenuhan guru-guru pada sekolah-sekolah di Kecamatan Nainggolan	Penambahan Guru Honorer di SD dan SMP	Nainggolan	1 paket	Pendidikan
552	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlu Penataan lokasi (paving block) TK Negeri Nainggolan	Penataan Sekolah PUTR	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
553	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan jalan GKPI Nainggolan menuju SMP	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
554	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Membuat bronjong Sungai Siliot Desa Sibonor Ompuratus	Pembangunan Bronjong Kawasan Permukiman	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
555	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat, maka perlu Pembangunan saluran Pudi Ruma Desa Nainggolan	Peningkatan Kapasitas Air Bersih	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
556	PDI Perjuangan	sekolah tidak aman dan nyaman, maka perlu Pemagaran SD 2 Nainggolan	Pemagaran Sekolah	Nainggolan	1 paket	Pendidikan
557	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan rabat beton jalan Simpang Kantor Desa Nainggolan-Desa Janji Marrapot	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
558	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan gorong-gorong jalan Simpang Karya menuju Tinggi-Tinggi Desa Nainggolan	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
559	PDI Perjuangan	Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Pananggangan	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Nainggolan	1 paket	Kesehatan
560	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Pembangunan jalan di Desa Sipinggan Lumbansiantar	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
561	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Perbaikan jalan Simpang Sigumbang menuju SMP 1 Nainggolan	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
562	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Perbaikan jalan SMP 2 Nainggolan menuju SMK 1 Nainggolan	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
563	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan masyarakat, maka perlu Pengadaan bibit babi indukan	Pengembangan Ternak Babi	Nainggolan	1 paket	Pertanian
564	PDI Perjuangan	Jalan rusak, maka perlu Pembangunan Rabat Beton Pollak Gilling	Pembangunan Rabat Beton	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
565	PDI Perjuangan	jalan memadai, maka perlu Peningkatan Jalan Pintu Batu-Harapan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
566	PDI Perjuangan	Pengalihan Jalan Halaman SDN 11 Pasaran Parsaoran	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
567	PDI Perjuangan	Pengalihan Jalan Halaman SDN 21 Pasaran Parsaoran	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
568	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan Tembok Penahan (TPT) Lingkungan SDN 21 Pasaran Parsaoran	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
569	PDI Perjuangan	40.Peningkatan Gedung dan rumah dinas SDN 21 Pasaran Parsaoran	Revitalisasi Gedung	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
570	PDI Perjuangan	kebutuhan masyarakat, maka perlu Pembangunan Air Minum Hutaginjang Dusun III	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
571	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui maka perlu Pembangunan Jalan Lingkungan huta Londut Dusun III Desa Pasaran Parsaoran	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
572	PDI Perjuangan	jalan tidak memadai, maka perlu Peningkatan Jalan Kantor Desa Pasaran Parsaoran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
573	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Penghubung Kecamatan Nainggolan menuju Kecamatan Palipi Hutaginjang-Pamutaran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
574	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Pembangunan Jalan antar Desa Pasaran Parsaoran menuju Desa Pasaran I Kecamatan Nainggolan	Pembangunan Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
575	PDI Perjuangan	sekolah tidak aman dan nyaman maka perlu Pembangunan pagar Pembangunan pagar SD 13 Gorat Pallombuan	Pemagaran Sekolah	Palipi	1 paket	Pendidikan
576	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Peningkatan jalan Marhalim Desa Urat Timur menuju Desa Pamutaran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
577	PDI Perjuangan	6. Renovasi Kantor Camat Palipi, dimana kantor camat palipi saat ini masih bangunan lama yang sudah kurang memadai lagi pemanfaatannya, seperti aula kantor yang sangat sempit	Penataan Kantor Camat	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
578	PDI Perjuangan	sudah banyak rusak, Renovasi Rumah Dinas Camat Palipi	Penataan Kantor Camat	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
579	PDI Perjuangan	longsor, maka perlu Pembangunan dyk Binanga Simundea Desa Gorat Pallombuan	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
580	PDI Perjuangan	Renovasi Kantor Desa Gorat Pallombuan, dimana kondisi saat ini atap kantor sudah bocor	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Palipi	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
581	PDI Perjuangan	jalan belum memadai, maka perlu Pembangunan rabat beton dari Lumban Dolok menuju buttu Mauli Desa Hatoguan	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
582	PDI Perjuangan	jalan sulit dilalui, maka perlu Pembangunan jalan Simpang Rindu menuju Lumban Nahor Desa Hatoguan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
583	PDI Perjuangan	Peningkatan jalan area pertanian dari Sibatuara menuju Siorsior Desa Urat Timur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
584	PDI Perjuangan	Pembangunan Jalan Hotmix dari Huta Lumban Pande Desa Urat timur menuju Desa Sipira Kecamatan Onanrunggu	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
585	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan menuju si Aek Mual Desa Urat Timur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
586	PDI Perjuangan	Lanjutan pembangunan rabat beton Simpang Martabe Desa Suhutnihuta Pardomuan	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
587	PDI Perjuangan	Pengembangan Jalan Usaha Tani Junjungan Galung Desa Parsaoran Urat	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Palipi	1 paket	Pertanian
588	PDI Perjuangan	Pembangunan Drainase Jalan Dusun Simangambong Sibabiat Desa Parsaoran Urat	Pembangunan Drainase Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
589	PDI Perjuangan	Peningkatan jalan Pondok Bulu (Sosor Simundea) Dusun I Desa Urat II	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
590	PDI Perjuangan	Pembangunan Pustu Sihilap Dusun III Desa Urat II	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKEDES/POLINDES dan sarana pendukung	Palipi	1 paket	Kesehatan
591	PDI Perjuangan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di SDN 24 Gorat Pallombuan Dusun II	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
592	PDI Perjuangan	Pembangunan Jembatan Siriaon Dusun I Desa Palipi	Pembangunan Jembatan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
593	PDI Perjuangan	Pembangunan lokasi Agrowisata Sosor Galung Dusun III Desa Palipi	Penataan Objek Wisata	Palipi	1 paket	Pariwisata
594	PDI Perjuangan	Lanjutan perbaikan jalan menuju Simanuk-manuk Dusun I Desa Pardomuan Nauli	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
595	PDI Perjuangan	Pelebaran Jembatan Simanuk-manuk Dusun I Desa Pardomuan Naul	Pembangunan Jembatan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
596	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan Sitapongan Dusun III Desa Hatoguan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
597	PDI Perjuangan	Pipanisasi air minum Langge-langge ke Parbulan Dusun II Desa Saornauli Hatoguan	Peningkatan Kapasitas Air Bersih	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
598	PDI Perjuangan	Pembangunan rabat beton Siumpat ke Tangga Bosi Dusun III Desa Simbolon Purba	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
599	PDI Perjuangan	Pembangunan pengadaan air minum dari Binanga Rimau ke Tangga Bosi Desa Simbolon Purba	Peningkatan Kapasitas Air Bersih	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
600	PDI Perjuangan	Pembangunan Jaringan Listrik Lumban Malau ke Nahornop Desa Simbolon Purba	Pembangunan Jaringan Listrik	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
601	PDI Perjuangan	Pembukaan Jalan Tapian Nauli batas Hutatinggi Dusun II Desa Simbolon Purba	Pembukaan Jalan Lingkungan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
602	PDI Perjuangan	Pembangunan Jembatan Dusun I dan II Desa Hutaginjang	Pembangunan Jembatan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
603	PDI Perjuangan	Pembangunan jalan dari Simpang Hutaginjang menuju Lintongnihuta Kecamatan Ronggurnihuta	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
604	PDI Perjuangan	Sertunisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Agrowisata Sampean Desa Sigaol Simbolon	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Palipi	1 paket	Pertanian
605	PDI Perjuangan	JUT, TPT, Saluran Air, Rabat Beton jalan Uruk Bolon Simpang P. Sihotang ke Sampean Desa Sigaol Simbolon	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Palipi	1 paket	Pertanian
606	PDI Perjuangan	Pembangunan Jembatan Simarhaliang Dusun I Desa Sigaol Marbun	Pembangunan Jembatan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
607	PDI Perjuangan	Peningkatan jalan Paraduan ke Buntu Mauli Desa Sideak	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
608	PDI Perjuangan	Peningkatan jalan Sideak dari Simanampang ke Sibosa Desa Sideak	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
609	PDI Perjuangan	Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Dusun I, II dan III Desa Pallombuan	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
610	PDI Perjuangan	Lanjutan Rabat Beton, JUT Parsambilan Desa Pallombuan	Pembangunan Rabat Beton	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
611	PDI Perjuangan	Pembangunan jalan Sisonggur ke Siguri-guri Desa Huta Dame	Pembangunan Jalan	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
612	PDI Perjuangan	Peningkatan JUT Tokkonan Desa Huta Dame	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Palipi	1 paket	Pertanian
613	PDI Perjuangan	Penataan Tanah Lapang Mogang	Penataan Kampung / Huta	Palipi	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
614	PDI Perjuangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Kecamatan Palipi	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKEDES/POLINDES dan sarana pendukung	Palipi	1 paket	Kesehatan
615	PDI Perjuangan	Pembangunan Saluran Bulugadung Desa Ginolat	Pembangunan saluran Irigasi	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
616	PDI Perjuangan	Penataan Pustu Desa Ginolat	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKEDES/POLINDES dan sarana pendukung	Sianjar Mula Mula	1 paket	Kesehatan



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
617	PDI Perjuangan	Penempatan alat berat untuk normalisasi sungai di Kecamatan Sianjur mula-mula	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan Puskesmas/PUSTU/POSKESDES/POLINDES dan sarana pendukung	Sianjar Mula Mula	1 paket	Kesehatan
618	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Pintu Batu-Harapan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1300 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
619	PDI Perjuangan	Pengalihan Jalan Halaman SDN 11	Penataan Sekolah PUTR	Nainggolan	50 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
620	PDI Perjuangan	Pengalihan Jalan Halaman SDN 21	Penataan Sekolah PUTR	Nainggolan	60 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
621	PDI Perjuangan	Pembangunan Air Minum Huta Ginjang Dusun III	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	Nainggolan	250 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
622	PDI Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Londut Dusun III	Pembangunan Jalan Lingkungan	Nainggolan	250 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
623	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Kantor Desa	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	150 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
624	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Sijurjur-Siparogung	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	920 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
625	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Sihaming-Partupan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	830 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
626	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Lingkungan Dolok Marisi	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	420 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
627	PDI Perjuangan	Pembangunan DYK Saluran Sibala	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Nainggolan	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
628	PDI Perjuangan	Pembangunan DYK Saluran Pakkobun-Purma Dusun III	Permasalahan: Pembangunan Chekdam, Bendungan, Embung, Kanal Air, Tanggul Sungai	Nainggolan	375 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
629	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan Dolok Marisi-Hutaginjang	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	5500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
630	PDI Perjuangan	Pembangunan Bronjong Sungai Sijurjur	Pembangunan Bronjong Jalan	Nainggolan	400 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
631	PDI Perjuangan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Penghubung Kecamatan Nainggolan menuju Kecamatan Palipi Hutaginjang-Pamutaran	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Nainggolan	1000 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
632	PDI Perjuangan	Pembangunan Jalan antar Desa Pasaran Parsaoran menuju Pasaran 1	Pembangunan Jalan	Nainggolan	940 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
633	PDI Perjuangan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lingkungan SDn 21 Pasaran Parsaoran	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan	Nainggolan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
634	PDI Perjuangan	Peningkatan Gedung dan Rumah Dinas SDN 21	Rehabilitasi Gedung Perumahan Guru	Nainggolan	1 paket	Pendidikan
635	PDI Perjuangan	belum tersedianya akses jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Onan Runggu	200 juta	Pertanian
636	PDI Perjuangan	kurangnya kebutuhan masyarakat maka perlunya ternak kerbau	Penyediaan Benih/Bibit Ternak/Pertanian, Hijauan Pakan Ternak atau Ternak Lainnya	Onan Runggu	600 juta	Pertanian
637	PDI Perjuangan	belum tertata, maka perlunya Penataan Kantor Kepala Desa	Penataan Kantor Kepala Desa	Onan Runggu	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
638	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan dari samping CV Saplyn menuju Kantor Desa Unjur	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
639	PDI Perjuangan	Pemagaran SDN 16 Desa Unjur	Pemagaran Sekolah	Simanindo	1 paket	Pendidikan
640	PDI Perjuangan	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Unjur	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Simanindo	1 paket	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
641	PDI Perjuangan	Pembukaan Pantai Pasir Putih di Dusun I Siburak-burak Desa Unjur menuju Pelabuhan Ihan Batak Ambarita	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
642	PDI Perjuangan	Pengadaan Lampu Jalan Solar Cell Desa Unjur	Penambahan Lampu Jalan	Simanindo	1 paket	Lingkungan Hidup
643	PDI Perjuangan	Peningkatan Jalan menuju Spot Wisata "PEA FARM HOUSE"	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
644	PDI Perjuangan	Penerangan Lampu Jalan	Penambahan Lampu Jalan	Simanindo	1 paket	Lingkungan Hidup
645	PDI Perjuangan	Tanah longsor maka perlunya pembangunan tembok penahan tanah	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Onan Runggu	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
646	PDI Perjuangan	Belum tersedia saluran air maka perlunya pembangunan saluran air	Pembangunan saluran Irigasi	Onan Runggu	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
647	PDI Perjuangan	perlunya Peningkatan Bangunan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Onan Runggu	1 Paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
648	PDI Perjuangan	jalan belum memadai untuk dilalui, maka perlu Lanjutan Penataan Huta Simangariring Desa Ginolat Kec. Sianjur Mula-mula	Pembangunan Jalan Lingkungan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
649	PDI Perjuangan	belum ada jaringan irigasi, maka perlu Pembangunan Irigasi Juma Bulu DUsun I Desa Hasinggaan Kec. Sianjur Mula-mula	Pembangunan Jaringan Irigasi Tertier	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pertanian
650	PDI Perjuangan	pagar sekolah sudah rusak, maka perlunya Rehb Pagar Sekolah SMP. Negeri 2 Harian Desa Siparmahan Kecamatan Harian	Pemagaran Sekolah	Harian	1 paket	Pendidikan
651	PDI Perjuangan	sering terjadi longsor , maka sangat perlu Pembangunan TPT Jalan Arsam Desa Sarimarihut Kec. Sianjur Mula-mula	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai.	Seluruh Kecamatan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
652	PDI Perjuangan	kurangnya penataan sekolah, maka perlunya Penataan SD Negeri 18 Desa Parhorasan Kec. Pangururan	Penataan Sekolah PUTR	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
653	PDI Perjuangan	belum tersedianya kantor, maka sangat perlunya Pembangunan Kantor Kepala Desa Turpuk Sagala Kecamatan Harian	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Harian	200 juta	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
654	PDI Perjuangan	jalan belum efektif untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
655	PDI Perjuangan	jalan belum efektif untuk dilalui, maka perlunya Peningkatan Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sitio-tio	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
656	PKB	kurangnya tertatta lingkungan, maka sangat dibutuhkan Penataan Lingkungan berupa Pembuatan Pavingblock di 7 Kampung (huta) di Dusun III Rautbosi Desa Cinta Dame	Pembangunan Jalan Lingkungan	Simanindo	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
657	PKB	belum adanya jalan lingkungan,	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pangururan	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
658	PKB	belum tersedia embung untuk kebutuhan irigasi	Pembangunan Embung Air	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
659	PKB	belum adanya jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1 paket	Pertanian
660	PKB	belum adanya jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pangururan	1 paket	Pertanian
661	PKB	belum tersedia jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
662	PKB	belum adanya jalan menuju lokasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Ronggur Nihuta	1 paket	Pertanian
663	PKB	belum tersedianya jalan lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Palipi	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
664	PKB	belum adanya tersedia embung untuk irigasi pertanian, maka perlunya Pembangunan Embung	Pembangunan Embung Air	Palipi	150 juta	Pertanian
665	PKB	kebutuhan masyarakat, maka perlunya Pembangunan Dermaga	Pembangunan Dermaga	Seluruh Kecamatan	400 juta	Perhubungan
666	PKB	belum tersedia air minum, maka dibutuhkan Pembangunan Reservoir Air Minum	Pembangunan Reservoir	Palipi	200 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
667	PKB	belum tersedia saluran, maka perlunya Pembangunan Saluran Irigasi	Pembangunan Drainase Jalan	Seluruh Kecamatan	100 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Kecamatan	Koefisien	Urusan
668	PKB	jalan longsor, maka perlunya Pembangunan Dyk Jalan	Pembangunan DYK jalan Pedesaan	Palipi	150 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
669	PKB	belum tersedianya jalan, maka perlunya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Palipi	100 juta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
670	PKB	Pembangunan Jembatan Ipar-ipar Desa Aek Sipitudai	Pembangunan Jembatan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
671	PKB	Peningkatan Jalan Buttu Simangonding menuju Lumban Sibabiat Desa Ginolat	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	200 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
672	PKB	Peningkatan Jalan Sipintu pintu ke Parhuta Hutaan Dusun III	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
673	PKB	Pembangunan Pipanisasi Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
674	PKB	Peningkatan Jalan Usaha Tani Naburahan Desa Habeahan Naburahan	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Sianjar Mula Mula	300 meter	Pertanian
675	PKB	Peningkatan Jalan Pandan menuju Garoga Desa Singkam	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	500 meter	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
676	PKB	Peningkatan Jalan menuju Huta Gurgur Desa Sarimarrihit	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
677	PKB	Pembangunan TPT di SD 2 Desa Aek Sipitudai	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pendidikan
678	PKB	Peningkatan Jalan Sp. Gereja Pentakosta menuju Ipar-ipar Desa Aek Sipitudai	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
679	PKB	Peningkatan Jalan Gereja Katolik menuju Sibaluhut Desa Huta Ginjang	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Seluruh Kecamatan	2 km	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
680	PKB	Pengadaan Solar Sell (lampu jalan) di Kecamatan Sianjur Mulamula	Penambahan Lampu Jalan	Sianjar Mula Mula	1 paket	Lingkungan Hidup





5.2 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pembangunan tahun 2023 yang diwarnai dengan bencana dunia dengan merabaknya Wabah Covid-19 pada tahun 2020 yang berlanjut sampai pada tahun 2022 hingga berdampak sampai tahun 2023 mengakibatkan turunnya anggaran pembangunan untuk keberlanjutan pembangunan Kabupaten Samosir. Pembangunan daerah tahun 2023 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Samosir tahun 2023, maka rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Samosir diarahkan untuk penanganan wabah covid-19 yang berdampak pada semua lidang sektor sehingga diharapkan adanya pemulihan perekonomian masyarakat dengan upaya mewujudkan tema pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2023 **"Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan"**. Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Rencana program dan kegiatan tahun 2023 memuat uraian seluruh Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026 dengan memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir.

Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan OPD yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

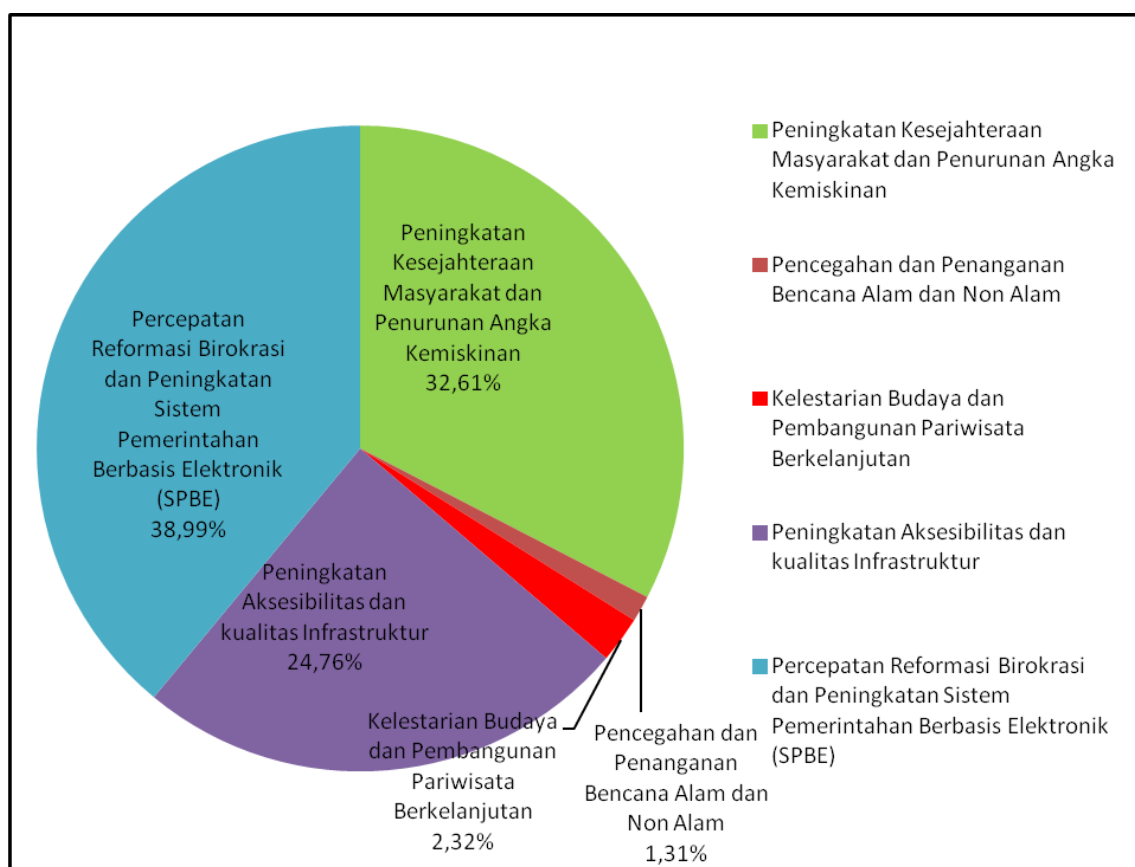
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang akan disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD. Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Dalam penyusunan rencana belanja setiap OPD harus memperhatikan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang berfokus pada penanganan wabah covid-19 serta pemulihan perekonomian masyarakat yang ditimbulkan wabah covid-19 tersebut dengan mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan keberlanjutan perekonomian masyarakat. Program Prioritas pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan total pagu indikatif seperti terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 5.4
Rancangan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Tahun 2023

No	Prioritas Tahun 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Persen
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan	151.137.048.772	32,61
2	Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	6.080.511.300	1,31
3	Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	10.764.221.400	2,32
4	Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Infrastruktur	114.763.486.771	24,76
5	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	180.692.310.598	38,99
	TOTAL	463.437.578.841	100,00



Gambar 5.1. Persentase Rancangan Pagu Indikatif Prioritas Kabupaten Samosir Tahun 2023

Rancangan pagu anggaran indikatif belanja SKPD tahun 2023 telah menyesuaikan dari PP 58 tahun 2005 menjadi PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja yang diinput SKPD sesuai dengan klasifikasi belanja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah itu sendiri yaitu :

- a. **Belanja Operasional** yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Hibah;



- Belanja Bansos.
- b. **Belanja Modal** pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.
- c. **Belanja Tidak Terduga** pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- d. **Belanja Transfer** pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
 - Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan.

Total Rencana Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp.861.564.000.000,-** (delapan ratus enam puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian pagu perangkat daerah tahun 2022 dan 2023 seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.5

Pagu Belanja Langsung OPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 dan
Proyeksi Pagu Belanja Langsung OPD Kabupaten Samosir Tahun 2023

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	
		Pagu Tahun 2022	Rancangan Pagu Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	234.316.150.108	236,000,000,000
2	Dinas Kesehatan + Puskesmas	64,152,345,636	64,894,000,000
3	RSUD dr. Hadrianus Sinaga	44.712.413.301	45,500,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	131.329.498.425	118,766,788,949
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.219.422.097	4,500,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.615.559.716	6,500,000,000
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.519.662.356	9,000,000,000
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.353.612.985	35,000,000,000
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.731.240.742	12,500,000,000
10	UPT Kebun Raya Samosir	799.685.372	800,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.118.589.442	4,200,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.972.784.399	8,100,000,000
13	Dinas Perhubungan	4.866.745.853	5,000,000,000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika/Persandian	5.122.185.030	6,000,000,000
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	13.953.657.789	15,000,000,000
16	UPT Balai Latihan Kerja	177.502.376	1,000,000,000
17	UPT Metrologi Legal Daerah	-	500,000,000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.882.778.295	4,500,000,000
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.100.342.926	16,500,000,000



No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	
		Pagu Tahun 2022	Rancangan Pagu Tahun 2023
20	Sekretariat Daerah/Arsip/Perpustakaan/Pertanahan	32.567.325.325	33,000,000,000
21	Sekretariat DPRD	22.987.234.956	23,500,000,000
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.177.306.456	8,000,000,000
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	162.216.036.601	163,000,000,000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.160.897.740	7,000,000,000
25	Inspektorat Daerah	5.561.873.709	6,000,000,000
26	Kecamatan Pangururan	5.363.926.881	5,370,000,000
27	Kecamatan Simanindo	3.147.054.617	3,200,000,000
28	Kecamatan Palipi	2.254.283.246	2,800,000,000
29	Kecamatan Nainggolan	4.433.921.721	4,500,000,000
30	Kecamatan Onan Runggu	1.845.673.067	2,000,000,000
31	Kecamatan Ronggur Nihuta	1.436.280.388	1,600,000,000
32	Kecamatan Sianjur Mulamula	1.568.682.192	1,700,000,000
33	Kecamatan Harian	1.593.116.110	1,650,000,000
34	Kecamatan Siotio	1.353.916.681	1,450,000,000
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.218.539.679	2,300,000,000
	J U M L A H	852.830.246.217	861,330,788,949

Sumber : SIPD Kabupaten Samosir, Diolah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD juga akan diarahkan dalam mendukung visi Kabupaten Samosir yakni : **"Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat Secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan"** dan mendukung perwujudan tema tahun 2023 yakni **Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan.**

Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Rencana Program dan Kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			53.872.280.000,00	
					1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			31.567.100.000,00	
					1.01.02.2.01.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru			600.000.000,00	
					1.01.02.2.01.03 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	707.100.000,00	
					1.01.02.2.01.04 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			75.000.000,00	
					1.01.02.2.01.05 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah			570.000.000,00	
					1.01.02.2.01.06 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.600.000.000,00	
					1.01.02.2.01.07 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			480.000.000,00	
					1.01.02.2.01.08 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			1.440.000.000,00	
					1.01.02.2.01.09 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			420.000.000,00	
					1.01.02.2.01.10 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			90.000.000,00	
					1.01.02.2.01.11 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			240.000.000,00	
					1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			20.000.000.000,00	
					1.01.02.2.01.22 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	1.200.000.000,00	
					1.01.02.2.01.23 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			360.000.000,00	
					1.01.02.2.01.24 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			1.950.000.000,00	
					1.01.02.2.01.25 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	875.000.000,00	
					1.01.02.2.01.27 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			725.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.01.02.2.01.28 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			235.000.000,00	
					1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			22.255.000.000,00	
					1.01.02.2.02.01 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				
					1.01.02.2.02.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru			750.000.000,00	
					1.01.02.2.02.03 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			260.000.000,00	
					1.01.02.2.02.04 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			240.000.000,00	
					1.01.02.2.02.06 - Pembangunan Laboratorium			240.000.000,00	
					1.01.02.2.02.07 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			500.000.000,00	
					1.01.02.2.02.12 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000,00	
					1.01.02.2.02.14 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			900.000.000,00	
					1.01.02.2.02.15 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			300.000.000,00	
					1.01.02.2.02.17 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			170.000.000,00	
					1.01.02.2.02.18 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			340.000.000,00	
					1.01.02.2.02.21 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			400.000.000,00	
					1.01.02.2.02.24 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			200.000.000,00	
					1.01.02.2.02.25 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	280.000.000,00	
					1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	12.000.000.000,00	
					1.01.02.2.02.35 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			3.000.000.000,00	
					1.01.02.2.02.36 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			300.000.000,00	
					1.01.02.2.02.37 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100.000.000,00	
					1.01.02.2.02.38 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			775.000.000,00	
					1.01.02.2.02.40 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			500.000.000,00	
					1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			50.180.000,00	
					1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	10.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.01.02.2.04.17 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Pengelola BOP	3 Satuan Pendidikan	40.180.000,00	
					1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
					1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
					1.01.03.2.01.01 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
					2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter			2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.000.000.000,00	
					2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00	
					2.19.02.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			65.000.000,00	
					2.19.02.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			335.000.000,00	
					2.19.02.2.01.04 - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	0 Orang	300.000.000,00	
					2.19.02.2.01.08 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	0 Orang	300.000.000,00	
							Jumlah :	54.872.280.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	52 %	113.670.200,00	
						Persentase tempat Pengelolaan Makanan memenuhi syarat kesehatan	29 %		
						Persentase tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	42 %		
						Proporsi kematian akibat keracunan.	0 %		
					1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang tidak memenuhi Ketentuan dilakukan Pembinaan	100 %	65.380.000,00	
					1.02.04.2.03.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	65.380.000,00	
						Persentase IRTP yang dilakukan Pengawasan	100 %		
					1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sarana air minum dengan resiko rendah dan sedang	33 %	48.290.200,00	
						Persentase tingkat mutu higiene sanitasi B	26 %		
						Persentase tingkat mutu higiene sanitasi hotel	26 %		
					1.02.04.2.04.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	48.290.200,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Air Minum yang dilakukan Pengawasan	100 %		
						Persentase TPM yang dilakukan Pengawasan	100 %		
						Persentase TTU yang dilakukan Pengawasan	100 %		
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB	95 %	9.850.398.082,00	
						Angka kesakitan cacat tingkat 2 per 1.000.000 penduduk	90 Orang		
						Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	12 Bulan		
						Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	112 per 100.000 penduduk		
						Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	28 %		
						Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan	0 %		
						Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0 %		
						Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	21 %		
						Cakupan pengobatan semua kasus TB	100 %		
						Case Fataity Rate (CFR) KLB	5,1 %		
						Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	112 per 100.000 penduduk		
						Jumlah Bulan Pelaksanaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Bulan		
						Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan dalam tantangan	95 %		
						Jumlah forum masyarakat yang berfungsi	90 Orang		
						Jumlah Jemaah Haji yang tidak bugar	0 Orang		
						Jumlah Kasus DBD	12 Kasus		
						Jumlah Kasus PenyAngka Kematian Ibu (AKI)t yg dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	12 Kasus		
						Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Bayi Baru Lahir	0 Kasus		
						Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin	0 Kasus		
						Jumlah kebijakan pemerintah Kab/Kota yang mendukung	28 %		
						Jumlah KIPI	5,1 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Madya	21 %		
						Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Utama	100 %		
						Jumlah tim pembina yang berfungsi	12 Bulan		
						Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk	5,3 %		
						Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	90 Orang		
						Persentase ASN yang Tidak Bugar	21 %		
						Persentase bayi yang HIV positif	0 %		
						Persentase Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Berindikasi yang Mendapatkan VAR	0 Kasus		
						Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan	84 %		
						Persentase keluarga pra sehat	5,1 %		
						Persentase keluarga tidak sehat	100 %		
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	84 %		
						Persentase Komplikasi Kebidanan	28 %		
						Persentase Komplikasi Neonatus	5,3 %		
						Persentase ODGJ Berat	11,28 %		
						Persentase ODMK	112 per 100.000 penduduk		
						Persentase Pekerja yang Tidak Bugar	21 %		
						Persentase Pekerja yang tidak Sehat	6 Orang		
						Persentase Penduduk mempunyai Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	95 %		
						Persentase remaja yang terkena IMS	0 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan gangguan pendengaran	2,3 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan Gangguan Penglihatan	1,83 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan Resiko Anemia	28 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Diabetes Melitus	5,4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Diabetes Melitus	5,4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Tekanan Darah Tinggi	10,4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Tekanan Darah Tinggi	10,4 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Obesitas	14 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko DM	3.2 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko Hipertensi	3.9 %		
						Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	4 %		
						"Prevalensi balita gizi buruk"	0,18 %		
						Prevalensi balita gizi kurang	2,2 %		
						Prevalensi Cacingan Anak Usia 2 s.d.12 Tahun	0 Kasus		
						Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa.	0,0530 %		
						Prevalensi KEK pada ibu hamil	6,9 %		
						Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,7 %		
						Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	3,6 %		
						Proporsi ibu hamil dengan sifilis yg dirujuk dan diobati	90 %		
						Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	100 %		
						Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93 %		
						Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	0 %		
						Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	17 %		
						Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60%	0 Orang		
						Rasio Puskesmas	0,096388639 %		
						Rasio Pustu	0,30523069 %		
						Tingkat kematian karna TBC (per 100.000 penduduk)	9 per 100.000 penduduk		
					1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	43 %	7.165.534.807,00	
						Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi dan atau diuji	81 %		
						Jumlah bahan habis pakai yang tersedia	133 %		
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Tersedia	133 %		
					1.02.02.2.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	400.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02.02.2.01.03 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	200.000.000,00	
					1.02.02.2.01.04 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	801.937.807,00	
					1.02.02.2.01.10 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	2 Unit	400.000.000,00	
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit		
					1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	2.373.318.000,00	
						Jumlah alat kesehatan yang dibutuhkan	277 item		
					1.02.02.2.01.16 - Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Diadakan	188 item	1.950.021.068,00	
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket		
					1.02.02.2.01.17 - Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	85 item	1.040.257.932,00	
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket		
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket		
					1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	2.684.863.275,00	
						Jumlah forum Desa Kota Sehat	100 %		
						Jumlah forum Kabupaten Kota Sehat	100 %		
						Jumlah forum Kecamatan Kota Sehat	100 %		
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan 24 jam	100 %		
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan survei Akreditasi	75 %		
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan survei re- Akreditasi	100 %		
						Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi	100 %		
						Persentase bayi diimunisasi HbIg dari ibu hamil yang reaktif	100 %		
						Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %		
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100 %		
						Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100 %		
						Persentase Intervensi lanjut pada keluarga pra sehat	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Intervensi lanjut pada keluarga tidak sehat	100 %		
						Persentase Jemaah Haji dengan kondisi kebugaran kurang sekali yang dikonseling	100 %		
						Persentase kasus DBD yang dilakukan Fogging	100 %		
						Persentase kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) berindikas yang ditangani	52 kasus		
						Persentase KUPI yang ditangani Komda PP KUPI	100 %		
						Persentase ODMK yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Pekerja dengan kondisi kebugaran kurang yang dikonseling	100 %		
						Persentase Pekerja yang tidak sehat yang dikonseling	100 %		
						Persentase penderita diare Balita mendapat oralit dan Zinc	100 %		
						Persentase penderita diare semua umur mendapat oralit	100 %		
						Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita Obesitas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita ODGJ Berat yang Ditangani Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penduduk Resiko yang Ditangani	100 %		
						Persentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100 %		
						Persentase Pengobatan Standar	1 lembaga		
						Persentase remaja IMS yang ditangani	100 %		
						Persentase Spesimen Penyakit Potensial KLB yang Terkonfirmasi	175 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Berisiko Diabetes Melitus yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Berisiko Tekanan Darah Tinggi yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Obesitas yang dilakukan Konseling	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko DM yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko Hipertensi yang dilakukan Konseling	100 %		
						Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	100 %		
						Proporsi Ibu Hamil yg Sifilis	100 %		
						Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV/AIDS	10 %		
						Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100 %		
						RFT rate MB	1 lembaga		
						RFT rate PB	52 kasus		
					1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil K1	100 %	82.932.500,00	
						Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100 %		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang		
						Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT	100 %		
						Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Imunisasi Td2+	84 %		
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (90 Tablet)	100 %		
					1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2591 Orang	338.867.000,00	
					1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2468 Orang	59.847.425,00	
					1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan BCG/ Polio 1	100 %	22.944.000,00	
						Cakupan DPT/HB-Hib-1/ Polio 2	100 %		
						Cakupan DPT/HB-Hib-2/ Polio 3	100 %		
						Cakupan DPT/HB-Hib-3/ Polio 4	100 %		
						Cakupan Hb0	100 %		
						Cakupan MR	100 %		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
						Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase baduta usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan DPT/HB-Hib	100 %		
						Persentase baduta usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan MR	100 %		
					1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan penjangkaran Siswa SD dan Setingkat	100 %	12.713.750,00	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26816 Orang		
						Persentase anak kelas 1 SD yang mendapatkan Imunisasi Campak	97 %		
						Persentase anak kelas 1 SD yang mendapatkan Imunisasi DT	97 %		
						Persentase anak kelas 2 dan 5 SD yang mendapatkan Imunisasi Td	97 %		
						Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
					1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.820.500,00	
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
					1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.853.750,00	
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13718 Orang		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
					1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31.328.000,00	
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2378 Orang		
						Persentase Berisiko Hipertensi Dilakukan Pemeriksaan	100 %		
					1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	342.683.000,00	
						Persentase Berisiko Diabetes Melitus Dilakukan Pemeriksaan	100 %		
						Persentase Obesitas Dilakukan Pemeriksaan	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	39.428.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	274 Orang		
						Persentase ODMK yang Dilakukan Pemeriksaan	100 %		
					1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	332.306.000,00	
						Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	95 %		
					1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	23.763.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2139 Orang		
						Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang diberikan pertanyaan tentang HIV/AIDS	1824 orang		
						Persentase capaian ibu hamil diperiksa sifilis pada Kab/Kota	100 %		
						Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	100 %		
						Persentase remaja yg dilakukan skrining IMS	75 %		
					1.02.02.2.02.13 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	87.804.250,00	
						Persentase Penduduk Resiko yang dilakukan Pemeriksaan	100 %		
					1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	100.000.000,00	
						Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100 %		
						Persentase bayi usia kurang dari 6 tahun yang mendapatkan ASI Eksklusif	100 %		
					1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2.500.000,00	
						"Jumlah Jemaah Haji yang diukur kebugarannya"	5 Orang		
						Jumlah kader yang dilatih	26 Orang		
						Jumlah kelompok kerja yang didata	26 kelompok		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah kelompok kerja yang mendapatkan pembinaan	26 Kelompok		
						Persentase ASN yang diukur Kondisi Kebugarannya	45 %		
						Persentase Pekerja yang diukur Kondisi Kebugarannya	45 %		
					1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	45.951.500,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		
						Persentase Verifikasi Keluarga	60 %		
					1.02.02.2.02.21 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7.140.000,00	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	177 Orang		
						Persentase Warga Negara Usia >15 Tahun Mendapatkan Skrining Gangguan Mental Emosional	100 %		
					1.02.02.2.02.24 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Hibah Untuk melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 bulan	212.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		
					1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka penemuan penderita kusta baru yang ditemukan (Per 100.000)	0.8 per 100.000 Penduduk	244.003.600,00	
						Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen		
						Jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	526 kasus		
						Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	1 orang		
						Jumlah sampel feses anak SD/MI	210 sampel		
						Persentase balita batuk atau kesukaran bernafas yang diberikan tatalaksana standar	100 %		
						Persentase cacat tingkat 2	0 %		
						Persentase ibu hamil yang diskriming HbSAg	56 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100 %		
						Persentase Konfirmasi laboratorium	100 %		
						Persentase penderita diare Balita dilayani	15 %		
						Persentase penderita diare yang ditangani	90 %		
						Persentase penderita kusta <15 tahun	0 %		
					1.02.02.2.02.28 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	270.000,00	
						Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	100 %		
					1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	415.420.000,00	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		
						Jumlah Puskesmas yang memiliki Extra Fooding Petugas Jaga Malam	12 Puskesmas		
					1.02.02.2.02.35 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	201.530.000,00	
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan pendampingan Akreditasi	1 Puskesmas		
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan pendampingan re-Akreditasi	12 Puskesmas		
					1.02.02.2.02.36 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.440.000,00	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		
						Persentase KIPi yang dilacak	100 %		
					1.02.02.2.02.37 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan desa/kecamatan Rumor KLB yang dilakukan Verifikasi	100 %	22.317.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		
					1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMk yang ditingkatkan Kompetensinya	93 %	160.355.000,00	
						Persentase SMDK yang memenuhi Kompetensi dan Persyaratan Jabatan	93 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk	0,56 Per jumlah penduduk		
						Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk	3,83 Per jumlah penduduk		
					1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memenuhi Jumlah Tenaga Medis yang Standar	94 %	140.000.000,00	
						Persentase Puskesmas yang Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal	100 %		
					1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Usulan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan	1 Dokumen	140.000.000,00	
						Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapatkan Penugasan Sementara	1 orang		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	654 Orang		
					1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SMDK yang Mengikuti Uji Kompetensi dan Persyaratan Jabatan	93 %	20.355.000,00	
					1.02.03.2.03.01 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	20.355.000,00	
						Persentase SDM yang akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional	93 %		
					1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	11 %	142.117.500,00	
					1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki kader kesehatan minimal 2 orang	100 %	142.117.500,00	
						Persentase desa yang memiliki pembinaan PHBS di Rumah Tangga	11 %		
						Persentase desa yang memiliki peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	100 %		
						Persentase desa yang memiliki peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati/ Walikota	11 %		
						Persentase desa yang memiliki posyandu dan UKBM lainnya	100 %		
					1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	142.117.500,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase desa yang dilaksanakan advokasi terkait dana desa untuk kesehatan Persentase desa yang dilaksanakan advokasi terkait forum desa kelurahan Persentase desa yang dilaksanakan advokasi terkait peran serta masyarakat dan ORMAS Persentase desa yang dilaksanakan advokasi terkait peraturan desa tentang kesehatan Persentase desa yang dilaksanakan Pelatihan kader Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan posyandu dan UKBM lainnya	100 % 11 % 11 % 11 % 100 % 100 %		
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB Angka kesakitan cacat tingkat 2 per 1.000.000 penduduk Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pengobatan semua kasus TB Case Fataity Rate (CFR) KLB Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Jumlah Bulan Pelaksanaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan dalam tantanan Jumlah forum masyarakat yang berfungsi Jumlah Jemaah Haji yang tidak bugar Jumlah Kasus DBD	95 % 90 Orang 12 Bulan 112 per 100.000 penduduk 28 % 0 % 0 % 21 % 100 % 5,1 % 112 per 100.000 penduduk 12 Bulan 95 % 90 Orang 0 Orang 12 Kasus	5.564.800.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Kasus PenyAngka Kematian Ibu (AKI)t yg dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	12 Kasus		
						Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Bayi Baru Lahir	0 Kasus		
						Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin	0 Kasus		
						Jumlah kebijakan pemerintah Kab/Kota yang mendukung	28 %		
						Jumlah KIPPI	5,1 %		
						Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Madya	21 %		
						Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Utama	100 %		
						Jumlah tim pembina yang berfungsi	12 Bulan		
						Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk	5,3 %		
						Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	90 Orang		
						Persentase ASN yang Tidak Bugar	21 %		
						Persentase bayi yang HIV positif	0 %		
						Persentase Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Berindikasi yang Mendapatkan VAR	0 Kasus		
						Persentase keluarga pra sehat	5,1 %		
						Persentase keluarga tidak sehat	100 %		
						Persentase Komplikasi Kebidanan	28 %		
						Persentase Komplikasi Neonatus	5,3 %		
						Persentase ODGJ Berat	11,28 %		
						Persentase ODMK	112 per 100.000 penduduk		
						Persentase Pekerja yang Tidak Bugar	21 %		
						Persentase Pekerja yang tidak Sehat	6 Orang		
						Persentase Penduduk mempunyai Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	95 %		
						Persentase remaja yang terkena IMS	0 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan gangguan pendengaran	2,3 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan Gangguan Penglihatan	1,83 %		
						Persentase Usia Pendidikan Dasar dengan Resiko Anemia	28 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Diabetes Melitus	5,4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Diabetes Melitus	5.4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Tekanan Darah Tinggi	10,4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Berisiko Tekanan Darah Tinggi	10.4 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun yang Obesitas	14 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko DM	3.2 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko Hipertensi	3.9 %		
						Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	4 %		
						"Prevalensi balita gizi buruk"	0,18 %		
						Prevalensi balita gizi kurang	2,2 %		
						Prevalensi Cacingan Anak Usia 2 s.d.12 Tahun	0 Kasus		
						Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa.	0,0530 %		
						Prevalensi KEK pada ibu hamil	6,9 %		
						Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,7 %		
						Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	3,6 %		
						Proporsi ibu hamil dengan sifilis yg dirujuk dan diobati	90 %		
						Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	100 %		
						Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93 %		
						Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	0 %		
						Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	17 %		
						Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60%	0 Orang		
						Tingkat kematian karna TBC (per 100.000 penduduk)	9 per 100.000 penduduk		
					1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	5.564.800.000,00	
						Jumlah forum Desa Kota Sehat	100 %		
						Jumlah forum Kabupaten Kota Sehat	100 %		
						Jumlah forum Kecamatan Kota Sehat	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan 24 jam	100 %		
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan survei Akreditasi	75 %		
						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan survei re- Akreditasi	100 %		
						Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi	100 %		
						Persentase bayi diimunisasi HbIg dari ibu hamil yang reaktif	100 %		
						Persentase Desa/Keluaran Universal Child Immunization (UCI)	100 %		
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100 %		
						Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100 %		
						Persentase Intervensi lanjut pada keluarga pra sehat	100 %		
						Persentase Intervensi lanjut pada keluarga tidak sehat	100 %		
						Persentase Jemaah Haji dengan kondisi kebugaran kurang sekali yang dikonseling	100 %		
						Persentase kasus DBD yang dilakukan Fogging	100 %		
						Persentase kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) berindikas yang ditangani	52 kasus		
						Persentase KIPi yang ditangani Komda PP KIPi	100 %		
						Persentase ODMK yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Pekerja dengan kondisi kebugaran kurang yang dikonseling	100 %		
						Persentase Pekerja yang tidak sehat yang dikonseling	100 %		
						Persentase penderita diare Balita mendapat oralit dan Zinc	100 %		
						Persentase penderita diare semua umur mendapat oralit	100 %		
						Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita Obesitas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		
						Persentase Penderita ODGJ Berat yang Ditangani Sesuai Standar	100 %		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase Penduduk Resiko yang Ditangani	100 %		
						Persentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100 %		
						Persentase Pengobatan Standar	1 lembaga		
						Persentase remaja IMS yang ditangani	100 %		
						Persentase Spesimen Penyakit Potensial KLB yang Terkonfirmasi	175 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Berisiko Diabetes Melitus yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Berisiko Tekanan Darah Tinggi yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 15 s.d. 59 Tahun Obesitas yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko DM yang dilakukan Konseling	100 %		
						Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas Berisiko Hipertensi yang dilakukan Konseling	100 %		
						Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	100 %		
						Proporsi Ibu Hamil yg Sifilis	100 %		
						Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV/AIDS	10 %		
						Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100 %		
						RFT rate MB	1 lembaga		
						RFT rate PB	52 kasus		
					1.02.02.2.02.26 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	5.564.800.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		
						Jumlah Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU dan BP PEMDA)	43308 orang		
							Jumlah :	15.831.340.782,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS ONAN RUNGGU

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Promotif dan Preventif	12 %	703.820.000,00	
						Jumlah Bulan Pelaksanaan Promotif dan Preventif	12 Bulan		
					1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan BOK Puskesmas	12 Puskesmas	703.820.000,00	
					1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas	12 Bulan	703.820.000,00	
							Jumlah :	703.820.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR

PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya pelayanan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	0 0	13.555.000.000,00	
						Persentase terpenuhinya pelayanan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 Persen		
					1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 Persen	2.650.000.000,00	
					1.02.02.2.01.12 - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	
					1.02.02.2.01.13 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	4 Unit	500.000.000,00	
					1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000,00	
					1.02.02.2.01.18 - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit yang terlaksana	100 Persen	50.000.000,00	
					1.02.02.2.01.19 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan pendukung rumah sakit yang terlaksana	100 Persen	50.000.000,00	
					1.02.02.2.01.20 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	50.000.000,00	
					1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 Persen	10.100.000.000,00	
					1.02.02.2.02.23 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	100.000.000,00	
					1.02.02.2.02.32 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	10.000.000.000,00	
					1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan kegiatan integrasi sistem informasi kesehatan yang terselenggara	100 Persen	200.000.000,00	
					1.02.02.2.03.02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	
					1.02.02.2.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Izin Rumah Sakit Kelas C yang Diperoleh	100 Persen	605.000.000,00	
					1.02.02.2.04.02 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	400.000.000,00	
					1.02.02.2.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	205.000.000,00	
					1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	350.000.000,00	
					1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan daerah kabupaten/kota	100 Persen	350.000.000,00	
					1.02.03.2.03.01 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	350.000.000,00	
Jumlah :								13.905.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	50 orang	200.000.000,00	
						Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	50 Orang		
					1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi, Operator dan tenaga teknis/ analis yang tersertifikasi	50 orang	100.000.000,00	
					1.03.11.2.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	100.000.000,00	
					1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pekerjaan yang bekerja sesuai ketentuan teknis	50 Orang	100.000.000,00	
						Jumlah Pekerjaan yang Dilaksanakan sesuai ketentuan teknis	50 Kegiatan		
					1.03.11.2.04.03 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pekerja Jasa Konstruksi yang terawasi	50 Pekerja	100.000.000,00	
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
	05 . 01	Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondosi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	58 %	3.000.000.000,00	
					1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	58 %	2.000.000.000,00	
						2. Persentase Embung dan Bendungan dalam kondisi baik	80 %		
					1.03.02.2.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.5 KM	2.000.000.000,00	
					1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00	
					1.03.02.2.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.5 KM	500.000.000,00	
					1.03.02.2.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	500.000.000,00	
					1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih	53,5 %	5.419.308.800,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih	500 SR	5.419.308.800,00	
					1.03.03.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Tentang air Minum Yang dikeluarkan	5 Dokumen	680.000.000,00	
					1.03.03.2.01.04 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan yang Dibangun/ Dikembangkan	2 SPAM	1.500.000.000,00	
					1.03.03.2.01.07 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM perkotaan yang Dikembangkan	3 SPAM	1.000.000.000,00	
					1.03.03.2.01.15 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Perdesaan dan Perkotaan dalam Kondisi Mantap	5 SPAM	599.340.000,00	
						Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0 Unit		
					1.03.03.2.01.16 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0 Unit	600.000.000,00	
					1.03.03.2.01.19 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Perdesaan yang Dikembangkan	2 SPAM	1.039.968.800,00	
					1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	52,3 %	3.000.000.000,00	
					1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	250 SR	3.000.000.000,00	
					1.03.05.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1.000.000.000,00	
					1.03.05.2.01.12 - Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	250 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	
					1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Titik Drainase yang di bangun	10 Titik	500.000.000,00	
					1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang terbangun	1000 Meter	500.000.000,00	
					1.03.06.2.01.07 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1000 M	500.000.000,00	
					1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Penanganan	10 Permukiman Kumuh	8.000.000.000,00	
					1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permukiman yang Mendapatkan Penanganan	15 Permukiman	8.000.000.000,00	
					1.03.07.2.01.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permukiman yang Mendapatkan Penanganan	20 Permukiman	8.000.000.000,00	
						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Sistem Jaringan		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			46.647.573.949,00	
					1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			46.647.573.949,00	
					1.03.10.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1.000.000.000,00	
					1.03.10.2.01.04 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100.000.000,00	
					1.03.10.2.01.05 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	14.047.573.949,00	
					1.03.10.2.01.08 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	30 KM	20.000.000.000,00	
					1.03.10.2.01.11 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 KM	1.500.000.000,00	
					1.03.10.2.01.12 - Pembangunan Jembatan			5.000.000.000,00	
					1.03.10.2.01.24 - Pembangunan Jalan Strategis Desa			5.000.000.000,00	
					1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	50 Orang	200.000.000,00	
					1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI	50 Penyedia	200.000.000,00	
					1.03.11.2.02.04 - Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU			100.000.000,00	
					1.03.11.2.02.07 - Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			100.000.000,00	
					1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.500.000.000,00	
					1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1.500.000.000,00	
					1.03.12.2.01.03 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.500.000.000,00	
					1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.040.000.000,00	
					1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.040.000.000,00	
					1.04.03.2.03.02 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.040.000.000,00	
					Jumlah :			69.506.882.749,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim							
	06 . 02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dana yang dibutuhkan	100 %	760.484.800,00	
						Dana yang dibutuhkan	120 Paket		
						Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	90 %		
						Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	90 %		
						Persentase Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	100 %		
					1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	90 %	86.467.800,00	
					1.05.03.2.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1 kali	86.467.800,00	
					1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	90 %	374.664.800,00	
					1.05.03.2.02.03 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 kali	30.000.000,00	
					1.05.03.2.02.06 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 lokasi	248.162.000,00	
					1.05.03.2.02.08 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terciptanya Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	28 Orang	96.502.800,00	
					1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	177.272.200,00	
					1.05.03.2.03.02 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	100 %	75.500.200,00	
					1.05.03.2.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	101.772.000,00	
					1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	122.080.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.05.03.2.04.06 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	122.080.000,00	
Jumlah :								760.484.800,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	150.000.000,00	
					1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten kota	100 %	150.000.000,00	
					1.05.02.2.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani	100 %	150.000.000,00	
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim							
	06 . 02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	0 0	150.000.000,00	
						Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	90 %		
					1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam satu daerah kabupaten kota	90 %	50.000.000,00	
					1.05.04.2.01.02 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	50.000.000,00	
					1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 Kegiatan	100.000.000,00	
					1.05.04.2.04.01 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2 Kegiatan	100.000.000,00	
Jumlah :								300.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR

PERANGKAT DAERAH : 1.06.2.13.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 02	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial			1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			80.000.000,00	
					1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000,00	
					1.06.02.2.03.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	80.000.000,00	
					1.06.02.2.03.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
					1.06.02.2.03.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan atau karang taruna yang difasilitasi bantuan	10 dokumen		
					1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			895.400.000,00	
					1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			888.000.000,00	
					1.06.04.2.01.02 - Penyediaan Sandang				
					1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	722 Orang	888.000.000,00	
					1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			7.400.000,00	
					1.06.04.2.02.02 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	7.400.000,00	
					1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			70.600.000,00	
					1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			70.600.000,00	
					1.06.05.2.02.01 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1 dokumen	70.600.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			212.800.000,00	
					1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
					1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan			50.000.000,00	
					1.06.06.2.01.02 - Penyediaan Sandang	Persentase tersedianya sandang bagi korban bencana	100 persen	50.000.000,00	
					1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			112.800.000,00	
					1.06.06.2.02.02 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	112.800.000,00	
					2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			400.000.000,00	
					2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000,00	
					2.13.05.2.01.05 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
					2.13.05.2.01.09 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	400.000.000,00	
Jumlah :								1.658.800.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.000.000,00	
					2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	
					2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000,00	
					2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	
					2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			50.000.000,00	
					2.09.03.2.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0 Laporan	50.000.000,00	
	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			150.000.000,00	
					2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			150.000.000,00	
					2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lomba Cipta Menu	1 Paket	150.000.000,00	
					2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			179.492.197,00	
					2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			179.492.197,00	
					2.09.05.2.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Satgas Keamanan Pangan	1 paket	120.000.000,00	
					2.09.05.2.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			59.492.197,00	
					3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.485.840.632,00	
					3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.485.840.632,00	
					3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Restocking Ikan (danau toba dan embung/pea-pea))	67 lokasi	1.485.840.632,00	
	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.949.086.700,00	
					3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			2.700.000.000,00	
					3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok	2.700.000.000,00	
						Kolam Darat dan Bioflok	10 Paket		
					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.249.086.700,00	
					3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
					3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1.249.086.700,00	
						Operasinal BBI	1 Tahun		
						Rehab BBI	1 Paket		
					3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.780.631.471,00	
					3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			5.780.631.471,00	
					3.25.05.2.01.02 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian	1 Dokumen	5.780.631.471,00	
						Jumlah KJA dan KJT yang ditertibkan	324 petak		
					3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			5.220.000.000,00	
					3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.520.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3.27.02.2.01.02 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Operasional Traktor Roda 4	7 unit	2.520.000.000,00	
						Pembangunan Rumah Kompos	3 paket		
						Pemeliharaan Traktor Roda 4	7 unit		
						Pengadaan Mesin Pencacah	134 Paket		
						Pengadaan Perlengkapan Rumah Kompos	3 paket		
						Pengadaan Pupuk Organik	1 Paket		
						Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KP3)	1 tahun		
					3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			900.000.000,00	
					3.27.02.2.02.02 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Intensifikasi Tanaman Kopi	100 Ha	900.000.000,00	
						Pemeliharaan Kebun Induk Kopi	1 Ha		
						Peremajaan Tanaman Kopi	200 Ha		
					3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00	
					3.27.02.2.03.01 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 Laporan	1.000.000.000,00	
						Pengembangan Tanaman Jagung	500 Ha		
						Pengembangan Tanaman Padi	500 Ha		
						Pengembangan Tanaman Bawang Merah	5 Ha		
						Pengembangan Tanaman Jahe	5 Ha		
						Pengembangan Tanaman Kacang Tanah	5 Ha		
						Pengembangan Tanaman Kentang	5 Ha		
					3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000,00	
					3.27.02.2.05.05 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ternak ayam	1000 ekor	800.000.000,00	
						Ternak Babi	100 ekor		
						Ternak Itik	1000 ekor		
					3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			400.000.000,00	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian			400.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3.27.03.2.02.01 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	
					3.27.03.2.02.02 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	
					3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			300.000.000,00	
					3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
					3.27.04.2.01.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemberantasan Penyakit Rabies	15000 dosis	300.000.000,00	
						Pengobatan Ternak	500 ekor		
					3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.151.440.000,00	
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.151.440.000,00	
					3.27.07.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bantuan Operasional Penyuluh	1 tahun	2.151.440.000,00	
						Pelatihan dasar dan Teknis Penyuluh	75 orang		
						Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	134 kelompok		
						Pembinaan dan Penilaian Kelompok tani	600 kelompok		
						Sekolah Lapang	9 Kecamatan		
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
	05 . 02	Infrastruktur Ekonomi			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			200.000.000,00	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian			200.000.000,00	
					3.27.03.2.02.03 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	
Jumlah :								19.886.491.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 2.11.3.26.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim							
	06 . 01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			835.374.500,00	
					2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			519.307.500,00	
					2.11.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	450.000.000,00	
						Persentase terlaksananya akreditasi Laboratorium Lingkungan	90 %		
					2.11.03.2.01.03 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi	70 unit	69.307.500,00	
						Jumlah bahan kimia yang tersedia untuk pengujian parameter kualitas air	19 parameter		
						Persentase layanan penyediaan bahan logistik kantor	100 %		
					2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			316.067.000,00	
					2.11.03.2.02.01 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun (IKLH)	1 dokumen	256.067.000,00	
						Jumlah dokumen yang disusun (IKPLHD)	1 dokumen		
						Jumlah titik sampling Danau Toba dan Air Baku yang diuji	124 titik		
					2.11.03.2.02.02 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terpeliharanya gedung IPAL di Kab. Samosir	90 %	60.000.000,00	
					2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			732.932.498,00	
					2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			732.932.498,00	
					2.11.04.2.01.03 - Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	300.000.000,00	
						Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha		
					2.11.04.2.01.04 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	432.932.498,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	90 %		
					2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			40.000.000,00	
					2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00	
					2.11.06.2.01.03 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	55 usaha/kegiatan	40.000.000,00	
					2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.609.111.090,00	
					2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah			1.609.111.090,00	
					2.11.11.2.01.03 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton	1.509.111.090,00	
						Persentase sampah yang ditangani	62.5 %		
					2.11.11.2.01.07 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	100.000.000,00	
						Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	90 %		
Jumlah :								3.217.418.088,00	

**REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL**

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR

PERANGKAT DAERAH : 2.14.2.08.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diberdayakan	100 %	420.497.500,00	
					2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) yang dibina	100 %	420.497.500,00	
					2.14.04.2.01.03 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			210.500.000,00	
					2.14.04.2.01.04 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	134 Kader	209.997.500,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter			2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga produktif yang dilayani ber KB	70 %	517.500.000,00	
					2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	70 %	517.500.000,00	
					2.14.03.2.01.01 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	85.000.000,00	
					2.14.03.2.01.02 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan pada peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kab, Propinsi dan Nasional	3 Kegiatan	432.500.000,00	
						Jumlah TPK	1420 Kader		
						Jumlah :		937.997.500,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 2.15.1.05.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
	05 . 01	Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			8.320.000,00	
					2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			8.320.000,00	
					2.15.02.2.03.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	0 Orang	8.320.000,00	
						Tersedianya extra pudding pengelola/petugas terminal Onan Baru	4 orang		
					2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
					2.15.02.2.05.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat pengujian berkala kendaraan bermotor	1 set		
Jumlah :								8.320.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
	05 . 05	Transformasi Digital			2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			806.695.303,00	
					2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			806.695.303,00	
					2.16.02.2.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0 Dokumen	400.000.000,00	
						Jumlah Informasi Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	2500 Berita		
					2.16.02.2.01.06 - Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	36.695.303,00	
					2.16.02.2.01.07 - Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	250.000.000,00	
					2.16.02.2.01.10 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 Orang	120.000.000,00	
					2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.140.000.000,00	
					2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					2.16.03.2.01.03 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit		
					2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.140.000.000,00	
					2.16.03.2.02.04 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith Internet di Pemerintah Kabupaten Samosir	400 Mbps	2.140.000.000,00	
						Jumlah Website yang di Rekonfigurasi	1 Website		
						Layanan Hosting samosirkab.go.id	1 Hosting		
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik							
	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			140.000.000,00	
					2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			140.000.000,00	
					2.16.03.2.02.07 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023					
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					2.16.03.2.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan			
					2.16.03.2.02.09 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen			
					2.16.03.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	140.000.000,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat Data yang dibuat	1 Dokumen			
						Jumlah Paket Pemeliharaan jaringan	1 Paket			
					2.16.03.2.02.12 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen			
					2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik								
	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
						2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						2.21.02.2.01.03 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan		
							Jumlah :	3.086.695.303,00		

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR

PERANGKAT DAERAH : 2.17.2.07.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.500.000.000,00	
					2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			2.500.000.000,00	
					2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	388 Orang	2.500.000.000,00	
					2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			100.000.000,00	
					2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
					2.07.04.2.01.01 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40 Orang	100.000.000,00	
					2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			300.000.000,00	
					2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
					2.17.04.2.01.01 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam yang akan dilatih dan penilaian kesehatan koperasi	30 orang	300.000.000,00	
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha		
					2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			590.000.000,00	
					2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			590.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.17.05.2.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi yang dilatih pada Koperasi Sektor Riil	96 orang	590.000.000,00	
						Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi yang dilatih pada Koperasi Simpan Pinjam	60 orang		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	156 Orang		
					2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.280.000.000,00	
					2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.280.000.000,00	
					2.17.06.2.01.01 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang menerima bantuan	26 Koperas	1.280.000.000,00	
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Unit Usaha		
					2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			550.000.000,00	
					2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			550.000.000,00	
					2.17.07.2.01.02 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	50 orang	550.000.000,00	
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha		
					2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			4.505.390.000,00	
					2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			4.505.390.000,00	
					2.17.08.2.01.01 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku UMKM penerima bantuan berupa mesin/peralatan	100 Pelaku UMKM	4.505.390.000,00	
						Tim Promosi yang bertugas untuk melakukan dokumentasi produk dan kegiatan produksi UMKM berupa Foto, Video, Flyer.	3 orang		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			150.000.000,00	
					3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			150.000.000,00	
					3.30.03.2.01.02 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Pasar di Kabupaten Samosir	6 Pasar	150.000.000,00	
Jumlah :								9.975.390.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 2.17.2.07.3.31.01.0001 - UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			696.000.000,00	
					2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			696.000.000,00	
					2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	240 Orang	306.400.000,00	
					2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	59 Unit	389.600.000,00	
Jumlah :								696.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR

PERANGKAT DAERAH : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi			2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investor	1,5 %	680.000.000,00	
					2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif/Kemudahan Berusaha yang Dievaluasi	10 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
					2.18.02.2.01.01 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000,00	
					2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen Peta Investasi	1 Dokumen	480.000.000,00	
					2.18.02.2.02.02 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	480.000.000,00	
					2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 %	150.000.000,00	
					2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Promosi	3 Dokumen	150.000.000,00	
					2.18.03.2.01.02 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000,00	
					2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,05 Indeks	50.000.000,00	
					2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			50.000.000,00	
					2.18.04.2.01.02 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi komitmen	230 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	
					2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	5 %	330.000.000,00	
						Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	5 %		
					2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Realisasi Investasi (Rupiah)	1.25 Milyar	330.000.000,00	
					2.18.05.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.18.05.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	220 Pelaku Usaha	180.000.000,00	
					2.18.05.2.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan	110 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik							
	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,05 Indeks	400.000.000,00	
					2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			400.000.000,00	
					2.18.04.2.01.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit	300 Izin	400.000.000,00	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	300 Pelaku Usaha		
					2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Dimanfaatkan	100 %	60.000.000,00	
					2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dimanfaatkan	3 Aplikasi	60.000.000,00	
					2.18.06.2.01.01 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	60.000.000,00	
							Jumlah :	1.670.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 02	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia			2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			800.000.000,00	
					2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00	
					2.22.02.2.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	5 Objek	600.000.000,00	
					2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00	
					2.22.02.2.03.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	200.000.000,00	
					2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			400.000.000,00	
					2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			250.000.000,00	
					2.22.05.2.01.02 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	250.000.000,00	
					2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			150.000.000,00	
					2.22.05.2.02.03 - Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	150.000.000,00	
					3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi			3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			100.000.000,00	
					3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3.26.02.2.04.05 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	18 Unit Usaha	100.000.000,00	
					3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1.180.000.000,00	
					3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			950.000.000,00	
					3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	320 Orang	950.000.000,00	
					3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			230.000.000,00	
					3.26.05.2.02.01 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	150.000.000,00	
					3.26.05.2.02.03 - Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20 Orang	80.000.000,00	
	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.916.800.000,00	
					3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.750.000.000,00	
					3.26.02.2.03.02 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000.000,00	
					3.26.02.2.03.03 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	2.350.000.000,00	
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		
						Jumlah objek wisata berbasis RIPO yang ditata	2 Objek wisata		
					3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			166.800.000,00	
					3.26.02.2.04.04 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	30 Laporan	66.800.000,00	
					3.26.02.2.04.05 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	18 Unit Usaha	100.000.000,00	
					3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			950.000.000,00	
					3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			950.000.000,00	

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	320 Orang	950.000.000,00	
Jumlah :								5.296.800.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 4.01.5.06.2.10.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 02	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial			2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
					2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					2.10.05.2.01.01 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen		
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 02	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia			2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				
					2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
					2.10.07.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
					2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas			2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
					2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
					2.23.02.2.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan		

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023					
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								
	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			132.966.000,00		
					4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			132.966.000,00		
					4.01.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	132.966.000,00		
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik								
	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			552.235.375,00		
					4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			452.235.375,00		
					4.01.02.2.02.01 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	452.235.375,00		
					4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			100.000.000,00		
					4.01.02.2.03.01 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen	100.000.000,00		
								Jumlah :	685.201.375,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023					
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik								
	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan pada OPD	100 %	205.000.000,00		
					6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal	32 laporan	205.000.000,00		
					6.01.02.2.01.03 - Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan	105.000.000,00		
						Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	1 laporan			
						Laporan Hasil Reviu DAK Fisik	3 laporan			
						Laporan Hasil Reviu LPPD	1 laporan			
						Laporan Hasil Reviu RKA/RKAP	2 laporan			
						laporan Hasil Reviu RKPD/RKPDP	2 laporan			
					6.01.02.2.01.07 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase monitoring dan evaluasi tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut APIP	90 %	100.000.000,00		
								Jumlah :	205.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANGURURAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			84.000.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			84.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	84.000.000,00	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			39.909.650,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			39.909.650,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	39.909.650,00	
						Terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT RI	1 kali		
						Terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT RI di Kecamatan	1 kali		
Jumlah :								123.909.650,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SIMANINDO

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran aktif masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan kecamatan	80 %	60.000.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80 %	60.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21 Laporan	60.000.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	80 %	38.257.940,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah kepada Camat yang terlaksana	80 %	38.257.940,00	
						Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	80 %		
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	38.257.940,00	
Jumlah :								98.257.940,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PALIPI

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran aktif masyarakat dalam pembangunan kecamatan	75 %	42.500.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	70 %	42.500.000,00	
						Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	75 %		
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	42.500.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	40.000.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan perintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan oleh kepala daerah	100 %	40.000.000,00	
						Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %		
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT RI di kecamatan	1 kali	40.000.000,00	
Jumlah :								82.500.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN NAINGGOLAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			45.240.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			45.240.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang diFasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13 Desa	45.240.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			99.000.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			99.000.000,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	1000 Orang	99.000.000,00	
Jumlah :								144.240.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ONANRUNGGU

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat	60 persen	36.000.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga atau usaha ekonomi masyarakat	12 desa	36.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12 Laporan	36.000.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	22.000.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan oleh kepala daerah	100 persen	22.000.000,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terlaksananya pelaksanaan peringatan HUT RI di kecamatan	1 kali	22.000.000,00	
Jumlah :								58.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RONGGUR NIHUTA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase peran aktif masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan kecamatan	80 %	24.000.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21 laporan	24.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	24.000.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	80 0%	50.000.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	50.000.000,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaan Peringatan HUT di Kecamatan Ronggurnihuta	1 kali	50.000.000,00	
Jumlah :								74.000.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			9.480.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			9.480.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.480.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			21.400.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			21.400.000,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			21.400.000,00	
Jumlah :								30.880.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN HARIAN

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	80 %	8.000.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	80 %	8.000.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	13 Dokumen	8.000.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	80 %	25.000.000,00	
						Persentase peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum	80 %		
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah kepada Camat yang terlaksana	80 %	25.000.000,00	
						Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	80 %		
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.000.000,00	

Jumlah :

33.000.000,00

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

KABUPATEN : 1217 - KABUPATEN SAMOSIR
PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SITIO-TIO

NO	KODE PN	RPJMN 2020 - 2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					7.01 - KECAMATAN				
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
	03 . 06	Pengentasan Kemiskinan			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.600.000,00	
					7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12.600.000,00	
					7.01.03.2.03.04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	tercapainya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 ls	12.600.000,00	
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			28.075.000,00	
					7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			28.075.000,00	
					7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	tersedianya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila	1 ls	28.075.000,00	
Jumlah :								40.675.000,00	

DUKUNGAN PROGRAM KEGIATAN RKPD KAB. SAMOSIR TAHUN 2023 TERHADAP PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Prioritas	Kegiatan Strategis Daerah	Program/ Kab. Kota	Kegiatan Kab/ Kota	Sub Kegiatan Kab/ Kota	Pagu Anggaran	OPD
1	Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (tesng, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insenf bagi tenaga medis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200,000,000	RSUD
		Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunng			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	801,937,807	RSUD
		Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (ga puluh ga) Kabupaten/Kota seSumatera Utara			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400,000,000	RSUD

		Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus ga puluh ga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400,000,000	RSUD
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,373,318,000	RSUD
					Pengadaan Obat, Vaksin	1,950,021,068	RSUD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000	RSUD

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	8,649,663,275	Dinkes
2	Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	- Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,500,000,000	Disnakoperindag
		-Penguatan kebijakan daerah dalam rangka opmalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insenf dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	100,000,000	Disnakoperindag

			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100,000,000	Disnakoperindag
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	Disnakoperindag

			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000	Disnakoperindag
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	590,000,000	Disnakoperindag
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,280,000,000	Disnakoperindag

			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	550,000,000	Disnakoperindag
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4,505,390,000	Disnakoperindag
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	150,000,000	Disnakoperindag
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	125,650,000	Disnakoperindag

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	250,000,000	Disnakoperindag
					Pameran Dagang Lokal	150,000,000	Disnakoperindag
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	350,000,000	Disnakoperindag
3	Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	23,015,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

		Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang puh sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua Puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	166,443,450	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	89,962,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	59,492,197	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3,705,928,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	399,086,700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5,530,631,472	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,650,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2,657,667,439	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2,189,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	677,774,992	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	195,109,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2,099,959,750	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	720,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tema yaitu agro, eko dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	800,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Dukungan pengembangan desnasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba;		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	300,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Digitalisasi promosi pariwisata;	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	350,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya	250,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,500,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata

					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,047,420,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	150,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	430,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2,500,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	70,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,000,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	200,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	75,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata

				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata	
					Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	100,000,000	Dinas Budaya dan Pariwisata	
5	Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	192,000,000	Sekretariat Daerah	
		Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A-			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	125,000,000	Sekretariat Daerah	
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	600,000,000	Sekretariat Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	430,000,000	Sekretariat Daerah
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100,000,000	Sekretariat Daerah

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	850,000,000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	95,000,000	Sekretariat Daerah
				Fasilitasi Bantuan Hukum	160,000,000	Sekretariat Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	14,000,000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	112,000,000	Sekretariat Daerah
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16,250,000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	103,000,000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50,000,000	Inspektorat

					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	45,000,000	Inspektorat
6	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga	Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300,000,000	Badan Kesbangpol



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan disajikan kinerja tahunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibreakdown dari perencanaan pembangunan jangka menengah dan akan diadopsi untuk menentukan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023.

Permendagri 86 Tahun 2017 mendefinisikan indikator kinerja sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Namun, indikator kinerja yang dijabarkan dalam bab ini merupakan indikator kinerja yang strategis atau yang biasa disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain itu dalam rangka fokus pencapaian indikator kinerja utama maka ditetapkan program-program yang langsung mendukung capaian indikator kinerja utama tersebut sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN	REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN
		2020	2021	2022	2020	2020	2021	2021
1	Indeks tata kelola pemerintahan desa	88%	90%	(RPJMD 2021-2026)	93,44%	106,20%	92,54%	102,8%
2	Persentase OPD dengan IKM kategori "Baik"	77%	81%	(RPJMD 2021-2026)	83%	107,8%	84,34	104%
3	Indeks Pendidikan	68,53	68,55	(RPJMD 2021-2026)	68,89	100,53%	69,37	101,19%
4	Rata-rata nilai UN Pendidikan Dasar	46,5	47	(RPJMD 2021-2026)	N/A	-	N/A	-
5	Angka Harapan Hidup	70	70,5	(RPJMD 2021-2026)	71,27	102%	71,41	101,2%
6	Persentase penduduk miskin	10,30	8,5	(RPJMD 2021-2026)	12,48	78,90%	12,68	50,82%
7	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	0,5	0,5	(RPJMD 2021-2026)	0,21	42%	0,21	42%
8	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	6,76	6,17	(RPJMD 2021-2026)	3,13	46,30%	4,95	80,2%



NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN	REALISASI KINERJA TAHUN	TINGKAT CAPAIAN TAHUN
		2020	2021	2022	2020	2020	2021	2021
9	Tingkat pengangguran terbuka	1,01%	0,87%	(RPJMD 2021-2026)	1,20%	81%	0,7%	119,54%
10	Indeks Kualitas air	50-70	50-70	(RPJMD 2021-2026)	80	106,7%	51,82	69,09%
11	Indeks Kualitas Udara	98-99	99-100	(RPJMD 2021-2026)	93,047	116%	91,68	114,6%
12	Indeks tutupan lahan	100-110	100-110	(RPJMD 2021-2026)	N/A	-	54,23	108,46%
13	Rata-rata persentase panjang jalan dan jembatan pada ruas jalan strategis dalam kondisi baik	71%	80%	(RPJMD 2021-2026)	63,14%	89%	77,99%	97,4%
14	Waktu tempuh antar sentra kegiatan pertanian dan pariwisata	40	40	(RPJMD 2021-2026)	44,05	110%	44,28 km	110,7%
15	Angka kecelakaan	0	10	(RPJMD 2021-2026)	85,94%	*	24,65%	246,5%
16	Persentase bangunan publik berfungsi baik	77%	81%	(RPJMD 2021-2026)	85,94%	111,6%	88,08%	108,7%
17	Rasio rumah layak huni	82,75	82,86	(RPJMD 2021-2026)	86,67	104,7%	82,56%	99,6%
18	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	58%	65%	(RPJMD 2021-2026)	55,68%	96,00%	52,39%	80,6
19	Persentase jumlah layanan rumah tangga pengguna air bersih	58%	65%	(RPJMD 2021-2026)	55,68%	96,00%	52,39%	80,6

Sumber: LKPJ Kabupaten Samosir Tahun 2022

Tahun 2021 merupakan fase akhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir 2016-2021. Visi Pembangunan Kabupaten Samosir 2016-2021 adalah "Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian". Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir membuat upaya-upaya percepatan reformasi birokrasi melalui terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggaraan pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.



Sehubungan dengan telah ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kabupaten Samosir dan Target Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6.2
Target Kinerja Kabupaten Samosir Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
		2023	2024
1.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	BB
2.	Opini BPK	WTP	WTP
3.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35	3,38
4.	IGA (Indeks Government Award)	inovatif	inovatif
5.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Baik	Baik
6.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,75	2,50
7.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	6,5	7
8.	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	11,2	14,6
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65-75	65-75
10.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	1,75	2,50
11.	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	6,5	7
12.	Persentase rumah layak huni	11,2	14,6
13.	Persentase layanan air bersih	65-75	65-75
14.	HLS (Harapan lama Sekolah)	13,48	13,49
15.	UHH (Umur Harapan Hidup)	71,42	71,57
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,17	68,51
17.	Pendapatan Perkapita	8.726,5	8.878,75
18.	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	16,3	17,8

Sumber: RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

6.2 Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Samsir
Tahun 2023 -2024

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,59		5,70	5,80
2	Laju Inflasi	%	Tidak diukur			
3	PDRB per kapita	Juta rupiah			3.242,70	3.327,01
4	Indeks Gini	indeks	0,318		0,313	0,308
5	Pemerataan Pendapatan Bank Dunia					
6	Indeks ketimpangan Williamson		Tidak dihitung			
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87,52		87,75	88,15
8	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio			2,05	2,21
9	Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		Tidak dihitung			
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,63		70,68	70,73
11	Angka melek huruf	%	91,57		91,73	91,81
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,43		9,67	9,79
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,27	71,43	71,59	71,75
14	Persentase balita gizi buruk	%	0,11	0,2	0,19	0,18
15	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,4	2,4	2,3	2,2
16	Cakupan desa siaga aktif	%	0	3	7	11
17	Angka partisipasi angkatan kerja	%	50,17		66,17	68,51
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	50,17		66,17	68,51
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,20	1,19	1,18	1,17
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	51,54	51,64	51,70	51,75
21	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%				
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	10	12	14	15
23	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%				
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%			40	38
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	kategori			Baik	Baik
26	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%			7,93	8,07
27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	81	82	83,5	84,0
29	Penguatan Cadangan pangan					
30	Penanganan daerah rawan pangan	desa	2		3	3
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	persen	50,87		50,88	50,77
32	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
33	Produksi sektor pertanian	ton	105.988,00		107.047,88	108.118,36



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
35	Produksi Sektor Perkebunan		3.973,34		3.973,34	4.013,07
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		0,64		0,64	0,64
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9	9,1	9,2	9,3
42	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6,8	6,9	7	7,1
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0,5	0,52	0,55	0,57
44	Pertumbuhan Industri	%	10	12	14	16
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung			
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	536.599		534.634	532.670
2	Nilai Tukar Petani		Tidak dihitung			
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,95		46,95	48,45
4	Produktivitas total daerah					
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	persen			1,7	1,9
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%			43,10	43,85
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio			1,67	1,76
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio			1,67	1,76
9	Angka kriminalitas yang tertangani				50	52
10	Rasio ketergantungan				72,00	71,74
	Aspek Pelayanan Umum					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	59,69	60,01	60,03	60,05
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%			90	92
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		59,69	60,01	60,03	60,05
1.4.1	APM SD/MI/Paket A	%	95,16	95,18	95,19	95,21
1.4.2	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,42	84,44	84,46	84,47
1.4.3	APM SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten			
1.5	Angka Partisipasi Sekolah	%				
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	98,83	98,85	98,87	98,89



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	89,93	90,34	90,36	90,37
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten			
1.6	Angka Putus Sekolah	%	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten			
1.7	Angka Kelulusan		100	100	100	100
1.7.1	Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten			
1.8	Angka Melanjutkan (AM)		100	100	100	100
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan					
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	92,18	93,10	93,11	93,13
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	93,18	94,10	94,12	94,16
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	%	85,57	85,57	85,57	85,94
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		12,81	12,82	12,83	12,84
1.13	Rasio guru/murid pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		0,028	0,028	0,028	0,028
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah		Bukan wewenang Kabupaten			
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar		100	100	100	100
1.17	Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki		100	100	100	100
1.18	Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara)				98,02	98,24
1.19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		89,88	89,90	89,92	89,94
			988	982	984	986
2 Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	11,66		17	15
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	988		984	986
2.3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,73		17	15



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,48		10	9
2.5	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0		142	130
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 Balita	22,40		22,59	22,69
2.7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,95		0,95	0,95
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,0078		0,0078	0,0078
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,56		0,56	0,56
2.10	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,83		3,83	3,83
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100		100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	66,18		100	100
2.13	Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	%	84,33		100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100		100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	NA		17,5	17
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,46		100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0		2	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100		100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,1		70	75
2.20	Tingkat Prevalensi TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	104,1		187	186
2.21	Tingkat Kematian karena TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	12,7		9,5	9,0
2.22	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100		100	100
2.23	Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	86,2		92	93
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100		100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	80,04		85	90
2.26	Angka kejadian Malaria	per 1.000 orang	0		1	1
2.27	Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0		0	0
2.28	Proporsi Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA		6,3	6,5



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
2.29	Proporsi Anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yan tepat	%	100		100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02		0,02	0,02
2.31	Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	NA		85	90
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	NA		10	10
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11,31		11,2	11,1
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	73,50		100	100
2.35	Cakupan puskesmas	%	133		133	133
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	81		81	81
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100		100	100
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	62,29		100	100
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100		100	100
2.40	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	65,58		100	100
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	-		100	100
2.42	Cakupan Penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100		100	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	6,7		30	31
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100		100	100
2.45	Cakupan Desa/Keluarga mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam	%	100		100	100
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Pekerjaan Umum					
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,06		58,06	62,06
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	7,03		-0,03	-0,03
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%				
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,06		58,06	62,06
3.1.5	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	%	0,03		0,0	0,0
3.1.6	Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%		Bukan Tupoksi		
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		58	61	64
3.1.8	Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55,68		50	55



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			0	0	0
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			50	50	55
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,00	55,00	60,00	65,00
3.1.13	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	%	57,61%	57,61%	0,00	0,00
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	%			61	64
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				61	64
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	%			20	18
3.1.17	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				1	1
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk				0	0
3.2	Penataan Ruang					
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan				Tidak	Tidak
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio			100	100
3.2.4	Ruang Publik yang berubah peruntukannya		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		Tidak bisa dihitung			
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100
4.1	Rasio rumah layak huni		79,97	82,51	85	87
4.2	Rasio permukiman layak huni		51,87	54,16	57	60
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,67	89	92	95
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	11,68	13,44	16	18
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	8,24	14,11	20	26
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,72	1,68	1,62	1,58
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	15,12	11,23	11	10,5
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	12,18	9,80	9,5	9,3
4.9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	45,18	55,88	60	62,5
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang			128	190
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen		83	85	86



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen		80	80	80
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen		50	70	80
5.5	Persentase Penegakan PERDA	persen			90	90
6. Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	-	50	52	54
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	50	52	54
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	50	52	54
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		20	22	24
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1. Urusan Ketenagakerjaan						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	0
1.2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	30	35	40
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	40	45	50	55
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	50	60	70	80
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0
1.8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	0	0	0	0
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	15	20	25
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	20	25	25
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	10	20	25	25
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	10	12	14	16
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang			25	27
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	16	16	16	16



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang			25	27
2.4	Rasio KDRT	rasio	0,010		0,010	0,010
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%			0	0
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,67		57,87	57,97
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100		100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0		100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100		100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100		100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada		100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada		100	100
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	rasio	1		1	1
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	rasio	0,94		1	1
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	rasio	Bukan wewenang Kabupaten			
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	rasio	Bukan wewenang Kabupaten			
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	rasio			100	100
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	58,98		59,18	59,28
3. Pangan						
3.9	Pangan					
3.9.1	Ketersediaan pangan utama	ton	-	22.813	23.000	23.100
3.9.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hari	3.129		3.144	3.159,72



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
3.9.3	Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hari	89,26		89,70	90,14
3.9.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	3		3	5
4. Pertanian						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%			45	47
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%			100	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%			100	100
5. Lingkungan Hidup						
5.26	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	-	-	tidak ada	tidak ada
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak		Tidak	Tidak
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0		0	0
5.29	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air			51,82	53,81	53,91
5.30	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara			91,68	89,50	89,61
5.31	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	54,23	55,33	56,42
5.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Usaha		55	60	65
5.33	Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	Orang	0	0	2	1
5.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA				Ada	Ada
5.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional				Ada	Ada
5.36	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional				Ada	Ada
5.37	Penetapan Hak MHA				Ada	Ada
5.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan				Ada	Ada
5.39	Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana				Ada	Ada



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
5.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Sekolah	0	0	10	10
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	0	0	0	1
5.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Kasus	0	0	3	3
5.43	Timbulan sampah yang ditangani	Ton		12.500	14.000	16.000
5.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	n/a	22	24	26	27
5.45	Persentase cakupan area pelayanan	Kecamatan		7	7	7
5.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%		54	60	62
5.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	TPA		2	2	2
5.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		0	0	0	0
5.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		0	0	0	0
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	%	99	100	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	83	100	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	60	100	100	100
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	93.153	95.807	99.119	102.395
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	unit	67,97	74,22	78,91	83,59
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	0	0	25	50
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Desa/kel	134	134	134	134
7.4	Persentase LSM aktif	%	0			
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	12,00



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu aktif	%			100	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,01%	0,81%	0,81%	0,81%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	-	3,7	3,5	3,2	2,9
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	-	41	41	48
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	40	17	17	17
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ perkada	0	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	3	3	3	3
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	9	9	9	10
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	4	4
8.9	Ratio Akseptor KB	%	70	70	69	69
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	64	64	64	64
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	Angka	4,8	4,5	4,4	4,4
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	4,8	4,5	4,4	4,4
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	10	15	15
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	55	55	51	52
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70	70
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	55	55	60	62



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	55	55	60	62
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	55	55	60	62
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	0	0	1	1
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	65	65	65
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	40	50	50	50
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	0	0
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	90	100	100
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	65	62	63
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,70	10	10	10
9. Perhubungan						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	Tidak dihitung			
9.2	Rasio ijin trayek	rasio				
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	-	1	1	1
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	44	45	46	47
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	228,61		240,040 5	251,471
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	Bukan wewenang kabupaten			
9.7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	62,32	65,436	68,552	71,668
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	18,32		19,236	20,152
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/ barang	36.120		37.926	39.732
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	233.496		256.846	282.530
10. Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0		100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA		91,83	94,25
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71,35		92,65	93,00
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA		87,29	91,26
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	9,72		9,92	10,32
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	80	83	85	87
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	1,8	3,7	4,7	6



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
12. Penanaman Modal						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Orang		676	686	701
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (000)		1.190.502.864	1.250.028.007	1.318.779.547
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%		4,74	5,00	5,50
13. Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%			80	82
13.2	Persentase wirausaha muda	Kelompok	168	-	188	208
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	95,00	75,00	79,00	83,00
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	37,00	-	50,00	63,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	26,03	26,26	28,00	30,00
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	2	2	2
13.7	Jumlah prestasi olahraga		0	-	2	4
14. Statistik						
3.20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
3.20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
3.20.3	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
15. Persandian						
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	5,26		100	100
16. Kebudayaan						
16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	4	3	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14,30	14,80	16,30	17,80
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	-	5	5	5



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	25	0	2	2
17. Perpustakaan						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pengunjung	0,07	0,07	0,08	0,09
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	0,42	0,03	0,30	0,34
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	2,52	2,67	2,83	2,98
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	7.082	7.790	8.569	9.452
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	3.240	3.740	4.340	5.040
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	0	3	5
18. Kearsipan						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	-	0	0,5	0,7
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	40	20	20	20
Layanan Urusan Pilihan						
1. Pariwisata						
1.1	Kunjungan wisata	kunjungan	100%	100%	100%	100%
1.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1,32	1,32	1,32	1,40
1.3	Nilai PAD sektor pariwisata	%	3.412.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	5.544.000.000
2. Pertanian						
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,87		50,88	50,77
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung			
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	Tidak dihitung			
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton				
2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	5,90	-	8,40	10,90
3. Kehutanan						
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	6		10	10
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.3	Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
4. Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		98		98,2	98,4
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik		Tidak tersedia			
4.3	Persentase pertambangan tanpa izin				0	0
5. Perdagangan						
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan		n/a	n/a	n/a	n/a
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	5	6
6. Perindustrian						
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	4	5	6
7. Transmigrasi						
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa				0	0
8. Kelautan dan Perikanan						
8.1	Produksi perikanan	Ton	88%	88%	74%	75%
8.2	Konsumsi ikan					
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	17	23	29
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	87%	88%	89%	90%
8.5	Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman				100	100
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%				
8.7	Nilai Tukar Nelayan		Tidak dihitung			
Penunjang Urusan						
1. Perencanaan Pembangunan						
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100		90	92
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100		90	92
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,53	3,90	3,50	3,00
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%			0	0
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,01	27,25	27,48	27,72
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,17	14,30	15,43	16,55
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	62,43	64,26	66,08	67,91
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	1.466.091.155,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00
2.8	Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari/tahun	3		3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,13		6,5	6,25
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	19,43		0,91	7,29
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31		33	33
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.209	953	953	953
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.834	2.087	2.150	2.200
4. Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%		45	50	53
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%		50	50	55
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%		100	100	100
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%		100	100	100
3.33.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75		75	80
3.33.2	Persentase pelanggaran pegawai	%			0	0
3.33.3	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	92,26		91,29	92,50
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada		ada	ada



No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja		
			2021	2022	2023	2024
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada		ada	ada
6.3	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada		ada	ada

Sumber: Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir



BAB VII PENUTUP

Perencanaan bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan/ lakukan besok, tetapi perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita capai besok, yang kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya. Penyusunan RKPD Tahun 2023 ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, RKP Nasional tahun 2023, RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, Visi dan Misi Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir serta isu-isu strategis yang berkembang pada saat ini. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan yang dikembangkan pada periode berikutnya dapat lebih berorientasi pada upaya peningkatan daya saing ekonomi (*economic competitiveness*) dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan pemerataan kepada semua lapisan masyarakat dan pelaksanaan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Samosir.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema pembangunan **"Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan"** di Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

 **BUPATI SAMOSIR,**

VANDIKO T. GULTOM